

KONDISI SOSIAL EKONOMI
Masyarakat

DI LOKASI COREMAP II

**Kawasan Pulau Tambelan,
Kabupaten Bintan**

HASIL BME

KONDISI SOSIAL EKONOMI
Masyarakat

DI LOKASI COREMAP II

**Kawasan Pulau Tambelan,
Kabupaten Bintan**

HASIL BME

Oleh:

**TONY SOETOPO
SUDIYONO**



**Coral Reef Rehabilitation and Management Program
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(COREMAP II – LIPI)
Jakarta, 2009**



© 2010 Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
Pusat Penelitian Kependudukan bekerja sama dengan COREMAP*

Katalog dalam Terbitan

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Lokasi COREMAP II,
Kawasan Pulau Tambelan, Kabupaten Bintan: Hasil BME/Tony
Soetopo, Sudyono – Jakarta: 2010.
xiv + 114 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-602-8717-31-1

1. Sumber Daya Laut – Kondisi Sosial Ekonomi

333.911



*Pusat Penelitian Kependudukan - LIPI
Gedung Widya Graha Lt. X, Jl. Gatot Subroto 10
Jakarta Selatan, 12710
Telp.: (021) 5221687, 5251542 Psw. 720
Telp.: (021) 5207205, 5221687
E-mail: ppk-lipi@rad.net.id

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan COREMAP fase II yang bertujuan untuk menciptakan pengelolaan ekosistem terumbu karang, agar sumber daya laut ini dapat direhabilitasi, dilindungi dan dikelola secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan COREMAP dapat dikaji dari aspek bio-fisik dan sosial ekonomi. Terjadinya kecenderungan peningkatan tutupan karang merupakan indikator keberhasilan dari aspek bio-fisik. Sedangkan dari aspek sosial ekonomi diharapkan pendapatan per-kapita penduduk naik sebesar 2 persen per tahun dan terjadi peningkatan kesejahteraan sekitar 10.000 penduduk di lokasi program.

Untuk melihat keberhasilan tersebut perlu dilakukan penelitian benefit monitoring evaluation (BME) baik ekologi maupun sosial-ekonomi. Penelitian BME ekologi dilakukan setiap tahun untuk memonitor kesehatan karang, sedangkan BME sosial-ekonomi dilakukan pada tengah dan akhir program. BME sosial-ekonomi bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan COREMAP di daerah dan mengumpulkan data mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya tingkat pendapatan, untuk memantau dampak program COREMAP terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Hasil BME sosial-ekonomi ini dapat dipakai untuk memantau perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya peningkatan pendapatan penduduk di lokasi COREMAP. Selain itu, dapat juga dipergunakan untuk melakukan evaluasi pengelolaan dan pelaksanaan program, baik di tingkat nasional, kabupaten maupun di tingkat lokasi.

Buku ini merupakan hasil dari kajian BME sosial-ekonomi (T1) yang dilakukan pada tahun 2009 di lokasi-lokasi COREMAP di Indonesia Bagian Barat. BME sosial-ekonomi ini dilakukan oleh CRITC-LIPI bekerjasama dengan tim peneliti dari Pusat Penelitian Kependudukan - LIPI (PPK-LIPI) dan beberapa peneliti sosial dari kedeputian IPSK - LIPI.

Terlaksananya kegiatan penelitian dan penulisan buku ini melibatkan berbagai pihak. Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI yang telah memberikan dukungan kepada tim peneliti melakukan studi ini. Kepada para informan yang terdiri atas masyarakat nelayan, ketua dan pengurus LPSTK dan POKMAS, pemimpin formal dan informal, tokoh masyarakat di lokasi Coremap di Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, kami ucapkan terima kasih atas segala bantuannya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para pewawancara yang telah membantu pelaksanaan survai. Kami juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua narasumber dari berbagai unsur pengelola COREMAP di tingkat kabupaten: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kecamatan Tambelan, CRITC Kabupaten Bintan dan berbagai pihak yang ada di daerah yang telah membantu memberikan data dan informasi.

Jakarta, Desember 2009
Direktur NPIU CRITC COREMAP II-LIPI

Susetiono

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kerusakan terumbu karang di banyak tempat telah menimbulkan keprihatinan pemerintah. Hal itu disikapi dengan dilaksanakannya program Coremap, dengan tujuan untuk mengelola, merehabilitasi dan melestarikan terumbu karang di Indonesia. Oleh karena itu kegiatan Coremap diadakan di beberapa lokasi, termasuk di Kecamatan Tambelan.

Kegiatan Coremap pada dasarnya bertumpu pada pengelolaan yang berbasis masyarakat, maka untuk keberhasilan Coremap, terutama kondisi sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sehingga untuk mengetahui keberhasilannya perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap program tersebut.

Penelitian benefit monitoring dan evaluasi Coremap tahun 2009 ini dimaksudkan untuk mengkaji kondisi sosial ekonomi masyarakat di 4 desa lokasi Coremap di Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan. Penelitian ini untuk memantau dampak program COREMAP terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan penelitian adalah untuk (1) Mengidentifikasi permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan COREMAP di tingkat Kabupaten dan desa (lokasi Coremap); (2) Mengkaji pengetahuan dan pemahaman masyarakat berkaitan dengan kegiatan Coremap; (3)Menggambarkan tingkat pendapatan masyarakat untuk memantau dampak program Coremap terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan Coremap di kawasan Tambelan mulai diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 2005 yang ditandai dengan pembentukan LPSTK dan Pokmas serta ditetapkannya kawasan konservasi atau DPL sekitar kawasan pulau Tambelan seperti pulau Wie, Penabung dan sebagainya. Pembentukan LPSTK

tersebut diperkuat dengan SK Kepala Desa masing-masing lokasi Coremap. Kegiatan Coremap di kawasan ini pada tahun 2006/2007 tidak berjalan (vakum) karena berbagai hambatan teknis. Selanjutnya pada tahun 2008 kegiatan Coremap mulai dihidupkan kembali dengan program pemberdayaan pesisir (nelayan) dengan program mengembangkan mata pencaharian alternative (MPA).

Pada tahun 2009 dilakukan penelitian untuk mengevaluasi kegiatan Coremap terhadap kinerja LPSTK, Pokmas dan komponen serta permasalahan dan hambatan yang dihadapi program Coremap. Hasil penelitian menunjukkan adanya berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi program Coremap, sehingga berdampak pada pelaksanaan program tersebut. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya hambatan dan kendala program Coremap di kawasan Tambelan antara lain :

Program Coremap yang dimulai kembali pada tahun 2008 dengan kegiatan MPA. Program MPA dilakukan dimana setiap Pokmas mengajukan proposal kegiatan yang ingin dilakukan (*bottom-up*) melalui LPSTK sesuai dengan keinginan masing-masing Pokmas dengan memperhatikan sumber daya lokal. Apabila proposal kegiatan tersebut disetujui selanjutnya akan dibiayai oleh Coremap melalui DKP dengan menandatangani kontrak (*community contract*). Namun demikian program Coremap dalam realita cenderung bersifat *top-down*, dimana setiap pokmas memiliki program yang sama seperti bersifat paket sesuai dengan program dari DKP, misalnya MPA pembuatan kerupuk ikan dan atom (setiap pokmas sama). Selain itu dalam pengelolaannya program tidak diawali dengan kajian yang memadai seperti kajian "analisis ekonomi" terhadap untung-rugi pengelolaan kepiting atau budidaya ikan kerapu (KJT).

Pembentukan Pokmas di kawasan Tambelan dilakukan secara demokratis, namun pemilihan kepengurusannya kurang

memperhatikan dan mempertimbangkan ketrampilan dan kemampuan berusaha anggota pokmas sehingga sering menimbulkan konflik internal pokmas. Salah satu yang sering menimbulkan konflik internal karena kurang mengenal karakter setiap anggota Pokmas. Kepengurusan Pokmas ada kecenderungan idenya berasal dari pengurus LPSTK dan fasilitator sehingga kurang memperhatikan keinginan masyarakat. Masyarakat bersedia membentuk Pokmas karena akan mendapat bantuan modal usaha sesuai yang disampaikan oleh pengurus LPSTK dan penyuluh. Selain apabila timbul masalah didalam melaksanakan kegiatan anggota Pokmas kurang mengetahui tentang sanksi hukumnya terhadap anggota yang melanggar.

Anggaran untuk kegiatan Pokmas pada tahun 2009 sudah dibagikan oleh Coremap melalui DKP yang meliputi Pokmas budi daya ikan kerapu dengan KJT (Keramba Jaring Tancap), Pokmas Jender dengan program pembuatan kerupuk ikan dan atom, pengolahan kepiting bakau, perbengkelan perbaikan mesin perahu (pompong) dan pokmas konservasi berupa pompong. Kegiatan pokmas untuk MPA masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala sehingga belum menghasilkan keuntungan yang memadai. Budi daya ikan kerapu (KJT) untuk panen dan menghasilkan keuntungan masih memerlukan waktu lama sekitar 10-12 bulan, bibit banyak yang mati sekitar 30 persen. Pokmas jender mengalami kesulitan bahan baku (ikan tengiri), harga mahal sehingga keuntungan relative sedikit. Begitu pula pokmas pengolahan kepiting juga mengalami kesulitan bahan baku sehingga produksinya tidak berkesinambungan, sementara pasar kepiting cukup bagus dan dapat menghasilkan keuntungan yang memadai. Sementara hambatan yang dialami pokmas perbengkelan seringkali nelayan menunda ongkos (hutang) perbaikan mesin kapal (pompong) sehingga belum memperoleh keuntungan, hanya cukup untuk membayar pekerja, sementara kegiatan ini memiliki prospek ke depan yang cukup baik. Pokmaswas, meskipun sudah diberi perahu (pompong)

tidak dapat melaksanakan pengawasan karena perahu tidak dapat digunakan untuk melakukan pengawasan karena masalah teknis tidak sesuai dengan karakter laut, bahan bakarnya bensin sulit diperoleh. Sementara itu pengawasan yang dilakukan oleh UPTD Perikanan Kecamatan Tambelan tidak berjalan secara optimal dengan alasan yang tidak jelas.

Koordinasi dan pengelolaan organisasi LPSTK dan Pokmas juga mengalami permasalahan antara lain adanya konflik antar anggota dan pengurus yang menimbulkan disharmoni dalam organisasi. Kendala lain dalam pengembangan organisasi adalah terbatasnya SDM yang mampu mengelola organisasi. Masyarakat pesisir, khususnya nelayan secara budaya tidak terbiasa bekerja secara berkelompok, mereka pada umumnya bekerja secara individual (mandiri). Kegiatan berkelompok merupakan budaya baru dan tidak mudah untuk diikuti karena bekerja secara berkelompok memerlukan saling tenggang rasa, toleransi, keterbukaan dan disiplin. Meskipun mereka bekerja bersama, sering timbul konflik diantara mereka karena adanya konflik kepentingan dan kurang disiplin dalam bekerja bersama dalam organisasi (pokmas), seperti contoh anggota LPSTK atau Pokmas mengundurkan diri karena bekerja (melaut) untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga.

Pelaksanaan kegiatan, terutama pemberian bantuan fisik seperti perahu, peralatan pondok informasi dan peralatan pokmas yang dilakukan dengan cara ditenderkan, tidak dapat menjamin kualitas barang dan tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, termasuk LPSTK dan Pokmas. Rendahnya kualitas bantuan barang menyebabkan barang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, seperti bantuan perahu tidak dapat digunakan karena konstruksi perahu tidak sesuai dengan kondisi laut kawasan Tambelan. Pembangunan Pondok Informasi Desa Kampung Hilir yang lokasi jauh dari laut sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat maupun pokmas. Selain itu

pemberian bantuan untuk komunikasi seperti televisi, mesin ketik dan genset tidak dapat dimanfaatkan oleh LPSTK karena kualitasnya rendah dan pada saat diterima sudah dalam kondisi rusak.

Pendampingan oleh Fasilitator dan Penyuluh yang sering tidak berada di lokasi desa binaan menjadi hambatan tersendiri dalam pengembangan pokmas, khususnya budi daya ikan kerapu. Sementara ketua Pokmas dan LPSTK kurang menguasai teknologi yang dibutuhkan dalam budi daya ikan kerapu dengan teknik KJT, meskipun ada beberapa anggota pokmas yang berpengalaman pembesaran ikan dengan sistem keramba jaring apung, tetapi tidak mampu membantu secara memadai. Hal ini karena ada perbedaan pengelolaan budi daya ikan kerapu dengan bibit buatan dan pembesaran ikan kerapu dengan bibit alam. Hal ini selain jarang nya penyuluh berada di lokasi juga rendahnya SDM dalam penguasaan iptek dan kurang seriusnya dalam mengelola pokmas. Kegiatan pokmas dengan berbagai program MPA merupakan hal baru bagi nelayan dan umumnya belum pernah mereka lakukan kecuali kegiatan membuat ikan asin dan kerupuk ikan secara sederhana.

Praktek perusakan ekosistem terumbu karang 2005-2009 dengan menggunakan bom dan potassium sudah mengalami penurunan yang cukup tajam, meskipun masih terdapat praktek penangkapan ikan dengan bom dan potassium, terutama nelayan dari luar kawasan Tambelan seperti dari Kalimantan, pulau Natuna, sementara nelayan dari Jawa (Pekalongan, Jakarta) banyak menggunakan alat tangkap trawl, yang dapat merusak ekosistem terumbu karang. Praktek penggunaan bom dan potassium sulit dicegah karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.

Pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap Coremap, terutama untuk menyelamatkan terumbu karang cukup tinggi. Pengetahuan ini telah berdampak pada berkurangnya intensitas

pengeboman dan penggunaan potassium untuk menangkap ikan di laut.

Dampak kegiatan Cotemap sampai tahun 2009 terhadap pendapatan dan perekonomian masyarakat di kawasan Tambelan secara umum belum memperlihatkan tingkat kesejahteraan. Meskipun demikian dalam kurun waktu lima tahun telah terjadi peningkatan pendapatan rumah tangga sebesar 6.37 persen. Peningkatan pendapatan tersebut karena ada beberapa faktor, diantaranya rumah tangga tersebut memperoleh penghasilan dari kegiatan proyek P3DK dan PNPM Mandiri, dan kemungkinan memperoleh penghasilan dari penuaian hasil pertanian. Sementara itu pendapatan rumah tangga nelayan tahun 2009 memperlihatkan kenaikan sekitar 10 persen dibandingkan tahun 2005. Kenaikan pendapatan nelayan kemungkinan karena nelayan memiliki teknologi penangkapan ikan yang lebih baik, memiliki perahu motor kapasitas lebih besar (12-18 PK), menggunakan GPS dan wilayah tangkap yang lebih luas. Kenaikan pendapatan tersebut kemungkinan bukan dari kegiatan Coremap, karena program MPA dari Pokmas baru mulai berjalan bulan Februari 2009 dan belum menghasilkan keuntungan, bahkan ada Pokmas tidak berjalan karena konflik internal.

Apabila melihat pendapatan rumah tangga nelayan menurut musim memperlihatkan adanya rata-rata kenaikan yang cukup baik pada tahun 2009, terutama pada musim banyak ikan. Begitu pula pada saat gelombang kuat memperlihatkan kenaikan yang cukup tinggi. Sementara itu pendapatan anggota pokmas dibandingkan dengan non anggota pokmas menunjukkan bahwa pendapatan anggota non pokmas lebih tinggi dibandingkan dengan anggota pokmas. Hal itu karena kegiatan MPA pokmas belum berjalan karena adanya berbagai hambatan teknis dan adanya konflik internal pokmas.

Meskipun masyarakat kawasan Tambelan belum menunjukkan tingkat kesejahteraan dengan adanya kegiatan Coremap, namun

secara umum telah mengalami kemajuan yang cukup pesat tahun 2009 dibandingkan dengan tahun 2005, hal tersebut terlihat dengan semakin banyaknya pembangunan fisik baik yang didanai program Coremap maupun diluar Coremap seperti P3D dan PNPM Mandiri.

Bertolak dari temuan penelitian dan evaluasi kegiatan Coremap tersebut, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan antara lain :

- Pelaksanaan kegiatan Coremap perlu peningkatan kualitas manajemen pengelolaan dan persiapan program (KJT, perbengkelan, pengelolaan kepiting) lebih matang dengan melakukan studi kelayakan dengan melibatkan beberapa disiplin ilmu.
- Setiap pelaksanaan program kegiatan harus dilakukan dengan membuat proyek percontohan, khususnya budi daya ikan kerapu, karena program tersebut memerlukan tingkat keahlian dan pengalaman. Hal itu diperlukan karena keterbatasan SDM local sehingga perlu mendatangkan tenaga ahli dari luar untuk transfer pengetahuan.
- Untuk mengefektifkan kegiatan Pokmaswas dalam menjalankan kegiatan pengawasan perlu disediakan kapal beserta peralatan kerja yang sesuai dengan kondisi perairan setempat. Pembentukan Pokmas budi daya ikan (KJT) dalam memilih anggota harus lebih selektif mengingat adanya perbedaan pola melaut nelayan, ada yang melakukan penangkapan ikan di laut lepas dan waktu lama, tetapi ada nelayan yang melakukan penangkapan ikan di sekitar pantai dan pulang hari.
- Perlunya penguatan kelembagaan menyangkut kemampuan manajerial jajaran pengurus LPSTK dan Pokmas. Hal ini penting karena kegiatan Coremap bertumpu pada kegiatan kelompok dan rendahnya

kemampuan berorganisasi serta peningkatan ketrampilan dalam penguasaan teknologi sesuai program Coremap. Selain itu perlu meningkatkan kemampuan SDM aparat pelaksana, transparansi manajemen keuangan sebagai upaya untuk menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan yang didanai Coremap.

- Mekanisme pelaksanaan penyaluran dana harus lebih transparan untuk menghindari kebororan dan saling curiga serta ketidakpercayaan. Selain itu perlu adanya sanksi yang tegas apabila terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang.
- Kekurangpahaman manfaat dan cara memanfaatkan terumbu karang akan berpengaruh terhadap perilaku masyarakat dalam melestarikan terumbu karang. Oleh karena itu sosialisasi yang dilakukan oleh Coremap harus tetap dilaksanakan secara berkesinambungan, meskipun sebagian besar masyarakat nelayan sudah mengetahui kegiatan Coremap tersebut.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Hal iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	5
1.3. Metodologi	6
1.4. Gambaran Lokasi	8
BAB II PENGELOLAAN COREMAP DAN IMPLEMENTASINYA : Tingkat Kabupaten dan Desa	17
2.1. Pelaksanaan Coremap	17
2.1.1. Pelaksanaan Coremap Tingkat Kabupaten	17
2.1.2. Pelaksanaan Coremap Tingkat Desa	21
2.2. Pembentukan, Kinerja dan Kegiatan LPSTK	23
2.3. Pembentukan, Kinerja dan Kegiatan Pokmas	24
2.4. Kegiatan Sosialisasi	29
2.4.1. Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	29
2.4.2. Kegiatan Fisik	58
2.4.3. Kegiatan Konservasi	62
2.4.4. Hambatan dan Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan	66

BAB III Pengetahuan dan Partisipasi masyarakat terhadap kegiatan Coremap	71
3.1. Pengetahuan Masyarakat	71
3.2. Partisipasi Masyarakat	75
3.3. Program Kegiatan Pemanfaatan Sumber Daya Laut	80
BAB IV PERUBAHAN PENDAPATAN	83
4.1. Pendapatan Penduduk	84
4.1.1. Pendatapan Rumah Tangga Nelayan dan Non Nelayan	87
4.1.2. Pendapatan Rumah Tangga Nelayan Menurut Musim	91
4.1.3. Pendapatan Anggota Kelompok Masyarakat (POKMAS)	97
4.2. Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan	100
4.2.1. Keberadaan Coremap dan Program Pemerintah lain	100
4.2.2. Faktor Internal	102
4.2.3. Faktor Eksternal	104
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	107
5.1. Kesimpulan	107
5.2. Rekomendasi.	108
DAFTAR PUSTAKA	111
SUMBER INFORMASI	114

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

	Hal
Gambar 1. Hutan Mangrove di Pulau Tambelan	10
Tabel 1.2. Persentase Penduduk Pulau Tambelan Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2009	12
Tabel 2.1. Pelaksanaan Kegiatan Pokmas Program OREMAP II (MPA) di Kawasan Pulau Tambelan Kondisi dan Permasalahan Tahun 2008/2009	61
Tabel 3.1. Pengetahuan Masyarakat Terhadap Program Kegiatan COREMAP 2009	66
Tabel 3.2. Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan COREMAP	68
Tabel 3.3. Manfaat Kegiatan COREMAP	70
Tabel 4.1. Rata-rata pendapatan Rumah tangga dan per kapita kawasan Tambelan 2005 dan 2009.	76
Tabel 4.2. Rata-rata pendapatan rumah tangga nelayan dan non nelayan tahun 2005 dan 2009.	78
Tabel 4.3. Persentase Pendapatan Rumahtangga tahun 2005-2009	81
Tabel 4.4. Pendapatan Rumah Tangga nelayan menurut gelombang tahun 2005 dan 2009.	84

Tabel 4.5.	Persentase Pendapatan Rumah Tangga nelayan per bulan menurut gelombang tahun 2005 dan 2009.	85
Tabel 4.6.	Rata-rata dan per Kapita Pendapatan Anggota Pokmas Kawasan Tambelan 2009	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam sepuluh tahun terakhir sumber daya laut di Indonesia, khususnya kawasan pantai sebagai (pusat) pertumbuhan ekonomi dan daerah (wilayah) yang mempunyai jumlah penduduk dan tingkat kepadatan tinggi, pada umumnya telah mengalami kerusakan (*degradasi*) yang cukup parah. Kawasan terumbu karang dan hutan *mangrove* di berbagai kawasan (pantai) dan pesisir Indonesia banyak yang mengalami kerusakan dan dikonversi menjadi permukiman, kawasan industri dan untuk kepentingan pembangunan, tanpa adanya kontrol dari pemerintah maupun masyarakat.

Data yang ada menunjukkan bahwa sekitar 10 persen terumbu karang dunia diperkirakan dalam keadaan rusak (1997). Terumbu karang di Indonesia kondisinya juga tidak jauh berbeda, bahkan lebih mengkhawatirkan, karena tingkat kerusakannya yang begitu parah. Hasil studi P3O-LIPI (1997) menunjukkan bahwa hanya sekitar 6% terumbu karang di Indonesia yang kondisinya bagus, 54% dalam keadaan sedang, dan 40 % kondisinya sangat buruk.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki sekitar 17.508 pulau besar dan kecil, dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 81 ribu km, yang 63 % diantaranya merupakan wilayah perairan. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila Indonesia menjadi pusat keberadaan keanekaragaman hayati, termasuk terumbu karang. Diperkirakan luas terumbu karang di Indonesia sekitar 75.000 km² atau 14 % dari luas terumbu karang dunia.

Secara ekologis, terumbu karang mempunyai peranan penting untuk kelangsungan sumberdaya laut dan ekosistem lainnya. Ekosistem

terumbu karang pada umumnya berada pada lingkungan perairan yang agak dangkal, seperti paparan benua dan gugusan pulau-pulau di perairan tropis dengan keanekaragaman jenis yang tinggi. Terumbu karang untuk mencapai pertumbuhan yang maksimum memerlukan perairan yang jernih, dengan suhu perairan yang hangat, gerakan gelombang yang besar, sirkulasi air yang lancar dan terhindar dari proses sedimentasi (Dahuri 1996 : 185). Pada ekosistem ini dijumpai berbagai jenis hewan dan biota laut yang hidup secara berdampingan.

Selain ekosistem bakau (*mangrove*) dan padang lamun (*sea grass*), terumbu karang merupakan ekosistem penting di wilayah pantai dan pesisir. Secara alami ekosistem terumbu karang dapat melindungi pantai dan pesisir dari abrasi dan gelombang air laut. Dengan adanya karang yang menyebar di sepanjang pantai, gelombang akan memecah pada saat sampai di pantai, sehingga energi yang dikeluarkan gelombang tersebut semakin kecil.

Terumbu karang tidak hanya berkaitan dengan ekosistem laut, pantai dan pesisir, tetapi juga dapat berfungsi sebagai penunjang produksi perikanan (tempat pemijahan ikan dan udang), sumber makanan dan sebagai bahan baku industri (kosmetika). Selain itu, terumbu karang juga mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia dan pembangunan yang berkelanjutan. Karang mati banyak diambil dan dimanfaatkan oleh masyarakat, dapat digunakan sebagai bahan baku bangunan rumah, untuk hiasan (suvenir) dan bahan baku industri kosmetik. Terumbu karang dengan keindahannya juga dapat ditawarkan menjadi obyek wisata alam (eko wisata), yang dapat menarik wisatawan domestik/mancanegara untuk mengunjungi kawasan (wilayah) tersebut.

Dalam dasawarsa terakhir ini kondisi terumbu karang Indonesia mengalami tingkat kerusakan yang mengkhawatirkan karena adanya berbagai tekanan dan ancaman baik alam maupun akrobat kegiatan manusia. Secara alami kerusakan terumbu karang disebabkan oleh adanya badai dan pemangsaan predator, misalnya kerusakan terumbu karang oleh bintang laut pemakan karang (Dahuri 1996), sehingga dapat menghilangkan fungsi pelindung yang selanjutnya akan mengancam

kerusakan wilayah pantai. Kerusakan alami dapat juga disebabkan oleh perubahan suhu perairan, dengan terjadinya penurunan suhu akibat pencampuran massa air yang lebih dingin. Sedangkan kerusakan terumbu karang yang disebabkan oleh manusia menurut Dahuri (1996), antara lain penangkapan ikan dan biota laut yang merusak antara lain dengan (1) menggunakan bahan peledak (bom), sianida dan potasium, dan penggunaan alat tangkap yang merusak dan tidak ramah lingkungan (trawl dan muroami), (2) eksploitasi yang berlebihan terhadap terumbu karang untuk berbagai kepentingan seperti batu permata, cinderamata (hiasan) dan bahan baku fondasi bangunan rumah dan (3) penancangan jangkar kapal nelayan dan wisatawan. Selanjutnya, menurut Dahuri (1996) kerusakan terumbu karang juga disebabkan (1) adanya siltasi dan sedimentasi akibat pengerukan, penimbunan pantai untuk konstruksi pembangunan infrastruktur (umum/pemerintah) dan bangunan komersial (hotel) di wilayah pesisir dan pantai yang tidak terkendali (2) penurunan kualitas air akibat pencemaran limbah minyak, industri dan limbah domestik. Penebangan hutan bakau dan tumbuhan lain di sepanjang wilayah pantai, pesisir akan berdampak terhadap pelumpuran di kawasan terumbu karang (pantai), yang selanjutnya dapat mematikan ekosistem terumbu karang.

Menyikapi kerusakan terumbu karang, pemerintah Indonesia membuat program yang berkaitan dengan pengelolaan terumbu karang, yang disebut *Coremap (Coral Reef Management and Program)*. Adapun tujuan program secara umum (nasional) adalah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, agar sumberdaya laut tersebut dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat (lokal).

Kegiatan *Coremap* pada dasarnya berorientasi pada pengelolaan dan pemanfaatan terumbu karang secara berkelanjutan dengan adanya partisipasi aktif masyarakat, dengan pengelolaan berbasis masyarakat (*Community Base Management*). Pengelolaan seperti di atas memerlukan partisipasi aktif masyarakat, sehingga dalam praktik pengelolaan dapat

dilakukan secara terpadu, dimana mulai perumusan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dilakukan pendekatan dari bawah (*bottom up*) dengan melibatkan berbagai *stakeholders* yang terlibat dalam pemanfaatan dan pengelolaan terumbu karang berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Mengingat masyarakat di sekitar kawasan terumbu karang merupakan masyarakat yang mempunyai kepentingan dalam pemanfaatannya, sehingga kegiatan *Coremap* difokuskan pada masyarakat setempat (lokal), dengan membangun dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penyelamatan terumbu karang sebagai tempat hidup berbagai biota laut (pemijahan ikan dan udang), sumber bahan baku industri kosmetik dan komoditas perdagangan. Selain itu, kegiatan *Coremap* adalah mengembangkan mata pencaharian alternatif yang dapat dikembangkan masyarakat sehingga diharapkan mampu mengurangi tekanan kegiatan manusia (yang dapat merusak) ekosistem terumbu karang.

Untuk menunjang kegiatan *Coremap*, terutama untuk merancang jenis intervensi yang cocok untuk masyarakat, diperlukan data dan informasi yang berkaitan dengan keadaan sumberdaya laut, wilayah pengelolaan, teknologi penangkapan, pengetahuan dan partisipasi masyarakat program terhadap terumbu karang dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan terumbu karang. Selain itu, juga diuraikan kinerja kelembagaan *Coremap* dan hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut, khususnya terumbu karang. Selanjutnya juga akan dilihat perubahan tingkat pendapatan masyarakat setelah adanya kegiatan *Coremap* dan faktor-faktor yang mempengaruhi.

Kecamatan Tambelan merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Bintan, yang dipilih menjadi lokasi kegiatan *Coremap*, selain desa Mapur, Kecamatan Bintan Timur.

Penulisan studi ini bertujuan (1) mendeskripsikan kondisi potensi sumberdaya alam (sumber daya laut dan darat), sarana dan prasarana

serta kelembagaan Coremap. (2) mendeskripsikan kinerja kelembagaan yang dibentuk Coremap (LPSTK, Pokmas). (3) mendiskripsikan pengetahuan dan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan Coremap (4) melihat perubahan pendapatan masyarakat dan (5) melihat pendapatan alternative untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

1.2. TUJUAN

Untuk dapat memberi masukan terhadap arah implementasi maupun kegiatan yang sedang berjalan program Coremap diperlukan data empirik sosial ekonomi termasuk pendapatan dengan melakukan penelitian. Penelitian ini untuk mengumpulkan data dasar tentang pendapatan dan perubahan pendapatan. Selain itu juga melihat pengetahuan dan partisipasi masyarakat tentang implementasi program Coremap di desa (lokasi) sejak tahun 2005-2009. Oleh karena itu tujuan umum adalah mengkaji pelaksanaan kegiatan Coremap di daerah dan mengumpulkan informasi tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya tingkat pendapatan masyarakat. Hal itu untuk memantau dampak kegiatan Coremap terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan lebih khusus penelitian ini adalah :

- Mengidentifikasi permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan Coremap di tingkat kabupaten dan lokasi (desa).
- Mengkaji pengetahuan dan pemahaman masyarakat berkaitan dengan kegiatan Coremap.
- Menggambarkan tingkat pendapatan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi.
- Mengevaluasi dan memantau dampak kegiatan Coremap terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

1.3. METODOLOGI

Lokasi Studi

Lokasi Studi (penelitian) terdiri dari 3 desa dan satu kelurahan di Pulau Tambelan, Kecamatan Tambelan yang sebelumnya telah menjadi lokasi penelitian T0 (baseline). Pemilihan lokasi kegiatan *Coremap* didasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain *pertama* wilayah lautnya yang cukup luas sebagai daerah tangkapan ikan (*ground fishing*), *kedua*, lokasinya dekat dengan situs terumbu karang, sehingga masyarakatnya dapat dilibatkan dalam kegiatan pengelolaan terumbu karang (*Coremap*), *ketiga*, sebagian besar lokasi desa Kecamatan Tambelan berada di Pulau Tambelan,¹ *keempat*, memiliki aksesibilitas (transportasi) lebih mudah, *kelima*, mayoritas penduduk mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan. Pulau Tambelan memiliki 8 desa (enam desa lama, 2 desa baru hasil pemekaran). Lokasi *Coremap* meliputi empat desa/kelurahan, diperlakukan sebagai *satu kesatuan wilayah*, DPL dan karena wilayah penangkapan ikan (*fishing ground*) penduduk sama di wilayah kecamatan Tambelan.

Pengumpulan data

Studi ini untuk mengumpulkan data dan informasi menggunakan dua pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Kedua pendekatan ini dilakukan secara bersamaan agar supaya dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang permasalahan yang ada, terutama mengenai kondisi sosial ekonomi (pendapatan), khususnya pendapatan dan mata pencaharian alternatif serta pengetahuan dan persepsi masyarakat terhadap pengelolaan dan pemanfaatan terumbu karang.

Data yang dikumpulkan dalam studi ini merupakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui survei dengan menyebarkan

¹ Kecamatan Tambelan terdiri dari delapan desa. Enam desa berada di Pulau Tambelan, yaitu Desa Sekuni, Kampung Hilir, Kampung Melayu dan Batu Lepuk, Kukup dan Desa Pulau Pengikik (2008). Sedangkan dua desa yang lain berada di dua pulau yang terpisah, yaitu Desa Pulau Pinang dan Pulau Mentebung.

kuesioner berisi dua kelompok informasi, kelompok pertama tentang pendapatan rumah tangga, kelompok kedua mengenai pengetahuan dan sikap responden yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan terumbu karang. Sedangkan data kualitatif diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan nara sumber, dan wawancara terfokus (FGD) antara lain dengan : nelayan, *tauke* (pedagang pengumpul), tokoh masyarakat, dan kepala desa. Data kualitatif ini dimaksudkan untuk menggali dan melengkapi informasi dalam kuesioner yang lebih mendalam yang menyangkut kondisi kehidupan masyarakat Pulau Tambelan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut, terutama terumbu karang. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui berbagai publikasi (buku, jurnal, hasil penelitian) yang berkaitan dengan sumber daya laut, mangrove, terumbu karang, kenelayanan dan yang berkaitan dengan penggunaan alat tangkap.

Responden dalam penelitian ini adalah rumah tangga di empat desa yang telah menjadi responden pada studi sebelumnya (baseline) tahun 2005. Jumlah responden yang menjadi obyek penelitian pada tahun 2009 sebanyak 120 (tahun 2005 100 responden). Penambahan rumah tangga responden baru sebanyak 20 rumah tangga untuk memenuhi yang salah satu anggotanya menjadi anggota pokmas UEP (jender).

Analisis dalam penulisan ini dengan distribusi frekuensi dan tabulasi silang (*cross tabulation*). Analisis tabulasi silang dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan antara variabel yang diteliti. Semua analisis dilakukan dengan menggunakan fasilitas SPSS seri 10. Sedangkan data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara mendalam, FGD dianalisa dengan menggunakan *content analysis*. Semua informasi yang diperoleh dari nara sumber dan informan dideskripsikan, untuk menjelaskan dan memberi nuansa terhadap temuan-temuan yang penting.

1.4. GAMBARAN LOKASI

Keadaan Geografis

Kecamatan Tambelan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bintan, dan merupakan kecamatan yang letaknya paling jauh dari ibukota Kabupaten. Kecamatan ini terletak di Laut China Selatan, dan berada diantara Propinsi Kepulauan Riau dengan Kalimantan Barat. Kecamatan Tambelan terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil yang berjumlah 54 buah dan hanya enam pulau yang berpenduduk, yaitu pulau Mandra, Wie, Genting, Menggirang, Pinang dan pulau Mantebung. (Kecamatan Tambelan Dalam Angka 2003, 2008). Secara geografis terletak pada posisi N 00.99463 dan E 107. 56288.

Kecamatan Tambelan secara administratif terdiri dari tujuh desa dan satu Kelurahan. Empat desa/Kelurahan terletak di P. Tambelan yaitu desa Kampung Hilir, desa Kampung Melayu, desa Batu Lepuk, desa Kukup dan desa Pengikik (hasil pemekaran desa tahun 2008) serta Kelurahan Teluk Sekuni. Sedangkan dua desa lainnya berada di Pulau Pinang dan pulau Mentebung. Luas Kecamatan Tambelan secara keseluruhan mencapai sekitar 23.665,42 Km², terdiri dari 169,42 Km² daratan dan 23,496 Km persegi berupa lautan.

Secara umum Wilayah Kecamatan Tambelan dipengaruhi dua musim, yaitu musim penghujan pada bulan September – Februari dengan suhu rata-rata 27 derajat Celsius, dan musim kemarau pada bulan Maret - Agustus dengan suhu rata-rata 32 derajat Celsius. Keberadaan ikan dan kegiatan kenelayanan, musim yang dapat dikelompokkan dalam empat musim angin yaitu musim utara, musim selatan, musim barat dan musim timur.

Musim angin utara ditandai dengan angin yang berhembus kencang yang diikuti dengan gelombang yang cukup besar dan berlangsung antara bulan Desember- Februari. Pada musim angin ini hanya sebagian nelayan pergi melaut karena pada saat musim angin tersebut banyak ikan tenggiri yang dapat ditangkap oleh nelayan. Musim angin selatan

berlangsung dari bulan September-Nopember, merupakan musim pancaroba. Pada musim angin ini masih banyak nelayan yang pergi melaut karena masih terdapat beberapa jenis ikan yang masih diperoleh. Berbeda dengan musim angin barat yang ditandai dengan adanya angin kencang yang berlangsung mulai bulan Nopember-Desember (sampai pertengahan Januari). Pada musim ini banyak nelayan yang tidak pergi melaut, karena gelombang laut sangat tinggi dan membahayakan jiwanya. Musim angin timur ditandai dengan gelombang (ombak) laut yang tenang, berlangsung pada bulan Maret - Mei sampai pertengahan Juni. Pada musim angin timur ini banyak nelayan yang pergi melaut, karena pada musim ini berbagai jenis ikan dapat ditangkap dengan menggunakan berbagai jenis alat tangkap yang dimiliki nelayan.

Potensi Sumberdaya Alam

Kecamatan Tambelan secara umum memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, meliputi sumber daya laut dan darat. Potensi sumber daya darat berupa potensi sumber daya pertanian berupa perkebunan yang terdiri dari tanaman cengkeh, lada dan kelapa, sayuran dan buah-buahan serta umbi-umbian. Selain perkebunan kawasan ini juga mempunyai sumber daya hutan yang cukup besar. Hutan yang ada di wilayah ini merupakan hutan sekunder yang tumbuhannya berupa jenis kayu lokal, yang disebut kayu "*medang merawas*". Jenis kayu *medang merawas* diambil papannya dimanfaatkan untuk membuat dinding rumah tempat tinggal dan tiang penyangga rumah. Selain itu, jenis kayu ini banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan perahu (*pompong*).

Sesuai dengan kondisi geografis Pulau Tambelan, selain memiliki potensi sumber daya darat, kawasan ini memiliki potensi sumber daya laut yang sangat luar biasa besar. Pulau Tambelan dan pulau-pulau disekitarnya memiliki potensi sumber daya laut (perikanan) yang sangat besar, baik jenis ikan dasar (*demersal*) maupun ikan permukaan (*palagis*). Sumber daya perikanan merupakan sumber pendapatan utama masyarakat, hal itu karena hampir 90% masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai

nelayan. Potensi sumber daya laut lainnya yang terdapat di sekitar perairan kawasan Tambelan adalah terumbu karang, hutan *mangrove*, berbagai jenis ikan laut dan biota laut lainnya (penyu). Sehingga kawasan tersebut memiliki potensi perikanan tangkap. Jenis ikan Indonesia sebagian terdapat di kawasan ini antara lain :

Jenis ikan Kerapu, Kakap, Tuna, Hiu, Tongkol, Sotong, Cumi, Penyu, Pari, Kembung, Lemuru, Kepiting, Teri dan berbagai jenis ikan lainnya.

Beberapa jenis ikan laut menjadi komoditas ekspor andalan dan dikirim ke luar daerah. Ikan laut yang diekspor antara lain jenis kerapu tiger dan napoleon, sementara jenis ikan kakap, tenggiri cumi, tongkol, tuna untuk konsumsi domestik. Sedangkan ikan kembung dibuat ikan asin untuk dikirim ke Pontianak atau Tanjung Pinang. Kecamatan Tambelan juga memiliki potensi kepiting (ketam) yang dagingnya dikelola oleh pokmas yang penjualannya di bawa ke Medan melalui Tanjung Pinang. Harga kepiting (ketam) di Tambelan rata-rata Rp. 110.000,- Harga kepiting tersebut sebenarnya masih dapat lebih tinggi, tetapi saat ini harga ditentukan oleh DKP Kabupaten Bintan. Potensi sumber daya laut lain yang memiliki potensi cukup besar adalah penyu hijau dan penyu sisik. Kedua jenis penyu tersebut saat ini sudah dapat ditangkarkan yang lokasinya di pulau Wie.

Terumbu karang (*Coral Reefs*) merupakan ekosistem yang sangat khas, dan pada umumnya terdapat di daerah tropis. Kecamatan Tambelan memiliki area terumbu karang yang sangat luas yang tersebar hampir di semua pulau yang menyebar secara merata antara lain di P. Tambelan dan pulau-pulau sekitarnya seperti P. Benua, P. Buring, P. Selintang, P. Bungin dan P. Wie. Terumbu karang memiliki peranan penting dalam perkembang-biakan ikan dan biota laut lain, sebagai tempat pemijahan ikan, melindungi ekosistem pesisir dan laut dari abrasi akibat tekanan gelombang dan badai.

Kondisi terumbu karang hidup di wilayah Tambelan kondisinya 34,07 %, termasuk kategori sedang, artinya kondisi terumbu karang dalam keadaan sedang. Keberadaan terumbu karang di sekitar P. Tambelan

mengakibatkan kawasan ini potensial untuk mencari ikan karang dan udang (*lobster*). Beberapa jenis ikan yang terdapat di sekitar pulau-pulau tersebut (wilayah tangkapan) antara lain adalah: ikan kerapu, kakap merah, tengiri, ikan napoleon, dan beberapa jenis ikan permukaan seperti ikan *lebam* (baronang), selar, ekor kuning dan ikan lengko.

Selain terumbu karang, di kawasan Tambelan, terdapat hutan mangrove yang cukup luas dan kondisinya masih cukup baik, terutama yang lokasinya di pintu masuk Teluk Tambelan. Selain di Pulau Tambelan hutan *mangrove* juga banyak tumbuh dan berkembang di Pulau Wie, Mentebung, pulau Bungin, Selintang dan pulau Benua. *Mangrove* yang tumbuh dan berkembang di kawasan ini umumnya adalah bakau jenis api-api (*bruguera*). Hutan *mangrove* mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai tempat pemijahan ikan dan udang, dan sebagai penahan erosi pantai dari gelombang dan abrasi air laut.

Gambar 1 : Hutan Mangrove di Pulau Tambelan



Sarana dan Prasarana yang terkait dengan pengelolaan SDL

Ketersediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam bagi nelayan sangat penting. Dengan tersedianya sarana dan prasarana akan dapat memacu usaha nelayan untuk melaut sehingga dapat meningkatkan hasil tangkapan yang selanjutnya meningkatkan pendapatan. Sarana dan prasarana yang tersedia terkait dengan kegiatan Coremap diantaranya adalah tersedianya kapal (pompong) di setiap desa obyek kegiatan Coremap dan sumber daya manusia. Kapal tersebut dapat dipergunakan oleh nelayan untuk melakukan pengawasan terhadap kawasan konservasi atau daerah pengelolaan laut (DPL). Kawasan tersebut berupa lokasi terumbu karang yang dilindungi untuk dijadikan DPL agar supaya dapat kembali seperti semula sehingga dapat menjadi tempat pemijahan ikan. Namun demikian sarana (kapal) tersebut saat ini belum dapat dipergunakan secara optimal karena adanya berbagai kendala teknis terhadap kapal. Adapun kendala itu diantaranya langka dan mahalnya bahan bakar bensin, konstruksi kapal tidak sesuai dengan kondisi perairan, gelombang besar dan apabila digunakan untuk melaut, air masuk ke lambung kapal, masyarakat tidak terbiasa menggunakan perahu motor tempel, biasanya masyarakat menggunakan mesin dalam (pompong).

Prasarana lain yang tersedia adalah TPI (tempat pelelangan ikan), tetapi TPI tersebut tidak dapat dipergunakan karena konstruksi bangunan miring sehingga dapat membahayakan keselamatan nelayan yang sewaktu-waktu dapat roboh pada saat transaksi lelang ikan. Oleh karena itu nelayan melakukan transaksi di camp milik para tauke yang lokasinya di sekitar teluk Tambelan.

Selanjutnya untuk melayani penduduk yang akan bepergian menggunakan kapal laut, di P. Tambelan terdapat satu dermaga yang cukup besar, sebagai tempat sandar kapal penumpang (kapal perintis). Dermaga ini selain digunakan untuk menurunkan/menaikkan penumpang, juga digunakan sebagai tempat bersandarnya kapal patroli milik Polri (Polisi Sektor Tambelan). Selain juga terdapat dermaga

khusus TNI – AL untuk menyandarkan kapal patrolinya yang lokasinya sekitar 500 meter dari dermaga yang pertama.

Kependudukan

Jumlah penduduk Pulau Tambelan pada tahun 2005 (dari monografi desa) mencapai 4.447 jiwa, terdiri dari laki-laki 2.317 jiwa, dan perempuan 2.130 jiwa. Selanjutnya pada tahun 2009 jumlah penduduk mengalami peningkatan menjadi 5.066 jiwa yang terdiri dari 2.571 laki-laki dan 2.495 perempuan. Kenaikan jumlah penduduk di kawasan Tambelan disebabkan kelahiran, karena migrasi (masuk) ke wilayah tersebut relatif kecil, sementara migrasi keluar cukup tinggi, terutama melanjutkan pendidikan dan bekerja.

Struktur umur penduduk di suatu wilayah dapat digunakan untuk mengetahui apakah di daerah tersebut termasuk dalam struktur penduduk muda, atau telah mencapai struktur penduduk dewasa atau tua. Dengan melihat struktur umur penduduk di Pulau Tambelan pada tahun 2003 dapat dilihat proporsi penduduk usia di bawah 15 tahun dan 15 tahun ke atas.

Tabel 1.2.

Persentase Penduduk Pulau Tambelan
Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2009

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	0-4 tahun	244	248	492
2	5-9	252	267	519
3	10-14	265	262	527
4	15-19	251	230	481
5	20-24	223	233	456
6	25-29	161	157	318
7	30-34	238	134	372
8	35-39	185	176	361
9	40-44	154	152	306
10	45-49	156	155	311
11	50-54	136	183	319
12	55-59	148	140	288
13	60-64	74	81	155
14	65-69	38	43	81
15	70-74	24	18	42
16	75 ke atas	22	16	38
Jumlah %		2.571	2.495	5.066

Sumber : Kecamatan Tambelan Dalam 2009

Tabel di atas memperlihatkan bahwa proporsi penduduk berdasarkan kelompok umur Kecamatan Tambelan pada tahun 2009 yang dominan adalah usia 15 tahun ke atas (usia produktif), yang mencapai sekitar 62 %, sementara penduduk usia di bawah 15 tahun jumlahnya sekitar 38 %. Banyaknya jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas (usia produktif) kemungkinan karena masih banyaknya penduduk yang masih duduk di bangku sekolah dan tenaga kerja produktif.

Dilihat dari jenis kelaminnya, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan cukup berimbang. Sementara itu, penduduk usia sekolah, prosentase

penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Sementara itu, kelompok usia sekolah lanjutan pertama, proporsi jumlah penduduk perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Begitu pula proporsi penduduk kelompok usia produktif (15-34), jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan.

Apabila penduduk dilihat dari etnis, penduduk Kecamatan Tambelan, memiliki beberapa suku bangsa, yaitu: Melayu (sekitar 81 %), Bugis/Buton (sekitar 8 %), Jawa, meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat/Sunda (sekitar 8 %), dan suku bangsa lainnya seperti Madura, Flores, Batak dan China (sekitar 3%). Suku bangsa yang beragam menunjukkan adanya migrasi masuk ke kawasan Tambelan, meskipun jumlahnya relatif kecil.. Adanya migrasi itu karena beberapa faktor antara lain bekerja sebagai nelayan, sebagai anak buah kapal, bekerja pada *tauke* (penampung ikan), dan karena adanya perkawinan dengan orang setempat. Selain migrasi masuk, pada tahun 1970-sampai 2009 penduduk Pulau Tambelan banyak yang migrasi keluar, terutama penduduk usia muda dengan tujuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ke perguruan tinggi dengan kota tujuan Tanjung Pinang, Pekan Baru dan Pontianak.

Secara umum, tingkat pendidikan masyarakat Tambelan relatif lebih baik, hal itu terlihat pada jenjang pendidikan SLTP dan SLTA yang telah ditamatkan (Kecamatan Tambelan Dalam Angka 2009). Untuk mendukung informasi, tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk kecamatan Tambelan, dapat dilihat berdasarkan hasil survei rumah tangga penduduk tahun 2005 (lihat Masyhuri Imron 2005 : 30).

Ketrampilan yang dimiliki penduduk bervariasi, terutama berkaitan dengan keberadaan potensi sumber daya laut. Penduduk, terutama kaum perempuan sejak dulu memiliki ketrampilan mengolah sumber daya laut (ikan) menjadi berbagai jenis makanan, terutama membuat kerupuk ikan dan kerupuk atom. Keahlian yang dimiliki tersebut selain diperoleh secara turun temurun juga dari pelatihan yang dilakukan berbagai organisasi diantaranya dari kegiatan Coremap dan PKK. Selain itu secara

tradisional mereka memiliki kemampuan ketrampilan membuat ikan asin yang diperoleh secara turun temurun. Pelatihan pembuatan kerupuk ikan dilakukan oleh program Coremap (DKP Kabupaten Bintan) yang bertujuan untuk menambah pengetahuan dan teknik pembuatan kerupuk yang lebih baik, hegeinis dan teknik pengepakan.. Teknik pengepakan ini diharapkan kemasan kerupuk lebih menarik minat konsumen sehingga dapat dipasarkan di toko-toko kota. Ketrampilan lain yang dimiliki penduduk antara lain membuat dan merekonstruksi kapal (pompong). Ketrampilan ini diperoleh secara turun temurun dari orang tua dan mendapat pelatihan, terutama membuat konstruksi kapal dari Dinas Perindustrian Provinsi Riau Kepulauan.

Pekerjaan Utama

Pekerjaan utama dan mata pencaharian penduduk/masyarakat di kecamatan Tambelan (Kecamatan dalam angka 2005 dan 2009) menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk 80 persen memiliki pekerjaan sebagai nelayan, sementara sekitar 20 persen memiliki pekerjaan bervariasi (pns, pedagang) dan mengurus rumah tangga. Selanjutnya hasil penelitian pada tahun 2005 (lihat Masyhuri 2005) memperlihatkan pekerjaan utama penduduk sebagian besar bekerja di sektor perikanan laut, sebagai nelayan, yang jumlahnya mencapai 90 persen. Hal itu dapat dipahami karena lingkungan wilayahnya sebagian besar (80%) meliputi perairan laut yang memiliki potensi sumberdaya laut (perikanan) yang sangat melimpah.

BAB II

PENGELOLAAN COREMAP DAN IMPLEMENTASINYA : Tingkat Kabupaten dan Desa

Coremap II merupakan program nasional yang pelaksanaannya dilakukan di tingkat kabupaten dan desa. Pelaksanaan Coremap ini pasti akan menghadapi permasalahan dan hambatan dalam implementasinya. Hal itu berkaitan erat dengan bagaimana pemerintah daerah mensikapi dalam pengelolaan kegiatan baik secara kelembagaan maupun ketersediaan sumber daya manusia. Uraian di bawah ini akan mengkritisi pelaksanaan program tersebut baik pada tingkat kabupaten maupun desa/lokasi pelaksanaan Coremap.

Pembahasan pada bab ini akan difokuskan pada hasil kajian pelaksanaan Coremap II di tingkat Kabupaten Bintan dan tingkat desa.

2.1. PELAKSANAAN COREMAP

2.1.1. Pelaksanaan Coremap Tingkat Kabupaten

Kabupaten Bintan merupakan salah satu lokasi program Coremap di Propinsi Kepulauan Riau yang memperoleh bantuan dana dari Asean Development Bank (ADB). Di Kabupaten Bintan program Coremap II telah dilaksanakan sejak tahun 2005 dan saat ini pelaksanaannya memasuki fase ke dua atau T1 yang implementasinya dimulai tahun 2008. Pelaksanaan Coremap II di Kabupaten Bintan lokasinya di tiga kecamatan, salah satunya di Kecamatan Tambelan.

Coremap II merupakan suatu program yang memiliki kegiatan utama untuk penyelamatan terumbu karang. Program ini secara umum bertujuan untuk melestarikan terumbu karang dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat pesisir, terutama sosial ekonomi dan pendapatan nelayan. Berdasarkan tujuan tersebut, pendekatan yang dilakukan Coremap dalam upaya penyelamatan terumbu karang adalah dengan mengikutsertakan dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kerusakan terumbu karang dari berbagai kegiatan kenelayanan yang tidak bertanggung jawab. Keterlibatan masyarakat secara aktif dikenal dengan konsep pengelolaan berbasis masyarakat.

Pengelolaan Coremap II di tingkat kabupaten dilaksanakan oleh *Project Implementation Unit (PIU)* yang *leading* sektornya pada Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. Struktur organisasi pengelolaan Coremap II di tingkat Kabupaten mengacu pada struktur dan kelengkapan organisasi dengan mengacu pada struktur dan ketentuan di tingkat nasional. Struktur organisasi dan pengelola di tingkat kabupaten (PIU) terdiri dari beberapa komponen antara lain : public awareness (PA) atau kesadaran masyarakat; community base management (CBM) atau pengelolaan berbasis masyarakat; monitoring, controlling and surveillance (MCS) atau pengawasan dan coral reef Information and training centre (CRITC) atau pusat pelatihan dan informasi terumbu karang. Karena terdiri dari beberapa komponen, pengelola di tingkat kabupaten telah melibatkan berbagai instansi yang tugasnya disesuaikan dengan dengan kompetensi masing-masing instansi yang terlibat.

Setelah PIU dan komponen terbentuk untuk berjalannya program Coremap di kabupaten diperlukan pengesahan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati. Terbitnya SK Bupati tersebut untuk memberikan legalitas hukum dan penugasan dalam pengelolaan Coremap dan tanggung jawab kepada institusi yang telah ditunjuk untuk melaksanakan program kegiatan Coremap II pada masing-masing komponen sesuai dengan tugasnya di tingkat kabupaten. Adanya SK Bupati tersebut PIU dengan seluruh komponennya selanjutnya dapat menyusun rencana kerja dan kegiatan tahunan. Menurut nara sumber SK Bupati tentang organisasi pengelolaan Coremap II di Kabupaten Bintan sudah terbit yang diketuai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai PIU. Organisasi Coremap II di kabupaten Bintan ini melibatkan berbagai institusi seperti Bappeda

dan TNI – AL dan beberapa instansi lain yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan sumber daya laut.

Diterbitkannya SK tersebut pelaksanaan dan pengelolaan Coremap II sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan. Selanjutnya semua komponen dalam Coremap II dapat menjalankan tugasnya masing-masing. Sementara itu berkaitan dengan pembiayaan seluruh komponen Coremap II yang bertanggung jawab adalah PIU sebagai KPA (Kuasa Pemegang Anggaran) dan PK (Pemegang Komitmen). Sehingga semua transaksi dan pencairan untuk pembiayaan program Coremap yang dilaksanakan pokmas-pokmas harus melalui PIU dengan membuat kontrak kerja. Sebagai contoh untuk pencairan dana pembuatan Keramba Jaring Tancap (KJT) terlebih dulu dilakukan penandatanganan antara Ketua LPSTK dengan PIU selaku KPA selanjutnya dana dapat dicairkan dan diambil oleh pokmas.

Pelaksanaan Coremap II di Kabupaten Bintan, khususnya di kawasan Tambelan mulai dilaksanakan pada tahun 2005 . Pada tahap awal kegiatan program Coremap II di Kabupaten Bintan (dulu kabupaten Kepulauan Riau) diutamakan pada sosialisasi program kepada masyarakat dan *stakeholder* terkait (aparatur desa) di lokasi desa Coremap. Sosialisasi dilakukan dengan berbagai media antara lain dengan tatap muka, pemasangan poster, kampanye melalui radio, pemasangan *billboard* dan penyebaran *leaflet* dan brosur. Selain sosialisasi juga dilakukan penguatan kelembagaan (organisasi) dengan membentuk LPSTK di masing-masing desa yang menjadi lokasi program Coremap II. Setelah LPSTK terbentuk, selanjutnya pengurus LPSTK bersama dengan aparat desa, motivator desa menyusun Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK) di tingkat desa. Berdasarkan RPTK tersebut, selanjutnya pengurus LPSTK bersama dengan tokoh masyarakat, aparat desa membentuk pokmas-pokmas sesuai dengan kebutuhan. Adapun pokmas di tingkat desa terdiri dari pokmas UEP (unit ekonomi produktif), pokmas gender dan pokmas konservasi. Kegiatan sosialisasi, pembentukan LPSTK, penyusunan RPTK, dan pembentukan pokmas semua difasilitasi

oleh Komite Pengelola Coremap II dari Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kepala Desa.

Pelaksanaan Coremap yang dimulai sejak tahun 2005 mulai mengimplementasikan kegiatan yang berhubungan dengan keberadaan potensi sumber daya laut, pengelolaan berbasis masyarakat (PBM) dan kegiatan pengawasan (MCS). Pelaksanaan pengelolaan yang berbasis masyarakat diawali dengan memberikan pelatihan mata pencaharian alternatif dengan jenis usaha pengolahan ikan seperti pembuatan kerupuk ikan, abon ikan dan bakso ikan. Selain itu dilakukan pelatihan budidaya (pembesaran) ikan kerapu, pengolahan kepiting dan rumput laut. Pelatihan ini melibatkan tenaga ahli dari instant terkait antara DKP pusat dan kabupaten. Peserta pelatihan adalah masing-masing pokmas dengan mengirim dua orang wakil yang dianggap mampu. Setelah pelatihan masing-masing pokmas mendapat bantuan modal usaha dan peralatan kerja (pokmas uep/kerupuk) dan dana untuk pengembangan usaha KJT.

Selain kegiatan pelatihan MPA juga melakukan kegiatan konservasi dengan melakukan pelatihan pengawasan (MCS). Materi pelatihan meliputi pembekalan hukum, cara melapor, menyimpan barang bukti dan menggunakan peralatan kerja dan kegiatan patroli laut. Kegiatan pelatihan pengawasan ini melibatkan beberapa instansi terkait antara lain Polri, Kejaksaan dan TNI –AL. Untuk menunjang kegiataan pengawasan kepada masing-masing pokmaswas sudah diserahkan sebuah perahu motor tempel.

Tahun 2009 CRITC melakukan kegiatan untuk pemasangan tanda kawasan konservasi di semua desa Coremap berupa tonggak/patok dari beton, dan menentukan titik koordinat yang menunjukkan bahwa di sekitar kawasan tersebut terdapat kawasan konservasi (DPL) yang harus dilindungi oleh masyarakat (pokmas konservasi). Untuk efektifitas pengawasan pihak PIU menunjuk kepala UPTD Dinas Perikanan ikut serta melakukan pengawasan di kawasan Tambelan. Namun demikian pelaksanaan pengawasan oleh UPTD (MCS) tidak berjalan secara optimal. Menurut informasi masyarakat, petugas yang bersangkutan

sering tidak berada di lokasi, meskipun sesekali melakukan pengawasan di sekitar teluk Tambelan (sekitar camp penampungan ikan).

2.1.2. Pelaksanaan Coremap Tingkat Desa

Program COREMAP II di Kecamatan Tambelan telah dilakukan sejak tahun 2005 dengan memperkenalkan berberapa teknologi baru, sehingga disadari ataupun tidak telah menempatkan pihak yang terlibat dalam kegiatan COREMAP II sebagai agen perubahan sosial (*agent of social change*). Memperkenalkan (introduksi) teknologi baru akan mudah diterima oleh masyarakat apabila (1) kelompok masyarakat atau individu-individu dalam masyarakat memiliki pengetahuan atau kerangka budaya yang sama yang diperoleh melalui kontak budaya dengan masyarakat lain (2) kemampuan mendemonstrasikan kegunaan teknologi baru tersebut, sehingga masyarakat dapat mengaplikasikan dengan mudah dan merasakan manfaatnya (3) kedudukan sosial dari para pihak agen perubahan sosial.

Apabila kedudukan para agen perubahan sosial tersebut berasal dari kelompok status sosial tinggi, maka ide-ide baru dan proses transfer pengetahuan dan teknologi baru akan dengan mudah menjangar ke bawah, sebaliknya apabila berasal dari status sosial rendah, maka proses transfer pengetahuan dan teknologi baru akan sulit diterima, karena dengan kedudukan status sosial rendah cenderung kurang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kelompok status sosial yang lebih tinggi (4) kemampuan para agen perubahan masyarakat harus memahami kondisi sosial budaya masyarakat dimana teknologi baru akan diterapkan. (Paul. B. Harton dan Chester L. Hunt, 1990)

Sebagai contoh masyarakat nelayan di Kecamatan Tambelan pada umumnya tidak memiliki pengalaman kerja secara kelompok. Dalam sejarahnya tidak ada kelembagaan sosial (kenelayanan) yang bekerja secara kelompok, seperti masyarakat petani di Bali dengan sistem Subaknya, atau petani di Jawa dengan gotong royong memperbaiki bendungan, memperbaiki saluran irigasi, mengerjakan sawah, dan

memperbaiki rumah. Masyarakat nelayan di Kecamatan Tambelan cenderung lebih bersifat individual (egaliter). Tingkat pendidikan mereka lebih baik dibandingkan dengan daerah lain dengan rata-rata SLTP tamat. Mereka yang memiliki kemampuan dan pengalaman berorganisasi dan keterampilan manajerial jumlahnya relative sedikit sebagaimana dipersyaratkan untuk menjabat kepengurusan dalam LPSTK maupun Pokmas. Sementara itu pola interaksi sosial antara warga masyarakat dilakukan dengan tatap muka (*face to face*), maupun dengan kumpul-kumpul di warung sehingga penyampaian informasi dapat dilakukan secara langsung. Selain itu penyampaian informasi dapat dilakukan melalui organisasi yang ada di setiap desa, seperti pemerintah desa, PKK atau DPD (Dewan Perwakilan Desa)

Kawasan Tambelan merupakan salah satu lokasi di kabupaten Bintan yang memiliki potensi di sektor perikanan yang sangat besar. Tingkat peradaban dan pengetahuan masyarakat nelayan di kawasan Pulau Tambelan relatif baik, hal ini terlihat dari pemilikan sarana dan prasarana dan alat tangkap nelayan. Aktivitas kenelayan mereka sudah berkembang seperti mereka mampu mencari ikan di beberapa kawasan yang jauh dari lokasi tempat tinggal dengan menggunakan perahu dengan berbagai ukuran tonase. Pada tahapan ini masyarakat sudah bisa memahami arti proses produksi, tidak hanya mengumpulkan, dan mengkonsumsi. Untuk mencapai produksi yang memberi keuntungan rumah tangga perlu ketekunan, pengalaman, kesabaran dan kedisiplinan. Berdasarkan pengalaman dalam kegiatan kenelayan perlu dikembangkan budi daya antara lain budi daya atau pembesaran ikan tertentu yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Selanjutnya dengan ketersediaan potensi sumber daya laut yang cukup melimpah dan berbekal dengan penetapan kawasan Tambelan sebagai lokasi program Coremap II maka implementasi program harus memuat antara lain :

- (1) Kesesuaian dengan kondisi ekologi setempat.

- (2) Kemampuan teknis tenaga pembina (fasilisator), penyuluh dan masyarakat sebagai sasaran kegiatan.
- (3) Analisis usaha, menyangkut besaran skala usaha, standard mutu produksi, modal usaha, dan jaringan pemasaran.

Dengan segala keterbatasan para pihak yang terlibat dalam program kegiatan COREMAP II, bagaimana program tersebut diimplementasikan, dan persoalan-persoalan apa yang muncul kemudian, tulisan di bawah ini akan mencoba menjelaskan berbagai pertanyaan di atas.

2.2. PEMBENTUKAN, KINERJA DAN KEGIATAN LPSTK

COREMAP II mensyaratkan perlunya pembentukan kelompok yang akan mengimplementasikan program Coremap di lokasi. Pentingnya pembentukan kelompok masyarakat (pokmas) nelayan adalah agar semua kegiatan berjalan lancar sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan, pembinaan mudah dilakukan karena dengan membentuk kelompok proses difusi dari berbagai introduksi teknologi baru mudah ditransfer. Kelompok pertama yang dibentuk di lokasi Coremap adalah LPSTK (Lembaga Pengelola Sumber daya Terumbu Karang). Lembaga ini dibentuk atas inisiatif Dinas Kelautan dan Perikanan berdiri pada tahun 2005. Tujuan pembentukan lembaga ini untuk penyelamatan dan pengelolaan terumbu karang. Lembaga ini telah ada di setiap desa Coremap (Kel. Teluk Sekuni, Ds Batu Lepuk, Ds Kampung Melayu dan Ds Kampung Ilir) di kawasan Tambelan dan pembentukannya diperkuat dengan SK Kepala Desa masing-masing lokasi Coremap. Sedangkan kepengurusan Coremap seperti di lokasi lain terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota yang berjumlah 5 orang.

Proses pembentukan LPSTK dilakukan secara demokrasi dipilih langsung, dimana setiap orang berhak untuk mencalonkan diri sebagai ketua. Pemilihan ketua LPSTK dilakukan secara langsung oleh masyarakat anggota pokmas dan tokoh-tokoh masyarakat. Apabila telah

terpilih seorang menjadi ketua, sekretaris dan bendahara selanjutnya pembentukannya diperkuat dengan SK Kepala Desa setempat. Selanjutnya LPSTK membentuk pokmas yang diperlukan untuk melaksanakan program aksi Coremap di kawasan Tambelan.

Kegiatan LPSTK pada awal terbentuknya bersama fasilitator memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat (pokmas). Pada umumnya setiap LPSTK terdiri dari empat pokmas yang terdiri dari : pokmas KJT (Keramba Jaring Tancap), Rumput Laut, Bengkel dan Jender (pengelola kepiting, kerupuk). Pada tahap awal tahun 2005/2006 kegiatan LPSTK melakukan sosialisasi program Coremap kepada masyarakat, terutama berkaitan dengan pentingnya penyelamatan terumbu karang dan larangan menggunakan bom dan potasium untuk menangkap ikan. Selain itu juga mensosialisasikan larangan penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Organisasi ini sangat penting karena berkelompok lebih baik, dimana orang bisa saling bertukar informasi dan pengalaman sehingga akan menambah luas wawasan dan pengalamannya. Dengan berorganisasi semua kegiatan dapat dikoordinasikan agar supaya program dapat diimplementasikan lebih cepat dan tepat sasaran.

Kegiatan LPSTK di kawasan Tambelan menurut nara sumber selama dua tahun (2006/2007) tidak memiliki kegiatan (*vacum*) karena tidak adanya program yang di programkan oleh Coremap Kabupaten Bintan. Kegiatan program Coremap baru kembali dilakukan sejak tahun 2008 dengan adanya program pemberdayaan untuk kelompok nelayan.

2.3. PEMBENTUKAN, KINERJA DAN KEGIATAN POKMAS

Bersamaan dengan pembentukan LPSTK selanjutnya kelompok-kelompok nelayan dibentuk sebagai wadah kegiatan program COREMAP II. Beberapa kelompok yang dibentuk meliputi, Kelompok Konservasi, Kelompok Pemberdayaan Perempuan (*Gender*), dan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif. Kegiatannya meliputi budi daya Keramba Jaring Tancap (KJT) kerapu, budi daya rumput laut, pengelolaan Kepiting, pembuatan Daerah Perlindungan Laut (DPL) dan

pembuatan kerupuk ikan/atom. Kepengurusan pokmas dipilih secara langsung (demokrasi) oleh anggota pokmas. Untuk mendukung keberhasilan pokmas dalam menciptakan mata pencaharian alternatif (MPA) pada tahun 2008 dilakukan kegiatan pelatihan membuat kerupuk ikan dan kerupuk atom. Pelatihan dilakukan di Tanjung Pinang dimana setiap pokmas mengirim perwakilan masing-masing dua orang. Selain itu pokmas konservasi juga mendapat pelatihan tentang pengawasan laut dari TNI-AL dan Polisi Air di Tanjung Pinang. Tujuannya untuk memberi pemahaman pentingnya pengawasan wilayah sekitar lokasi Coremap dari aktivitas penangkapan ikan yang merusak terumbu karang dan melaporkannya ke pada pihak berwajib.

Untuk mengembangkan mata pencaharian alternatif pokmas nelayan ini membuat proposal tentang jenis kegiatan/program yang akan dilakukan di desanya. Pembuatan proposal difasilitasi LPSTK bersama fasilitator dan penyuluh yang selanjutnya dikirim kepada PIU untuk disetujui pendanaanya. Apabila proposal disetujui oleh PIU/DKP selanjutnya LPSTK mewakili pokmas melakukan kontrak (*community contract*) dengan PIU yang didalamnya berisi jumlah anggaran, penggunaan dan pertanggung-jawaban serta sanksi terhadap penggunaan anggaran.

Program kerja pokmas COREMAP II idealnya dijalankan dengan bimbingan dari fasilitator dan penyuluh yang selalu siap setiap saat membimbing, melayani dan untuk memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan program kegiatan COREMAP II. Petugas penyuluh ditunjuk oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan, sementara fasilitator ditugaskan oleh LSM yang dikontrak oleh DKP selaku konsultan. Fasilitator dan penyuluh yang ditempatkan di Kecamatan Tambelan sebagian besar waktunya tidak berada di lokasi Coremap, karena berbagai alasan antara lain lokasi yang jauh, tenaganya masih dibutuhkan di tingkat Kabupaten. Sehingga kegiatan program COREMAP II dilakukan pokmas pengembangannya mengalami hambatan. Oleh karena itu keberhasilan program Coremap di desa perlu penanganan yang bersifat konperhensif yang dimulai dari proses awal

(hulu) sampai ke hilir, termasuk kualitas dan pemasaran produk melalui COREMAP II tingkat Kabupaten Bintan.

Kegiatan COREMAP II yang dilaksanakan oleh pokmas memiliki kesamaan antara satu desa dengan desa lainnya dan terkesan sebagai program yang bersifat paket dan baku. Namun demikian kegiatan tersebut sebenarnya disetujui berdasarkan ajuan proposal dan potensi sumber daya laut setempat. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan COREMAP II di desa Teluk Sekuni, desa Batu Lepuk dan desa Kampung Ilir memiliki kesamaan program antara lain KJT dan pembuatan kerupuk ikan (pokmas jender) dan pokmas konservasi (pengawasan/DPL), sementara desa Kampung Melayu selain memiliki program KJT dan pembuatan kerupuk ikan memiliki kegiatan yang berbeda yaitu pokmas perbengkelan. Selain itu desa Teluk Sekuni dan Batu Lepuk memiliki program pengolahan kepiting. Pelaksanaan kegiatan setiap pokmas memiliki tingkat keberhasilan dan hambatan yang berbeda satu dengan lainnya. Pokmas KJT Dengan adanya kesamaan program tersebut sebagai program yang baku dan terkesan paket. Kasus di atas memperlihatkan belum bergesernya paradigma dalam membangun masyarakat di pedesaan, meskipun reformasi dan otonomi daerah sudah berjalan hampir satu dasawarsa. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab gagalnya program kegiatan COREMAP II di lapangan. Pada tataran masyarakat sebagai kelompok sasaran kegiatan program COREMAP II pun menghadapi persoalan yang sangat serius berkaitan dengan cara kerja Pokmas. Rendahnya keterampilan berorganisasi dan kemampuan managerial pada jajaran pengurus LPSTK dan Pokmas lainnya telah berdampak terhadap pengelolaan dan keberlanjutan program yang telah dilakukan Coremap.

Informasi mengenai implementasi kegiatan COREMAP II di Pulau Tambelan, Kabupaten Bintan dari nara sumber seorang Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Bintan yang secara kebetulan sedang berada di Kota Tanjung Pinang untuk keperluan melaksanakan tugas di kantor tersebut. Menurut informasi yang disampaikan petugas tersebut, implementasi program

kegiatan COREMAP II di P. Tambelan pada tahun anggaran 2008/2009, ditekankan pada kegiatan penciptaan Mata Pencaharian Alternatif (MPA). Adapun kegiatannya meliputi; usaha budidaya ikan kerapu dengan system Keramba Jaring Tancap (KJT), pengolahan ikan, pengolahan kepiting bakau, pembuatan kerupuk ikan, dan perbengkelan mesin perahu pompong. Kendatipun demikian tidak berarti bahwa kegiatan yang lainnya dikesampingkan. Beberapa kegiatan lain di luar MPA meliputi; program pengadaan sanitasi lingkungan berupa pembuangan sampah dari permukiman penduduk ke lokasi tempat pembuangan terakhir (TPA). Bidang konservasi telah ditunjuk dan ditetapkan lokasi Daerah Perlindungan Laut (DPL) untuk masing-masing desa dan telah ditetapkan melalui SK Desa sebagaimana tercantum dalam buku Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK) untuk masing-masing desa. Pokmaswas sebagai lembaga yang bertugas mengawasi daerah konservasi (DPL) khususnya, dan wilayah perairan P. Tambelan umumnya dari segala bentuk ancaman dan gangguan tindak pelanggaran dan kejahatan di kawasan perairan tersebut, juga telah dibentuk, dan dilengkapi dengan peralatan kerja berupa perahu motor temple berkekuatan mesin merek Yamaha 40 PK. Di bidang prasarana social, juga telah dibangun 2 unit bangunan Pondok Informasi, 1 unit berada di Desa Kampung Hilir dibangun pada tahun 2006, dan 1 unit berada di Desa Teluk Sekuni, sedang 2 unit yang lain akan segera dibangun di Desa Kampung Melayu dan Desa Batu Lepuk.

Di P. Tambelan sendiri terdapat 4 desa, yang masing-masing desa memiliki organisasi Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang (LPSTK). Ke empat desa tersebut membentuk satu permukiman dan tinggal di satu kawasan perairan pantai Teluk Tambelan. Dalam menyusun program kegiatan COREMAP II di P. Tambelan, tampaknya pendekatan administratif lebih dikedepankan ketimbang pendekatan kawasan. Hal ini memiliki implikasi terhadap beban kerja yang harus ditanggung oleh para pihak yang terlibat dalam kegiatan COREMAP II di P. Tambelan, utamanya bagi para petugas pendamping atau fasilitator teknis desa dan penyuluh lapangan. Mengingat jauhnya jarak lokasi kegiatan dengan tempat kerja petugas penyuluh yang merangkap

sebagai pegawai kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan, serta sulitnya transportasi laut menuju P. Tambelan, mengakibatkan kegiatan pendampingan tidak dapat berjalan efektif. Pada saat yang sama penataan kawasan konservasi laut dengan pendekatan administrasi telah memunculkan persoalan tersendiri dalam pembuatan tanda batas areal kawasan DPL. Bila masing-masing desa mengukuhkan klaim kawasan DPL-nya dengan tanda batas fisik, maka akan mengganggu jalur pelayaran dan aktifitas penangkapan ikan yang pada ujungnya akan memunculkan konflik nelayan.

Harus diakui pula bahwa langkah persiapan sebelum program aksi dilakukan sudah ditempuh melalui proses panjang meliputi kegiatan sosialisasi program dan persiapan menyangkut kemampuan tenaga-tenaga pelaksana yang berlangsung antara tahun 2004 - 2006 Masyarakat menyebut rentang waktu itu merupakan masa-masa rintisan program kegiatan COREMAP II. Semua langkah persiapan meliputi pembentukan kelompok, pembentukan LPSTK, penjajagan ketepatan program kegiatan, siapa yang akan terlibat, dimana lokasi akan ditempatkan, peralatan apa saja yang harus dipersiapkan, bagaimana cara melakukannya, serta manfaat apa saja yang akan diperoleh masyarakat, semuanya telah dibicarakan bersama dengan segenap lapisan masyarakat dan calon-calon pokmas binaannya.

Kendatipun demikian, dalam realisasinya program kegiatan COREMAP II di P. Tambelan tidak sepi dari berbagai persoalan. Bila merujuk pada kategorisasi kegiatan COREMAP, yakni MPA, Program Kesetaraan Gender, Prasarana Sosial, dan Konservasi, semestinya penulisan harus konsisten dengan kategorisasi kegiatan tersebut, namun dalam realitasnya di lapangan orang sulit membedakan antara kegiatan MPA dan Program Kesetaraan Gender. Karena itu untuk lebih mempermudah dalam membaca temuan penelitian di lapangan, akan diuraikan per item kegiatan. Tulisan di bawah ini ingin mengungkap berbagai kegiatan , kondisi dan permasalahan yang dihadapi

2.4. KEGIATAN SOSIALISASI

Kegiatan sosialisasi kegiatan COREMAP di tingkat desa dilakukan oleh LPSTK, fasilitator teknis desa, fasilitator desa dan Petugas Penyuluh Lapangan DKP (PPL). Bentuk sosialisasi kegiatan COREMAP antara lain melalui pertemuan warga desa, penyebaran leaflet, brosur, poster, papan pengumuman yang isinya memuat tentang larangan dan himbauan untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak lingkungan. Namun demikian kegiatan sosialisasi kegiatan COREMAP sejak tahun 2007-2009 erjadi kevakuman karena kegiatan tersebut lebih diutamakan pada kegiatan MPA.

2.4.1. Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

1. Budidaya Ikan Kerapu Sistem Keramba Jaring Tancap (KJT)

Program kegiatan budidaya ikan kerapu dengan sistem Keramba Jaring Tancap (KJT), dilakukan di empat desa, yang masing-masing memiliki satu Pokmas KJT. Pokmas Napoleon berlokasi di Desa Batu Lepak, Pokmas Karang Laut berdomisili di Desa Kampung Hilir, Pokmas Bintang Laut berdomisili di Kelurahan Teluk Sekuni, dan Pokmas Maruwan di Desa Kampung Melayu. Gagasan awal dibentuknya pokmas KJT adalah untuk membuat areal demplot budidaya ikan kerapu dengan sistem Keramba Jaring Tancap. Sistem ini sudah banyak dilakukan oleh penduduk setempat dengan kecil-kecilan, juga sudah dipraktikkan di camp-camp penampungan milik para pengusaha penampung ikan Harapannya dengan keberadaan demplot ini akan dapat menyebarkan usaha budidaya ke seluruh nelayan P. Tambelan, sehingga tidak lagi harus melaut dalam waktu sehari-hari. Cukup dengan usaha ini dapat mengalihkan mata pencaharian penduduk nelayan P. Tambelan. Miskonsepsi dalam kegiatan ini terjadi pada apa yang disebut dengan kegiatan "penampungan" ikan dari hasil tangkapan nelayan pada perairan setempat dengan "budidaya ikan kerapu" membesarkan dari benih yang didatangkan dari luar. Program kegiatan COREMAP lebih

memilih pada kegiatan budidaya ikan kerapu, dan bukan pada kegiatan penampungan ikan sebagaimana yang lazim dilakukan masyarakat. Konsekwensi dari pilihan ini adalah adanya perlakuan yang berbeda dalam pemeliharaan ikan budidaya dengan kegiatan penampungan ikan. Hal ini menuntut pengetahuan teknik budidaya ikan kerapu yang baru sama sekali buat masyarakat yang terlibat dalam kelompok.

Permasalahan ini telah diantisipasi oleh para pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, dengan membekali anggota pokmas yang terlibat dengan keterampilan penguasaan teknik budidaya ikan kerapu melalui kegiatan pelatihan, sekaligus menyangkut kemampuan manajemen usahanya. Dengan bekal ketrampilan penguasaan teknik budidaya ikan kerapu yang terbatas, kegiatan inipun dilakukan. Hasilnya, terbukti memang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Uraian berikut akan mengungkap kegiatan budidaya ikan kerapu pada masing-masing pokmas, beserta permasalahan yang dihadapi

2. Pokmas Karang Laut

Pokmas Karang Laut berlokasi di Desa Kampung Hilir. Kelompok ini dibentuk pada tahun 2004 setelah melalui pertemuan musyawarah desa yang dihadiri oleh masyarakat, tokoh pemerintah desa setempat yang terdiri dari ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa, Dewan Perwakilan Desa (DPD), pengurus LPSTK, petugas Fasilitator Teknis Desa, Motivator Desa, dan sejumlah anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat (Pelita Alam, Lindung Alam, Citra Nada Indah). Kelompok ini semula beranggota 20 orang, diketuai oleh Sdr. Deswan Wiranda. Pada tahun 2007, anggota pokmas mengalami penyusutan menjadi 7 orang, 3 orang pindah ke Pokmaswas, lainnya direkrut duduk dalam kepengurusan LPSTK, dan bekerja di luar desa.

Diantara 7 orang anggota, 2 diantaranya pernah bekerja di tempat penampungan ikan yang lazim disebut "camp". Di perairan Teluk P. Tambelan terdapat 4 camp besar yang memelihara ikan kerapu hasil tangkapan nelayan setempat. Hasil ikan tangkapan yang mati akan

disimpan di *cool box* atau dijual, sedangkan ikan yang masih hidup akan dipelihara untuk sementara waktu sambil menunggu kedatangan kapal Hongkong yang secara rutin datang untuk mengambil ikan dalam sebulan sekali. Sedang hasil tangkapan ikan yang mati, apabila jumlahnya cukup banyak, dibawa ke pedagang penampung yang lebih besar di Tanjung Pinang. Memelihara ikan kerapu yang masih hidup dalam keramba dan memasukkan ikan mati dalam *cool box*, dilaksanakan oleh pekerja camp.

Bergabungnya 2 orang anggota pokmas yang sudah berpengalaman bekerja di camp-camp setempat diharapkan bisa menularkan pengalamannya kepada anggota yang lain. Namun demikian tidak semua pengalamannya bisa diajarkan kepada anggota yang lain, sebab kegiatan memelihara ikan di camp dengan kegiatan budidaya ikan kerapu di KJT pokmas relatif berbeda. Kegiatan budidaya adalah membesarkan ikan dari benih ikan kerapu yang berasal dari luar, sedang penampungan ikan adalah memelihara ikan-ikan kerapu yang sudah besar dan siap untuk dijual. Ke dua usaha ini memerlukan perlakuan yang berbeda. Disinilah letak kesalahan pemahaman mengenai konsep "budidaya". Apa yang selama ini dilakukan di camp-camp penampungan dianggap sebagai budidaya ikan kerapu, sehingga terjadi perbedaan konsep dalam budidaya ikan antara pekerja camp dan anggota pokmas yang berlangsung sejak awal program kegiatan ini. Masuknya sejumlah buruh nelayan pekerja di sejumlah camp, untuk ikut terlibat dalam kegiatan budidaya ikan kerapu dengan sistem keramba jaring tancap ini, sekaligus mengindikasikan telah terjadinya miskonsepsi tersebut. Selama tahun 2006, kegiatan COREMAP di P. Tambelan mengalami kevakuman. Kegiatan COREMAP baru mulai terasa kembali sejak awal bulan Nopember 2007, saat pokmas diminta oleh petugas Fasilitator Teknis Desa membuat pengajuan proposal kegiatan. Setelah semua usulan diajukan oleh pokmas, kemudian petugas fasilitator teknis desa merapikan proposal sesuai dengan format yang telah ditentukan, untuk selanjutnya diajukan ke PIU.

Proposal program kegiatan budidaya ikan kerapu dengan sistem KJT disetujui dan dalam waktu yang tidak terlalu lama (Nopember 2007) bantuan modal tahap pertama turun sebesar 45 juta rupiah. Bantuan modal tersebut segera diwujudkan untuk membangun media Keramba Jaring Tancap. Pembuatan 1 unit KJT yang terdiri dari 6 lubang dengan ukuran masing-masing 2,5 x 3 m. Bantuan tahap ke dua turun lagi bulan Januari 2008 dalam jumlah yang sama. Disusul kemudian pelaksanaan kegiatan pelatihan di Kota Tanjung Pinang selama 3 hari, tepatnya dilakukan di areal budidaya ikan kerapu milik salah seorang pengusaha. Pelatihnya sendiri adalah seorang petugas dari DKP Kabupaten Bintan. Bersamaan dengan berlangsungnya kegiatan pelatihan tersebut, saat itu pula dipesan bibit ikan kerapu di tempat yang sama. Semula bibit dipesan sebanyak 12.000 ekor dengan ukuran rata-rata 5 inci, harga per ekor Rp 27.000,-. Bibit ukuran ini dinilai rawan terhadap resiko kematian yang mencapai angka sebesar 30%. Untuk menghindari resiko kematian yang tinggi, maka diputuskan untuk membeli bibit dalam ukuran yang lebih besar antara 6 inci – 9 inci, harga per ekor menjadi Rp 33.000,-. Pada ukuran ini, diperkirakan tingkat kematian hanya 10%. Sesampai di tempat, bibit itu kemudian dipisahkan menjadi 3 kelompok ukuran, yakni ukuran 6 – 7 inci ditebar dalam 2 lubang, 8 inci, 2 lubang, dan 9 inci 2 lubang. Total jumlah bibit yang bisa dibeli dengan ukuran tersebut turun menjadi 1000 ekor.

Kegiatan budidaya ikan kerapu ini sudah berjalan 4 bulan, yang dimulap pada Februari – Juni 2009. Hitungan terakhir jumlah ikan yang hidup tinggal 930 ekor. Sementara itu telah dilakukan penimbangan dengan bobot ikan pada kisaran 4 ons – 5 ons. Harga ikan kerapu macan di pasar setempat hanya berada pada kisaran Rp 60.000,- - Rp 70.000,- per kg. Biaya pembelian pakan selama 4 bulan sudah menelan Rp 10.000.000,-. Dalam waktu 4 bulan ini kalkulasi usahanya masih merugi, harga per ekor bibit saja sudah mencapai Rp 33.000,- per ekor, sementara harga jual per kg-nya hanya mencapai Rp 60.000,-. Kalau bobot ikan baru mencapai 5 ons, artinya harganya baru mencapai Rp 30.000,-, masih berada di bawah harga pembelian bibit.

Untuk mencapai bobot pada kisaran antara 7 ons – 8 ons per ekor, dibutuhkan perkiraan waktu pemeliharaan sekitar 10 bulan. Perhitungan ini meleset dari perhitungan awal sesuai dengan hasil studi kelayakan usaha sesuai yang tercantum dalam proposal yang dipatok pada lama pemeliharaan sekitar 8 bulan, dan apabila lebih dari itu, akan mengalami kerugian. Demikian juga taksiran harga jual meleset jauh, dari Rp 120.000,- per kg, turun menjadi Rp 60.000,- per kg. Dengan melihat tingkat pertumbuhan ikan yang ada, biaya pakan yang dipatok sebesar 20 juta rupiah selama 8 bulan, ternyata juga tidak mencukupi.

Uang pemeliharaan ini disimpan di bendahara LPSTK, yang setiap saat (per bulan) bisa diambil sebesar Rp 2.500.000,-. Pada kelompok Karang Laut, selama bulan 1 dan 2 diminta dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- untuk mengganti upah kerja dalam pembuatan media budidaya KJT, sedang pakan dicari secara bersama-sama oleh anggota pokmas dari pakan alami ikan-ikan kecil tamban. Kendatipun demikian, usaha pencarian pakan ini tidak mudah, karena harus bersaing dengan nelayan pengrawai untuk mencari umpan. Hal ini berakibat pemberian pakan menjadi tidak optimal. Dengan hasil penangkapan pakan per hari sekitar 30 kg saja tidak cukup, pada hal kebutuhan per hari pakan ikan sebesar 40 kg. Bila harus membeli kepada nelayan, harga rata-rata per kg pakan ikan Rp 6000,-, itu pun belum tentu ada barangnya. Kebutuhan rata-rata pakan sehari setara dengan Rp 180.000,- per hari bila hanya diberi pakan sebesar 30 kg, dan Rp 240.000,- per hari bila harus diberi pakan dengan jumlah takaran sesuai dengan petunjuk teknik budidaya ikan kerapu sesuai dengan usia yang baru mencapai 2 bulan dari waktu penebaran. Dengan hitungan biaya pakan per bulan Rp 2.500.000,- masih kurang.

Melihat pertumbuhan ikan dalam kondisi sekarang (Juni 2009), panen ikan baru bisa dilakukan pada bulan Desember 2009. Hasil panen diperkirakan sebesar 800 kg, dengan rata-rata harga per kg Rp 70.000,-, atau setara dengan nilai uang Rp 56.000.000,-. Perolehan kotor ini masih jauh dengan modal yang dikeluarkan. Dengan uang sebesar itu, maka tahun berikutnya hanya bisa membeli bibit ikan kerapu sebesar

700 ekor, setor ke LPSTK 4% atau sebesar Rp 2.240.000,-, dan sisanya untuk pembelian pakan.

Persoalan yang kemudian muncul adalah, apakah dengan jumlah bibit sebesar itu masih ada perusahaan yang bersedia dalam pengadaannya? Menurut pengakuan Ketua Pokmas, tidak ada masalah dengan pengadaan bibit, nanti digabung dengan pokmas yang lain yang ada di P. Tambelan.. Camp-camp setempat dan kapal Hongkong bersedia melakukan pengadaan bibit, asal hasil panennya nanti dijual kepada camp-camp yang sama yang telah bersedia dalam pengadaan bibit. Kendatipun demikian, ketua Pokmas belum pernah melakukan pembicaraan kepada para pemilik camp setempat. Menurut penilaian Ketua Pokmas, usaha ini tidak menguntungkan, karena skala usahanya yang terlalu kecil. Menurutnya minimal 5000 ekor, dan modal akan kembali dalam 3 siklus panen. Informasi yang ia peroleh dari seorang pakar ekonomi sebuah perusahaan ternama PT CORINDO, saat mengikuti pelatihan di Tanjung Pinang, menyebutkan bahwa usaha budidaya ikan kerapu yang dilakukan pokmas memang tidak terlalu menjanjikan, apa lagi dengan tidak adanya kepastian harga. Sok Hwa salah seorang pengusaha keturunan Cina di P. Tambelan pernah punya pengalaman dalam budidaya ikan kerapu di lokasi Perairan Teluk P. Tambelan menilai bahwa harga bibit yang diterima pokmas cukup mahal, dan dengan harga sebesar itu kecil kemungkinannya pembudidaya akan memperoleh keuntungan.

Pengalaman Sok Hwa dalam budidaya ikan kerapu, dihadapkan pada kendala kondisi ikan selalu cacat, bentuknya bongkok, sehingga harga ikan rendah, bahkan tidak laku dijual sama sekali. Berulang kali tenaga ahli dari Lampung (Pusat Balai Benih Lampung) didatangkan, tetapi tetap belum diketemukan apa penyebab cacat ikan kerapu tersebut. Kendala ini membuat Sok Hwa menghentikan usahanya. Masih segar dalam ingatan peneliti, pada kasus budidaya ikan kerapu di P. Nias tahun 2008 yang lalu, bahwa sejumlah pengusaha keturunan Cina menghentikan usahanya karena dengan harga pakan yang mahal mencapai Rp 4000,- per kg ikan teri basah, usaha ini menjadi tidak

ekonomis lagi. Usaha ini akan dapat memberi keuntungan bila harga pakan berada pada Rp 2000,- per kg, dan harga jual ikan pada kisaran Rp 120.000,- - Rp 150.000,- per kg ikan kerapu macan.

Dengan kondisi seperti itu, lalu bagaimana dengan masa depan KJT di Kampung Hilir, apakah mau dilanjutkan, dihentikan, atau dialihkan keusaha lain? Dari hasil pengamatan Ketua Pokmas, satu peluang usaha yang dirasa masih memungkinkan adalah usaha budidaya ikan *sengat*. Ikan ini mudah ditemukan di perairan Teluk Tambelan. Biasa ditangkap dengan menggunakan alat tangkap bubu, atau biasa dipancing oleh anak-anak dengan menggunakan umpan roti atau nasi dicampur dengan pewarna kuning. Jenis ikan ini dipandang oleh orang-orang Tionghoa sebagai ikan yang memiliki keberuntungan (Hoki), terutama dikonsumsi saat lebaran Cina. Harga per kg ikan *sengat* bisa mencapai Rp 100.000,-, tapi hanya laku pada saat lebaran Cina saja. Di luar waktu itu, ikan ini tidak laku dijual. Menurut penilaian Ketua Pokmas, usaha budidaya ikan kerapu dalam kondisi seperti sekarang tetap masih bisa dilakukan, tetapi dengan jumlah ikan yang semakin tahun semakin menurun. Mengingat kegiatan ini adalah merupakan program pemerintah, ia tidak bisa memutuskan apakah mau dilanjutkan atau dihentikan, masih menunggu hasil pembicaraan dengan Pokmas, LPSTK, dan PIU.

3. Pokmas Bintang Laut.

Pokmas Bintang Laut beranggota 12 orang, berdomisili di Kelurahan Teluk Sekuni, diketuai oleh Saiful. Kelompok ini berdiri sejak tahun 2004, setelah melalui musyawarah yang diselenggarakan di kantor Kelurahan Teluk Sekuni yang dihadiri oleh warga masyarakat setempat, Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa, Petugas Fasilitator Teknis Desa, Dewan Perwakilan Desa, dan jajaran Pengurus LPSTK. Saat bertemu dengan sejumlah anggota pokmas dalam acara Focus Group Discussion (FGD), mereka mengaku tertarik dengan usaha ini karena diajak oleh Petugas Fasilitator Teknis Desa untuk membentuk pokmas sebagai wadah kegiatan usaha budidaya ikan kerapu. Peluang usaha ini masih

menjanjikan keuntungan karena peluang pasar ikan kerapu masih sangat terbuka untuk pasar ekspor. Disamping itu kondisi perairan Teluk P. Tambelan dan potensi ikan kerapu serta pakan alami masih cukup tersedia melimpah. Kendatipun dengan mengajukan sejumlah analisa usaha yang menjanjikan, diantara anggota masih timbul keraguan soal kemampuan teknis pemeliharaan yang dimiliki untuk melakukan usaha ini. Berkat kemampuan petugas Fasilitator Teknis Desa dalam meyakinkan kelompok sasaran calon binaannya, keraguan itu sirna dan berubah menjadi harapan yang menjanjikan. Soal kemampuan teknis budidaya, sambil jalan akan diberikan pelatihan dan pendampingan. Harapan yang digantungkan kepada usaha ini kelak bila berhasil akan dapat mengubah nasib hidup mereka. Masyarakat nelayan tidak perlu jauh-jauh lagi mencari ikan di lepas pantai, berhari-hari meninggalkan keluarga anak dan istri, pengurbanan materi yang tidak sedikit, dan menempuh resiko yang tinggi.

Untuk menggapai harapan tersebut, maka dilakukanlah langkah-langkah persiapan anggota pokmas sebagai calon pengelola dengan memberikan bekal pelatihan mengenai teknik budidaya ikan kerapu kepada 2 orang anggota pokmas selama 3 hari di Kota Tanjung Pinang. Pada waktu itu juga anggota pokmas peserta pelatihan, diyakinkan sekali lagi melalui penghitungan analisa usaha, sebagaimana yang tercantum dalam proposal. Dalam analisa usaha ini, dinyatakan bahwa siklus usaha budidaya ikan kerapu akan memiliki nilai ekonomis jika target waktunya terpenuhi yakni dalam siklus 8 bulan. Apabila target waktu itu terlampaui, maka usaha ini menjadi tidak ekonomis lagi. Kalkulasi berikutnya disebutkan bahwa biaya pemberian pakan rata-rata per bulan sekitar Rp 2.500.000,-. Pada siklus 8 bulan ini bobot ikan sudah mencapai kisaran 0,9 kg – 1,2 kg, yang sudah termasuk dalam klas super dengan harga Rp 120.000,- per kg.

Dengan jumlah bibit 1200 ekor, minimal bobot yang bisa dipanen sebesar 800 kg, ini setara dengan nilai uang sebesar Rp 96.000.000,-. Padahal pokmas hanya menerima pinjaman modal usaha kotor sebesar Rp 90.000.000,-. Setelah dipotong dengan biaya pelatihan, biaya

administrasi kontrak, uang jalan peserta pelatihan 3 orang selama 3 hari di Tanjung Pinang, total bersih yang diterima kelompok tinggal sekitar Rp 70.000.000,-. Uang sebesar itu turun dalam dua tahap, masing – masing sebesar 50%. Dari uang total sebesar itu sebesar Rp 20.000.000,- disediakan untuk pembelian uang pakan selama 8 bulan, Rp 35.000.000,- untuk pembelian bibit, dan sisanya untuk biaya pembelian bahan material 1 unit Keramba Jaring Tancap (KJT), terdiri dari 6 lubang.. Dalam realisasinya, karena ukuran bibit kerapu diperbesar dari 5 inci menjadi 7 inci – 9 inci, untuk menekan tingkat kematian, maka jumlah bibit yang diperoleh susut dari 1200 ekor menjadi 1000 ekor.

Pembuatan media budidaya ikan kerapu dengan sistem KJT ini, dilakukan secara bergotong royong oleh anggota pokmas. Sesungguhnya mereka merasa keberatan dengan cara kerja seperti ini, mereka bertanya-tanya, bukankah program COREMAP dilaksanakan dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan dan sekaligus membuka peluang kerja masyarakat. Dalam hal ini mereka merasa dirugikan, karena selama sehari-hari kerja, mereka tidak dapat apa-apa, pada hal waktu dan tenaga yang dikeluarkan bisa digunakan untuk mencari ikan. Ekonomi rumah tangga mereka merasa sedikit terganggu dengan tersitanya waktu dan tenaga mereka dalam pembuatan KJT. Kendatipun demikian, mereka tidak menuntut seperti yang dilakukan oleh pokmas Karang Laut dengan meminta imbalan mengambil sebagian uang jatah pakan ikan selama 2 bulan sebagai pengganti upah kerja.

Kekecewaan ini mendorong sebagian anggota mengundurkan diri dari kegiatan pokmas. Semula 12 orang, kini tinggal 7 orang. Dalam perkembangannya, usaha mereka juga dihadapkan dengan kendala perubahan cuaca, dari musim hujan ke musim pancaroba yang berlangsung dalam bulan Juni ini. Akibat perubahan cuaca ini, banyak ikan kerapu yang mati. Jumlahnya mencapai 100 ekor lebih. Perhitungan terakhir dalam bulan Juni 2009, ikan dalam keramba tinggal tersisa sekitar 860 ekor. Ikan ini sudah dipelihara selama 4 bulan. Sementara bobot ikan baru mencapai kisaran 4 ons – 5 ons per ekor. Harga setempat jenis ikan kerapu macan per kg Rp 60.000,-, sedang

harga bibitnya saja per ekor sudah Rp 35.000,-. Dana pakan sebesar Rp 2.500.000,- per bulan dirasakan tidak cukup. Pemberian pakan minimal per hari sekitar 30 kg, dengan harga rata-rata per kg Rp 6000,-. Jumlah ini setara dengan nilai uang sebesar Rp 5.400.000,-, sedangkan pokmas hanya mengandalkan dari jumlah uang pakan yang tersedia. Akibat kurangnya pemberian pakan, maka pertumbuhan ikan menjadi lambat. Diperkirakan untuk mencapai bobot 0,9 kg – 1,2 kg rata-rata per ekor, akan memakan siklus waktu 10 bulan, artinya masih ada kekurangan uang pakan untuk jatah 2 bulan lagi. Dari mana kekurangan uang pakan itu akan ditutupi, dan bagaimana kelanjutan usaha ini akan dilakukan? Pokmas belum terpikir sejauh itu. Menurut pengakuan Ketua LPSTK Teluk Sekuni, usaha ini akan dilanjutkan sampai sebatas jatah pakan ikan habis, kemudian ikan akan dijual. Selanjutnya kegiatan apa yang akan dilakukan kemudian, akan dibicarakan dengan pokmas, pengurus LPSTK, Fasilitator Desa, dan PIU.

4. Pokmas Meruwan

Pokmas Meruwan beranggota 10 orang, dipimpin oleh Safii Mohammad, berdomisili di Desa Kampung Melayu. Pokmas ini dibentuk pada tahun 2004, melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh masyarakat, pengurus LPSTK, Petugas Fasilitator Teknis Desa, Pemerintah Desa, Ketua-Ketua RT, Ketua RW, dan perwakilan dari Dewan Perwakilan Desa (DPD). Sebelum pokmas ini dibentuk melalui mustawarah tersebut, petugas Fasilitator Teknis Desa menawarkan kepada pemerintah desa bahwa akan ada kegiatan program COREMAP di P. Tambelan, salah satunya adalah usaha budidaya ikan kerapu macan yang menurut rencana akan dilakukan di perairan Teluk P. Tambelan. Untuk keperluan tersebut Kepala Desa diminta mempersiapkan pokmas sebagai wadah kegiatan.

Pak Safii yang sudah aktif mengikuti kegiatan sosialisasi program COREMAP mulai sejak tahun 2004, cukup dikenal oleh kepala desa, bahwa Pak Safii adalah salah satu tokoh masyarakat yang dipandang

cukup mempunyai pengaruh dan mampu mengorganisir sebuah pokmas. Dengan berbekal informasi dari Petugas Fasilitator Desa, kepala desa kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada Pak Safii, sekaligus menunjuk sebagai ketua pokmas. Mendengar informasi ini dari Kepala Desa, Pak Safii masih merasa ragu atas tawaran kepala desa tersebut, karena dia menyadari tidak memiliki kemampuan teknis untuk melakukan usaha itu. Untuk mengatasi keraguan ini, Pak Safii sanggup menerima tawaran kepala desa dengan mengajukan syarat, bahwa usaha yang akan dilakukan harus didampingi secara intensif oleh petugas Fasilitator Teknis Desa, yang selama ini dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam budidaya ikan kerapu. Permintaannya itu akan segera disampaikan kepada Petugas Fasilitator Teknis Desa, dan kepala desa menjamin pasti akan diberikan pendampingan secara kontinyu.

Dengan berbekal harapan perbaikan hidup, Safii mulai bergerak mendekati tetangga-tetangga dekatnya untuk diajak bergabung membentuk pokmas melakukan usaha budidaya ikan kerapu, dan mereka pun bersedia. Setelah melakukan pembicaraan panjang lebar dengan teman-temannya menyangkut soal bagaimana cara pemeliharaannya, cara penanganan hama untuk mengatasi penyakit dan menekan tingkat kematian, soal pemasaran dan sebagainya, yang semuanya akan ditangani oleh para petugas pendamping, mereka sepakat untuk menerima dan terlibat dalam kegiatan tersebut.

Seperti pokmas-pokmas yang lain, pokmas ini segera menerima sejumlah bantuan modal usaha dalam jumlah, waktu dan persyaratan yang sama, tetapi tidak dalam bentuk uang tunai. Sesuai dengan bunyi kontrak yang ditanda tangani antara pokmas dengan LPSTK, dinyatakan bahwa kewenangan pengelolaan keuangan dan belanja barang ada di tangan LPSTK, termasuk di dalamnya pencairan uang pakan diberikan oleh bendahara LPSTK kepada bendahara pokmas dalam sebulan sekali, diajukan oleh ketua pokmas.

Dalam kaitannya dengan analisa usaha, ketua pokmas mengaku tidak tahu sama sekali, apakah usaha yang dilakukan untung atau merugi.

Kalau hitung-hitungan kasarnya ia mengaku sempat mempelajari saat pelatihan dilakukan di Tanjung Pinang. Dalam hitungan analisa usaha itu yang ia pahami adalah bahwa siklus waktu usaha hanya berumur 8 bulan, bila lebih dari itu, maka usaha akan merugi karena jumlah pakan yang dikeluarkan akan menjadi semakin banyak. Dalam siklus 8 bulan itu, bila ikan tumbuh secara normal sudah akan mencapai bobot 1,2 kg per ekor. Hasil panen ikan kerapu dalam 1 unit KJT minimal diperkirakan mencapai bobot 800 kg, dengan tingkat kematian rata-rata 20%. Nilai jual ikan seberat itu bisa mencapai Rp 96.000.000,-.

Dalam kenyataannya, bibit ikan yang ditebar hanya berjumlah 1000 dan bukan 1200. Dalam hitungan terakhir bulan Juni 2009, ikan kerapu yang hidup masih 903 ekor. Pertumbuhan ikan terasa lambat, kendatipun sudah dipelihara selama 4 bulan, bobotnya baru mencapai 4 ons- 5 ons, malah masih ada yang bobotnya baru mencapai 3 ons. Pertumbuhan ikan sekalipun diberi pakan dalam jumlah yang sama setiap hari, ternyata tidak sama. Bobot ikan yang tidak seragam, jelas nantinya akan menyulitkan pemasarannya, karena pedagang pasti akan melakukan penyortiran. Sedangkan bobot ikan yang mencapai ukuran ideal antara 0,9 ons – 1,2 ons yang tergolong super, jumlahnya terlalu sedikit.

Di bawah ukuran itu, harganya terlalu murah. Mengamati pertumbuhan ikan yang ada, Pak Safii merasa pesimis bisa mencapai target sebagaimana yang tertera dalam proposal. Kondisi perkembangan usaha budidaya ikan kerapu yang berjalan selama ini, membuat kerja kelompok menjadi kurang bersemangat. Hal yang sangat disesalkan oleh pokmas adalah minimnya aktivitas pendampingan, yang dianggap tidak konsisten dalam melakukan pembinaan kelompok. Dalam kondisi sekarang, ikan hanya diberi jatah makan sesuai dengan dana yang tersedia, kendatipun mereka tahu bahwa jumlah tersebut kurang dari porsi makan ikan per hari. Satu hal yang dianggap cukup merepotkan bagi anggota adalah soal penjadwalan waktu jaga. Diantara anggota sering tidak tepat waktu, karena pola melaut mereka memakan waktu yang tidak menentu, antara 4 – 7 hari tergantung hasil tangkapan ikan.

Aktivitas penangkapan ikan sekarang ini sudah mencapai ratusan mil laut, dengan menghabiskan biaya operasional yang tinggi, maka nelayan dipaksa harus bertindak rasional. Mereka akan pulang melaut, kalau hasil tangkapannya sudah bisa menutupi biaya operasional dan uang lebih untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari selama ditinggal pergi, sebab kalau tidak demikian, maka ekonomi rumah tangga akan terancam.

Bila jadwal jaga tiba, sementara belum dapat ikan, pikiran nelayan menjadi terbelah antara mau pulang menunaikan tugas kelompok, atau mau melanjutkan aktivitas penangkapannya karena dirasa masih rugi dan belum dapat menutup biaya operasional. Setelah hampir 4 bulan usaha ini berjalan, Pak Safii selaku ketua pokmas, baru menyadari kelemahan pembentukan kelompok ini, bahwa seluruh anggota pokmas adalah nelayan lepas pantai, sehingga menyulitkan dalam pengaturan jadwal jaga keramba. Hal ini berakibat pemeliharaan tidak optimal. Seharusnya pokmas KJT ini beranggota nelayan-nelayan pantai yang jumlahnya cukup banyak di P. Tambelan ini. Mereka beroperasi di tepi-tepi pantai dengan menggunakan alat jaring karang, pancing dan bubu. Pola waktu melaut mereka berbeda dengan nelayan tangkap lepas pantai, pergi pagi hari jam 05 pagi, dan pulang antara jam 10.00 – 12.00 siang. Waktu luang yang cukup bagi kelompok nelayan ini, serta kedekatan lokasi tempat tinggal dan tempat pencarian ikan memungkinkan mereka untuk melakukan pemeliharaan secara intensif. Hal inilah yang tidak disadari oleh para petugas dan jajaran pengurus LPSTK selama ini

Diperhadapkan dengan permasalahan dan perkembangan budidaya ikan kerapu yang dilakukan selama ini, ke depan Pak Rifai selaku ketua pokmas bagaimana akhir perjalanan usaha ini, apakah mau berhenti menghabiskan jatah pakan saja, atau dilanjutkan lagi. Kalau mau dilanjutkan, bagaimana hitung-hitungannya, berapa hutang yang harus dikembalikan, dan berapa yang harus disetor ke LPSTK ? Ia tidak tahu, karena dalam kontrak perjanjian yang ditandatangani antara pokmas dengan LPSTK tidak ada ketentuan menyangkut hutang piutang, dan

perincian pembagian hasil usaha, demikian juga tidak diatur menyangkut resiko kegagalan usaha, siapa yang harus menanggung ?

Bila mengacu pada perhitungan dalam proposal sesuai dengan yang ia pelajari pada saat pelatihan, dalam satu siklus usaha selama 8 bulan, akan diperoleh penerimaan kotor hasil penen sebesar Rp 96.000.000,-. Jumlah tersebut 50% dikembalikan ke LPSTK, dan 50% diinvestasikan lagi dalam bentuk usaha budidaya ikan kerapu. Dalam 2 siklus usaha diperhitungkan sudah kembali modal, sementara usaha masih tetap jalan. Dalam realitasnya, kalkulasi dalam proposal itu meleset jauh. Sementara itu pihak LPSTK dan berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan ini belum memiliki rencana antisipasi tindakan apa yang harus dilakukan bila usaha ini gagal.

5. Pokmas Napoleon

Kelompok Napoleon dibentuk tahun 2004, melalui musyawarah yang dihadiri oleh Petugas Fasilitator Teknis Desa, Kepala Desa, BPD, Ketua-Ketua RT, Ketua RW, dan tokoh masyarakat setempat lainnya. Kelompok ini dipimpin oleh Zul Hefni yang merangkap sebagai Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Desa Batu Lepuk Semula beranggotakan 12 orang, tetapi karena selalu dirundung masalah, sejumlah 6 anggota yang lain mengundurkan diri.

Sama seperti pokmas KJT yang lain, kelompok ini mendapat pinjaman modal sebesar 90 juta rupiah. Dana sebesar itu masih dipotong untuk biaya 2 peserta pelatihan di Tanjung Pinang 22 – 23 Oktober 2008 sebesar Rp 4.500.000,-. Perjalanan LPSTK Rp 4000.000,-, dan masih ditambah biaya administrasi, tapi sudah tidak ingat lagi berapa persisnya. Total pemotongan sekitar Rp 10.000.000,- lebih. Satu hal yang dirasakan kelompok ini adalah pengelolaan keuangan yang tidak transparan oleh LPSTK. Bendahara pokmas saat menjelang bantuan mau dicairkan, diminta untuk menandatangani kertas kosong, yang dikemudian hari baru tahu bahwa kertas kosong tersebut kemudian ditulis kontrak kerja antara pokmas dengan LPSTK, yang didalamnya

memuat sejumlah daftar nama barang dan harganya. Setelah sejumlah bahan material didatangkan, berupa papan-papan kayu, batang-batang kayu, waring, jaring, seng, dan lainnya, mereka merasa lebih dikecewakan lagi, karena barang-barang material yang diturunkan hanya barang-barang bekas yang dapat dibeli di Tambelan dengan harga yang lebih murah. Kendatipun demikian, mereka masih bisa menahan diri, dan masih tetap melanjutkan pekerjaan mempersiapkan bangunan media budidaya KJT. Setelah semuanya siap, datanglah bantuan bibit ikan kerapu sejumlah 1200 ekor, ukuran 7 inci, harga per ekor Rp 30.000,-. Realitasnya jumlah bibit ikan tidak sesuai dengan jumlah ikan yang tertera dalam berita acara serah terima barang, hanya 863 ekor. Indikasi lain telah terjadinya penyimpangan penggunaan dana ditunjukkan, misalnya sampan bekas yang sudah hancur dibeli dengan harga Rp 1.000.000,-, Akku bekas 70 volt dibeli seharga Rp 775.000,- dinilai kemahalan, taksiran pokmas di pasar setempat hanya Rp 600.000,-, 5 buah lampu 10 watt dibeli dengan harga Rp 7500,- di pasar setempat hanya Rp 3500,-, kawat stenlis 3 gulung Rp 78.000,-, 5 buah travo Akku Rp 112.000,- cas Akku bekas, air Akku 6 botol, dan 2 buah parang. Sebagian kuitansi ada di pokmas, disimpan sebagai catatan administrasi pokmas.

Kekecewaan pokmas bukan hanya sampai di situ, saat pokmas meminta uang pakan agar dikelola pokmas dengan harapan agar sebagian dapat dibagikan kepada anggota pokmas yang terlibat dalam pekerjaan pembuatan KJT, dan sebagian yang lain akan dibelikan pakan ikan selama 8 bulan. Pihak LPSTK merasa keberatan karena aturan utamanya memang tidak seperti itu. Dalam *community contract* yang ditandatangani antara pihak LPSTK dengan PIU, dinyatakan bahwa pengelola keuangan dan belanja barang kewenangannya ada di pihak LPSTK, dan pokmas hanya berhak menerima bantuan dalam bentuk barang.

Klimaksnya karena permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pihak LPSTK, maka kelompok ini tanpa memberi tahu LPSTK mengambil sikap diam (non-aktif), ikan dibiarkan terlantar. Situasi ini mendorong pihak

Ketua LPSTK menyerahkan kegiatan ini kepada Kelompok Barakuda yang beranggotakan 5 orang. Berita acara serah terima pengelolaan KJT kepada Pokmas Barakuda telah dibuat. Sementara berita acara serah terima pengelolaan KJT kepada LPSTK dari kelompok Napoleon belum pernah dilakukan. Pihak Pokmas Napoleon sendiri belum pernah merasa menyerahkan pengelolaan budidaya ikan kerapu yang menjadi tanggung jawabnya kepada LPSTK.

Menurut keterangan pihak Ketua LPSTK, kesediaan Pokmas Barakuda melanjutkan usaha ini dinilai sebagai tindakan penyelamatan sekaligus menjaga citra baik masyarakat di mata pemerintah. Sebaliknya pihak Pokmas Barakuda menilai bahwa keberadaan Pokmas Barakuda adalah kelompok "fiktif" hasil rekayasa Ketua LPSTK Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan dan pengamatan di lapangan, kelompok Barakuda memang ada, tetapi tidak aktif mengelola KJT yang ada. Realitas di lapangan pengelolaan KJT yang ada selama ini dilakukan sendiri oleh Ketua LPSTK. Pakan ikan diambil dari pakan alami ikan tamban, yang diperoleh dari pemasangan bagan tancap yang berdampingan dengan lokasi KJT. Hitungannya setiap pemberian pakan ditimbang, dicatat dan dimasukkan sebagai bon pakan, dan akan diperhitungkan nanti setelah panen. Kecuali itu, untuk mencari pakan, Ketua LPSTK juga memasang sejumlah 12 unit bubu. Sangat disayangkan bahwa tindakan itu dilakukan tanpa saksi dan kesepakatan Pokmas Barakuda. Diduga hal ini akan menjadi sumber masalah dikemudian hari. Selain KJT milik program COREMAP, tidak jauh dari lokasi tersebut, Ketua LPSTK juga memiliki usaha budidaya ikan kerapu dengan sistem KJT secara pribadi.

Menurut keterangan Ketua KPSTK tindakan tersebut merupakan solusi satu-satunya pilihan yang bisa dilakukan, sebab jatah uang pakan ada di tangan Bendahara LPSTK, orang tersebut sudah lama tidak berada di tempat, termasuk sekretaris LPSTK-nya sendiri. Padahal pihak PIU sudah meminta untuk segera ditanda tangani kontrak pembuatan Pondok Informasi. Akibat ketidak-harmonisan hubungan antara Ketua LPSTK dengan jajaran pengurus LPSTK sendiri, dan ketegangan hubungan

dengan pokmas, maka Ketua LPSTK terpaksa bekerja sendirian menangani program kegiatan COREMAP.

Perlu diketahui pula bahwa sebelum pengelolaan KJT ini ditangani oleh Ketua LPSTK, Pokmas Napoleon sempat memelihara selama 1 bulan. Dari dana pembelian pakan sebesar Rp 2.500.000,- yang diterima, masih tersisa uang sebesar Rp 1.901.500,-. Uang tersebut telah dikembalikan kepada Ketua LPSTK pada tanggal 20 Februari 2009.

Terhitung sejak dibentuknya Pokmas Napoleon, hampir kurang lebih 4 tahun Pokmas napoleon merintis usaha, semuanya berakhir sia-sia, dirampas dan diduduki oleh Ketua LPSTK secara paksa, demikian keluhan anggota pokmas beserta Ketua Pokmas saat diwawancarai. Demikian juga sebaliknya, Ketua LPSTK merasa terbebani akibat ulah sebagian pokmas yang kurang bertanggung jawab. Waktu, tenaga, pikiran, uang, tersita untuk mengurus program COREMAP. Demikian keluh sang Ketua LPSTK kepada peneliti saat diwawancarai. Kendatipun demikian, ia akan terus akan tunjukkan tanggung jawab ini kepada masyarakat dan pemerintah. Sekiranya kepemimpinannya memang sudah tidak dibutuhkan lagi, ia pun merasa tidak keberatan melepas jabatan sebagai Ketua LPSTK. Sudah berulang kali persoalan ini dibahas pihak PIU, tetapi belum juga mendapatkan solusinya.

Menurut pengakuan Ketua LPSTK sendiri, penggantian kepengurusan LPSTK memang tidak mudah, karena akan terkendala oleh persoalan-persoalan administrasi, seperti perubahan No rekening, NPWP, dan penandatanganan program-program kerja baru yang harus segera dilakukan, dan itu semua harus diproses di Tanjung Pinang, lalu siapa yang akan membiayai untuk urusan tersebut. Pun demikian pihak yang akan mengganti, akan menerima dengan syarat bila semua persoalan administrasi dan persoalan yang berkaitan dengan kegiatan pokmas diselesaikan terlebih dahulu, baru mau menerima. Sedangkan pengurus-pengurus LPSTK sendiri sekarang ini tidak diketahui keberadaannya. Sebaliknya, melanjutkan kegiatan COREMAP dalam kondisi demikian juga jelas sangat tidak kondusif.

6. Pokmas Perbengkelan

Pokmas ini bernama Karangpayung, beranggotakan 8 orang, dipimpin oleh Asrarudin, berdomisili di Desa Kampung Hilir. Dari sejumlah anggota tersebut, hanya 4 orang yang tergolong aktif. Salah satu tenaga ahli mekanik yang dianggap paling senior adalah Asrarudin sendiri, dan satu-satunya tenaga tetap yang diandalkan adalah Yawardi, anak muda berpendidikan tamat SMP. Kendatipun pendidikan formalnya hanya tamat SMP, Yawardi sudah memiliki pengalaman kerja mekanik yang dipandang cukup mampu menangani kegiatan perbengkelan. Pengalamannya meliputi tenaga kerja mekanik pada bengkel Takbood selama 2 tahun di Batam milik seorang pengusaha Cina di Singapura. Pernah bekerja sebagai mekanik bengkel motor di Batam selama 2 tahun, milik pengusaha orang India yang tinggal di Singapura, dan pernah juga bekerja sebagai tenaga administrasi pada kantor logistic PT. STI (Sumatera Timur Indonesia). Yawardi terlibat pekerjaan kelompok ini baru 1 bulan. Ia mengaku bahwa usaha ini masih dalam tahap rintisan, modalnya kejujuran dan jaga kepercayaan konsumen, itulah yang harus dipegang dalam berbisnis jasa.

Ide pembentukan usaha ini karena masyarakat nelayan sering mengalami kerusakan mesin perahu pompong. Untuk memperbaikinya terutama membubut, terpaksa harus dibawa ke Pontianak atau ke Tanjung Pinang. Demikian juga kalau mau memperbaiki kerusakan-kerusakan kecil seperti mengelas dudukan mesin, rumah lakher, terpaksa harus dibawa ke Pontianak. Selain itu, usaha ini dimaksudkan untuk memberi wadah kegiatan bagi anak-anak muda setempat terutama lulusan SMK bagian mesin.

Untuk pengadaan spare part, di P. Tambelan sudah terdapat 2 toko yang menyediakan suku cadang yakni di Desa Batu Lepuk dan Desa Kampung Hilir. Adapun beberapa jenis mesin yang sering rusak adalah jenis Dongfeng, terutama pada bagian metal duduk. Mesin yang lain seperti Yanmar, TS, dan Yamaha, jarang dipakai, kecuali punya pemerintah umumnya memakai perahu motor tempel Yamaha yang

berkekuatan 40 PK, 150 PK, dan ada yang 200 PK. Suku cadang mesin-mesin tempel ini tidak tersedia di P. Tambelan.

Beberapa peralatan yang dimiliki antara lain; 1 unit mesin api, dynamo untuk travo las listrik merek electrode, 1 unit tabung las karbit, 1 unit gerenda duduk (untuk memotong besi), 1 unit gerenda tangan untuk potong besi, bor duduk untuk mengebor plat besi tebal, 1 unit bor tangan, 1 unit klem penjepit besi, dan 1 unit mesin bubut. Ditambah dengan beberapa jenis kunci, seperti kunci Inggris, kunci pas, obeng, tang penjepit, gunting dan sebagainya. Semua peralatan kerja tersebut cukup untuk menangani kerusakan mesin perahu pompong.

Selain untuk memperbaiki mesin perahu pompong, bengkel ini juga biasa memperbaiki sepeda motor. Siap juga dipanggil ke rumah, atau di tempat terjadi kerusakan. Untuk menunggu bengkel ini dalam sehari harus dijaga 2 orang, 1 tenaga mekanik tetap, dan 1 orang tenaga yang dijadwal berganti setiap hari. Dengan pengaturan ini, bengkel bisa buka setiap hari, disamping tenaga-tenaga yang lain bisa ikut praktik langsung, sehingga proses alih pengetahuan dan keterampilan bisa berjalan bersama. Hasil upah kerja sehari, penerimaan keseluruhan dipotong dengan biaya operasional seperti beli minyak, beli peralatan yang rusak, uang makan, sisanya sebagian untuk upah kerja 2 orang tenaga, besarnya dihitung secara proporsional sesuai dengan kontribusi kerja. Kalau hanya sekedar menemani ya tidak dapat upah, tetapi ada keuntungan teman-teman yang tidak ternilai, yakni penguasaan keterampilan memperbaiki mesin, yang tadinya gak tahu menjadi bisa memperbaiki mesin, yang tadinya tidak tahu membubut, sekarang tahu melakukan pekerjaan itu, yang tadinya tidak bisa mengelas, kini sudah bisa menangani pekerjaan itu. Inilah keuntungan yang tidak kelihatan yang diterima oleh anggota-anggota pokmas. Sebagian pendapatan, disisihkan untuk uang kas kelompok. Saat Yawardi ditemui, pekerjaan sedang sepi, Ketua Pokmas yang tahu persis pengelolaan usaha bengkel ini, tidak berada di tempat karena sedang sakit.

Semua peralatan kerja ini diperoleh dari bantuan program COREMAP II. Jumlah nilai bantuan sebesar Rp 89.000.000,- yang turun dalam dua

tahap. Tahap 1, Rp 44.500.000,- turun pada awal bulan Nopember 2008, sudah dibelikan peralatan di Pontianak, tapi waktu itu belum sempat dibawa ke Tambelan keburu masuk musim badai angin utara, sehingga semua barang ditinggal di Pontianak. Tahap 2 turun bulan Februari 2009, terpaut 4 bulan dengan pembelian tahap 1. Hingga bulan Juni 2009, usaha ini masih jalan. Persoalan utama yang dihadapi pokmas ini adalah bahwa banyak orang memperbaiki mesin yang upahnya dihutang, hal yang tidak pernah terjadi ditempat lain. Diantara orang-orang yang memperbaiki mesin tersebut, tampaknya ada anggapan bahwa bengkel ini adalah milik pemerintah yang sengaja dibentuk untuk melayani kebutuhan nelayan setempat.

Bagaimana dengan status peralatan tersebut, apakah merupakan pinjaman modal yang harus dikembalikan atau tidak? Sejumlah anggota yang ditanya termasuk Ketua LPSTK sendiri juga tidak tahu. Jawabnya yang penting jalani dululah usaha ini.

7. Program Kegiatan Pokmas Gender (Pengolahan Ikan)

Kegiatan ini melibatkan ibu-ibu rumah tangga nelayan di empat desa. Sejumlah pokmas yang ada antara lain, Pokmas Mawar di Desa Batu Lepuk, Pokmas Melur di Desa Kampung Hilir, Pokmas Srimenggirang di Desa Kampung Melayu, Pokmas Anggrek di Kelurahan Teluk Sekuni, dan satu lagi Pokmas Pengolahan Kepiting Bakau di Teluk Sekuni. Bagaimana Pokmas Gender ini dijalankan, serta permasalahan apa yang dihadapi oleh masing-masing pokmas akan diuraikan pada uraian berikut.

8. Pokmas Melur

Pokmas Melur berdomisili di Desa Kampung Hilir, beranggotakan 10 orang dari 5 RT, masing-masing RT diwakili oleh 2 orang. Kelompok ini dibentuk pada tahun 2008 melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh warga masyarakat, ketua-ketua RT, Kepala Desa, Petugas Fasilitator

Teknis Desa, anggota DPD, dan LPSTK. Sebagai orang yang dituakan, Ibu Zaenab ditunjuk sebagai Ketua Pokmas Melur. Atas penunjukan tersebut ia merasa keberatan, takut kalau-kalau tidak mampu untuk mengkoordinir sejumlah anggota dari 5 RT yang ia sendiri tidak mengenal secara pribadi menyangkut karakter anggota yang dipimpinnnya, namun demikian keberatan itu tidak diterima oleh peserta rapat. Atas dasar prinsip keterwakilan pokmas ini dibentuk dan Ibu Zaenab ditunjuk sebagai ketua pokmas.

Untuk memperlancar usaha pokmas, sebelumnya telah diberi pelatihan sejumlah 2 orang anggota termasuk Ibu Zaenab sendiri, tentang keterampilan membuat kerupuk ikan, membuat dodol rumput laut, dan seri kaya rumput laut. Kegiatan pelatihan tersebut berlangsung selama 2 malam 3 hari 22 – 23 Nopember 2008, bertempat di Hotel Nuansa Indah Tanjung Pinang. Ada 12 orang peserta pelatihan, 8 orang mewakili 4 desa di P. Tambelan, dan sisanya 4 orang dari luar yakni daerah Gunung Kijang, Mapur dan Teluk Bakau. Tenaga pelatihnya didatangkan dari Jakarta, tepatnya dari Departemen Kelautan Dan Perikanan Jakarta.

Selain keterampilan masak memasak yang diperoleh, masing-masing kelompok mendapat bantuan peralatan dan modal usaha yang sama. Bantuan peralatan berupa; 1 kompor minyak tanah bersumbu 36, 2 dandang, 3 baskom, 3 buah talam, 1 gilingan ikan (tidak dilengkapi dengan alat putar tangan sehingga tidak dapat digunakan), 1 ember, 1 keranjang, 1 alat mesin pemotong kerupuk tidak bisa digunakan karena kerupuk jadi hancur, 1 buah alat pengelem plastik, 1 buah sendok besi, 1 penampang kayu talenan, dan 2 buah pisau. Nilai total bantuan semuanya tidak diketahui, karena pekerjaan pengadsaan barang ini digabung dengan kecamatan lain dan dikontrakkan kepada kontraktor. Berita serah terima barang dilakukan oleh pihak kontraktor langsung kepada pokmas. Pihak pengurus LPSTK pun juga tidak mengetahui soal administrasi kegiatan ini.

Selain mendapatkan bantuan peralatan tersebut, kepada masing-masing peserta masih mendapat uang saku sebesar Rp 600.000,- selama 3 hari

dan menginap di hotel selama 4 malam. Mereka berada di Tanjung Pinang selama 20 hari, karena cuaca buruk terpaksa harus tinggal di Tanjung Pinang menunggu cuaca baik. Selama waktu menunggu tersebut, semua biaya hidup ditanggung masing-masing. Hal ini menjadi pengalaman tersendiri bagi ibu-ibu peserta pelatihan, karena hidup mereka menjadi sangat tersiksa selama berada di Tanjung Pinang. Bagi yang memiliki keluarga, terpaksa menumpang di rumah keluarga. Bagi yang tidak memiliki keluarga, terpaksa mencari tempat sarana umum yang tersedia seperti masjid dan pos-pos siskamling, yang penting bisa sekedar untuk berteduh. Selama tinggal di Hotel, makan mereka juga kurang terurus, harus berebut dengan yang lain. Demikian juga menu makanannya pun juga tidak enak. Sekembali dari pelatihan, masing-masing pokmas memperoleh modal usaha sebesar Rp 1000.000,-, dipotong ongkos transportasi peralatan sebesar Rp 250.000,-, sisanya sebesar Rp 750.000,- untuk modal usaha. Dengan bantuan modal peralatan dan uang tunai tersebut masing-masing pokmas dapat segera memulai usahanya.

Sejak menerima bantuan modal, Pokmas Melur sudah pernah sebanyak 5 kali membuat kerupuk ikan, dan entah berapa kali membuat kerupuk atom. Sampai dengan bulan April 2009, perkiraan keuntungan yang didapat sekitar Rp 2.500.000,-. Perolehan keuntungan kerupuk atom lebih banyak dari pada keuntungan kerupuk ikan. Dalam 1 karung terigu seberat 50 kg, akan diperoleh keuntungan sebesar Rp 300.000,-. Membuat kerupuk atom dapat sekali jadi dan dilakukan secara bersama-sama banyak orang. Berbeda dengan membuat kerupuk ikan, harus dilakukan tahap demi tahap, mulai dari mengupas ikan, menggiling ikan dengan adonan tepung, membuat bulatan adonan, mengukus adonan yang dibungkus dengan daun pisang, mendinginkan, memotong (merajang) dan menjemur selama 2 – 3 hari. Membuat kerupuk ikan untungnya terlalu kecil, dibandingkan dengan kerupuk atom. Hitungan kasar bahan baku untuk membuat kerupuk sebagai berikut;

14 kg tepung sagu a Rp 6000,- total seharga Rp 64.000,-, 6 liter minyak tanah Rp 24.000,-, 14 kg ikan dikupas menjadi 7 kg daging ikan harganya Rp 112.000,-, ditambah bumbu garam dan mecin, kurang lebih modal yang dikeluarkan sebesar Rp 220.000,- Total produksi yang didapat sebanyak 13 kg kerupuk ikan, harga per kg Rp 20.000,-, total nilai jual Rp 260.000,-. Besar keuntungan hanya Rp 40.000,-. Nilai keuntungan yang tidak sebanding dengan curahan tenaga kerja dan waktu yang dihabiskan.

Adapun rincian membuat kerupuk atom sebagai berikut; 14 kg ikan tenggiri seharga Rp 210.000,-, 7 kg tepung terigu Rp 37.500,-, minyak goreng 10 botol Rp 60.000,-, minyak tanah 6 botol Rp 24.000,-, total modal yang dikeluarkan Rp 331.000,-. Seluruh hasil pengolahan kerupuk ikan atom laku dijual Rp 1200.000,-, dan ada keuntungan sebesar Rp 800.000,-. Dari sejumlah 10 orang anggota yang aktif bekerja hanya 4 orang, lainnya tidak terlibat karena sibuk mengurus rumah tangga. Perkiraan Ibu Zaenab keuntungan usaha selama ini sebesar Rp 2.500.000,-. Uang tersebut disimpan oleh bendahara pokmas, tapi dalam kenyataannya setelah 4 bulan berjalan, ternyata hanya ada uang sebesar Rp 250.000,-. Hal ini mendorong Ibu Zaenab selaku Ketua Pokmas mengambil tindakan menyelamatkan uang yang tersisa, 0,5 karung terigu yang tersisa, dan minyak goreng 4 botol. Sampai saat ini Mei 2009, kegiatan Pokmas terhenti, tetapi secara pribadi Ibu Zaenab tetap masih memproduksi kerupuk ikan yang terbuat dari ikan alu-alu, usaha ini memang sudah digeluti jauh sebelum masuk program COREMAP. Pembuatan kerupuk ikan atom terhenti karena kelangkaan bahan baku ikan tenggiri yang sifatnya musiman dan pada saat musim banyak ikan, ikan tenggiri juga tidak banyak yang diperoleh nelayan.

Akibat tindakan yang diambil Ketua Pokmas, separuh dari anggotanya mengundurkan diri., dan suara yang berkembang di luar menilai Ketua Pokmas tidak cakap mengatur anggota. Sementara menurut penilaian Ketua Pokmas, mengatakan bahwa mereka yang keluar itu memang tidak memiliki keterampilan membuat kerupuk ikan, dan dari dulu ia sudah merasa keberatan memimpin anggota yang kharakternya tidak dikenal.

Anggota yang tersisa 5 orang sebagian masih saudara dekatnya, dan sebagian yang lain masih tetangga dekat satu RT, sehingga sudah kenal secara pribadi menyangkut kejujuran dan kemampuannya menjalankan usaha ini.

Pemasaran produk kerupuk ikan memang terbatas, yakni dibeli oleh orang setempat untuk dikonsumsi sendiri, atau buat oleh-oleh keluarga yang tinggal di Kalimantan (Pontianak) atau di Tanjung Pinang. Sering juga dibeli atau dipesan oleh tamu-tamu dinas yang berkunjung ke P. Tambelan. Sebagai usaha industri kecil rumah tangga, usaha ini masih bisa eksis, tetapi kalau mau dikembangkan lebih besar lagi, tidak mungkin dilakukan karena terbentur oleh kelangkaan bahan baku.

9. Kelompok Mawar

Kelompok pengolahan ikan Mawar, berdomisili di Desa Batu Lepak, beranggota 5 orang, dipimpin oleh Ibu Juniati. Seperti pokmas gender yang lain, setelah mendapat bantuan peralatan, pembekalan keterampilan melalui pelatihan, dan pemberian bantuan modal usaha, kelompok ini aktif memproduksi krupuk atom. Dalam satu bulan, bisa memproduksi 4 kali. Dalam 1 kali pengolahan menghasilkan sejumlah 80 bungkus plastik krupuk atom dengan harga jual a Rp 5000,-, nilai total penjualan Rp 400.000,-. Bila memproduksi krupuk ikan keuntungan yang diperoleh terlalu tipis. Rincian biaya pembuatan krupuk atom sebagai berikut :

5 kg ikan tenggiri	Rp 115.000,-
4,5 kg tepung sagu	Rp 22.500,-
5 botol minyak goreng	Rp 30.000,-
8 butir telur ayam	Rp 8.000,-
Bumbu garam vetsin	Rp 5.000,-
Total pengeluaran	Rp 180.000,-

Semua bahan tersebut setelah dibuat jadi kerupuk atom menjadi 80 bungkus, dengan nilai jual Rp 400.000,-. Dengan demikian, maka ada nilai keuntungan sebesar Rp 220.000,-

Biaya pembuatan Kerupuk Ikan :

10 kg ikan kerang	Rp 80.000,-
10 kg tepung sagu	Rp 75.000,-
5 botol minyak	Rp 20.000,-
garam, vetsin	Rp 5.000,-
Total pengeluaran	Rp 180.000,-

Semua bahan tersebut setelah diproses menghasilkan 20 bungkus, dengan harga a Rp 10.000,-, dengan nilai jual Rp 200.000,-, ada keuntungan tipis sebesar Rp 20.000,-.

Dalam 3 bulan usaha pembuatan krupuk atom ini memperoleh keuntungan sebesar Rp 1.800.000,-. Uang sebesar itu, sejumlah Rp 900.000,- disisihkan untuk penambahan modal usaha, dan sisanya Rp 900.000,- untuk dibagi kepada 5 orang anggota. Usaha pembuatan kerupuk ikan atom, masih cukup menjanjikan, pasar tidak terlalu sulit, biasanya habis dibeli oleh masyarakat setempat untuk oleh-oleh keluarganya di Pontianak atau di Tanjung Pinang. Dari pihak Fasilitator Teknis Desa ada rencana mau dibuatkan kemasan yang lebih bagus, diberi label dari Depkes, kemudian di titipkan di supermarket-supermarket yang dibayar dengan sistem konsinyasi. Menurut penilaian Ketua Pokmas, hal ini justru malah akan merugikan usaha pokmas, sebab dijual di tempat saja cepat laku. Malah masih dipengorengan saja sudah ditunggu pembeli. Kendala usaha yang dihadapi berupa kelangkaan bahan baku.

Diantara anggota pokmas, mereka bisa saling bekerja sama, sebab ketua pokmas sendiri yang memilih anggota pokmas yang dipandang bisa diajak bekerja sama, disamping memang anggota-anggota yang tergabung dalam pokmas ini sudah punya pengalaman membuat

kerupuk atom dan kerupuk ikan. Hal yang sangat dirasakan dengan keberadaan usaha pokmas ini adalah, kurangnya dukungan moral dari para pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, utamanya pengurus LPSTK. Sejak pokmas ini dibentuk, hingga kini belum pernah satu pun jajaran pengurus LPSTK yang datang mengunjungi tempat usahanya. Hingga saat ini usahanya masih lancar-lancar saja, belum menemui persoalan, kecuali masalah kelangkaan bahan baku yang tergantung pada musim.

10. Pokmas Srimanggirang

Pokmas ini beranggota 7 orang, dipimpin oleh Ibu Uray Paryani, berdomisili di Desa Kampung Melayu. Diantara 7 orang anggota tersebut, hanya 3 orang yang tergolong aktif, selebihnya tidak aktif karena kesibukan mengurus rumah tangga. Terhitung dari sejak menerima bantuan modal Februari 2009, sudah 4 kali membuat kerupuk atom. Biaya produksi kerupuk atom adalah sebagai berikut :

10 kg ikan tenggiri	Rp 250.000,-
6 kg tepung sagu	Rp 36.000,-
30 biji telur	Rp 33.000,-
Minyak goreng	Rp 75.000,-
10 liter minyak tanah	Rp 40.000,-
Garam, gula, vetsin	Rp 10.000,-
Total pengeluaran	Rp 444.000,-

Seluruh hasil produksi dijual laku Rp 750.000,-. Dari jumlah hasil penjualan sebesar itu, Rp 50.000,- disimpan sebagai uang kas pokmas, dan sisanya dibagi kepada anggota. Usaha ini terhenti karena kelangkaan bahan baku ikan tenggiri.

11. Pokmas Anggrek

Kelompok ini beranggota 10 orang, dipimpin oleh Ibu Aslianda. Sejak memperoleh bantuan peralatan kerja dan modal usaha, serta bekal

keterampilan membuat kerupuk ikan di Tanung Pinang, kelompok ini sudah memulai usahanya. Dalam kurun waktu sekitar 4 bulan setelah penyaluran modal, baru 1 kali memproduksi kerupuk ikan.

Bahan baku dan biaya yang dikeluarkan setiap produksi sebagai berikut:

7 kg ikan tenggiri	Rp 75.000,-
9 kg tepung sagu	Rp 67,500,-
5 liter minyak tanah	Rp 20.000,-
Total biaya yang dikeluarkan	Rp 300.000,-

Jumlah produksi kerupuk yang dihasilkan 9 kg, dengan nilai jual Rp 360.000,-, ada keuntungan Rp 60.000,-. Seluruh uang hasil penjualan telah dibagi habis kepada seluruh anggota, masing-masing mendapat Rp 6000,-. Keuntungan yang diperoleh terlalu kecil, tidak sesuai dengan modal dan curahan tenaga kerja yang dikeluarkan. Usaha ini terhenti karena dinilai tidak menjanjikan pendapatan keuntungan yang memadai.

12. Kelompok Pengolahan Kepiting Bakau.

Pokmas pengolah kepiting bakau, ada dua yang pertama pokmas di Kelurahan Teluk Sekuni, beranggota 10 orang, dipimpin oleh Ibu Zumahir. Usaha ini sudah berjalan 3 bulan. Pokmas satunya lagi berada di Desa Batu Lepuk, beranggota 6 orang, dipimpin oleh Ibu Widiati. Kelompok ini tidak berjalan, menurut informasi dari Ketua LPSTK, karena bahan baku kepiting bakau sulit didapat. Bantuan modal yang pernah diterima sebesar Rp 42.500.000,0. Setengahnya setelah dibelikan sejumlah peralatan usaha seperti, dandang, baskom, kompor, klem plastik, frizer, pisau, toples, talenan, dan sebagainya, disimpan di rumah Ketua LPSTK. Sisa dana sebesar Rp 19.360.000,- menurut Ketua LPSTK sudah disimpan oleh pihak PIU. Isu yang beredar di luar menyebutkan bahwa uang sebesar Rp 20.000.000,- masih disimpan oleh Ketua LPSTK. Hal ini membuat kekecewaan anggota yang tergabung dalam pokmas. Kasus ini membuat pemimpin pokmas diganti oleh Ibu Nani (istri

Zulhefni Ketua Pokmas Napoleon). Pergantian pengurus ini dilakukan tanpa melalui proses yang wajar. Hanya melalui penunjukkan dalam musyawarah desa. Secara administrative juga tidak sah karena belum ada SK penunjukkan dari Kepala Desa, juga belum ada berita acara serah terima jabatan yang diikuti oleh penyerahan sejumlah barang milik pokmas. Akibatnya pokmas ini tidak dapat menjalankan tugasnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan kelembagaan yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam kegiatan COREMAP II di P. Tambelan masih lemah. Ibu-ibu anggota juga kecewa karena harga-harga peralatan yang diterima dinilai terlalu mahal. Barang-barang ini semua, pengadaannya dilakukan oleh PIU melalui kontrak dengan pihak ke tiga. Ketua LPSTK tidak tahu, demikian juga pokmas hanya menerima barang. Prosedur penyaluran barang dengan membaypas langsung ke pokmas, dinilai telah menyalahi prosedur. Seharusnya PIU harus melewati LPSTK, karena yang memiliki wewenang mengelola kegiatan COREMAP adalah LPSTK. Sebaliknya pihak PIU tidak mau disalahkan, karena ada ketentuan administrative bahwa pembelian barang diatas harga 100 juta harus melalui tender. Persoalan ini membuat pokmas tidak dapat berjalan, disamping memang tidak tersedia bahan baku yang akan diolah.

Satu diantara dua pokmas pengolahan kepiting bakau yang masih jalan adalah Pokmas Matahari di Kelurahan Teluk Sekuni. Pada bulan April 2009, kelompok ini sudah berhasil mengolah kepiting bakau seberat 20 kg daging kepiting, harga per kg daging kepiting Rp 110.000,-. Total penjualan laku Rp 2.200.000,-. Penjualan yang ke dua sebesar 5 kg dengan nilai jual Rp 550.000,-, tetapi uang hasil penjualan yang ke dua ini belum diterima sampai sekarang (Juni 2009).

Hasil daging kepiting dikirim ke Tanjung Pinang, diterima oleh Pak Zulkifli (Staf PIU yang kebetulan punya usaha penampungan daging kepiting). Dari penampung pertama, barang tersebut kemudian dikirim ke Batam, untuk kemudian dibawa ke Medan. Saat dikirim ke penampung pertama, daging kepiting tersebut sudah dalam keadaan diklasifikasi menurut bagian-bagian tubuh kepiting seperti; bagian kaki

sendiri, sapit sendiri, bagian dada (iumbo) sendiri, dan bunganya (telurnya). Bagian sapit dan jari-jari harganya sekitar Rp 100.000,- per kg-nya, bunganya per kg Rp 108.000,-, dan jumbo per kg Rp 160.000,- di pasar setempat. Oleh penampung harga dipukul rata, menjadi hanya Rp 110.000,- per kg. Hal inilah yang membuat ibu-ibu yang tergabung dalam pokmas matahari merasa dirugikan. Sambil usaha ini berjalan, Ketua LPSTK kini sedang mencari penampung yang lebih menguntungkan.

Dari 6 hari kerja dengan jumlah pekerja 10 orang, hanya diperoleh pendapatan Rp 120.000,- per orang. Uang yang Rp 1000.000,- dipotong untuk modal beli kepiting, ongkos transport, beli toples, es, plastic, dan kotak stereoform. Jual yang ke dua beli kepiting 13 kg a Rp 20.000,-. Setelah dikupas hanya jadi 5 kg. Nilai jual Rp 550.000,-. Modal beli kepiting Rp 260.000,-, dipotong transport, plastic, toples, es, dan lain-lain, terima bersih sekitar Rp 200.000,-. Keuntungan yang diperoleh per anggota Rp 20.000,-, dalam 2 hari kerja keuntungan sebesar itu dinilai terlalu kecil.

Menurut hitungan pak Zulkifliansyah (PIU), usaha ini tetap masih menjanjikan, sebagai contoh hitungan kasarnya, modal bahan Rp 800.000,- (40 kg kepiting), kemudian dikupas menjadi 12 kg daging ketam, dijual dengan harga per kg Rp 110.000,- total nilai jual Rp 1.320.000,-. Ongkos stereoform Rp 25.000,- Es Rp 5000,-, Minyak tanah Rp 10.000,-, Pengiriman Rp 30.000,-. Total biaya sekitar Rp 70.000,-. Dengan demikian keuntungan yang diperoleh sebesar Rp 1.320.000,- - Rp 870.000,- sekitar Rp 450.000,-. Keuntungan itu belum terhitung dengan keuntungan yang diterima oleh suami-suami mereka yang memasok kepiting. Apabila dijual ke pedagang hanya laku Rp 15.000,- per kg, di sini dibeli seharga Rp 20.000,- per kg. Untung sebesar itu hanya dikerjakan dalam tempo 2 jam oleh 10 orang. Kendatpun demikian, bagi ibu-ibu yang tergabung dalam pokmas ini tetap masih menilai bahwa keuntungan yang diperoleh terlalu kecil, sebab untuk pembelian sejumlah 40 kg kepiting diperlukan waktu sehari-hari, karena barang tersebut langka. Dalam satu hari kadang

hanya dapat 5 kg, nunggu 3 hari sampai 5 hari baru dapat lagi, kadang sampai satu minggu baru dapat barang. Kelangkaan bahan baku ini membuat usaha menjadi tidak efisien. Keberatan anggota pokmas juga pada pembayaran barang secara konsinyasi, sehingga tidak dapat menjalankan usahanya, karena tidak ada uang kes. Dalam kondisi demikian kalau ada barang maka tidak bisa membeli, akhirnya oleh Ketua LPSTK malah disuruh menjual ke Camp Kijang saja.

Kondisi tersebut di atas membuat anggota pokmas kurang semangat dalam menjalankan program kegiatan COREMAP. Kendatipun usaha ini menghabiskan modal yang tidak sedikit, tetapi pokmas tidak memiliki beban pinjaman yang harus dikembalikan kepada LPSTK. Dalam kegiatan ini, pokmas hanya menerima bantuan peralatan kerja, dan modal usaha dari PIU.

2.4.2. Kegiatan Fisik

1. Program Kegiatan Perbaikan Sanitasi Lingkungan

Program kegiatan sanitasi lingkungan berupa pembuatan bak-bak penampung sampah, dan pembuangan sampah di bak penampung akhir (TPA) di masing-masing desa. Tempat penampung sampah sementara terbuat dari potongan drum, dicat berwarna biru, bertuliskan program COREMAP II di P. Tambelan dan tahun anggaran 2008. Tong-tong sampah ini dipasang berjajar di sepanjang tepi jalan dari Desa Hilir terus ke arah utara sampai Kelurahan Teluk Sekuni. Jarak tong sampah yang satu dengan yang lain sekitar 100 m. Untuk mengangkut sampah, di Desa Kampung Melayu sudah disediakan gerobak sampah, dibuang ke TPA yang berupa bak sampah berukuran 3m x 3m yang ditembok setinggi 1 m. Di lokasi ini sampah kemudian dibakar. Lokasi ini milik warga setempat, dan bangunan bak sampah dibangun oleh kontraktor.

Di Desa Batu Lepuk, kegiatan kebersihan lingkungan dilakukan setiap hari Jumat dengan cara gotong royong. Untuk pembuangan ke lokasi TPA, ditangani langsung oleh seorang petugas desa yang ditunjuk dan

digaji oleh desa. Ada rencana, penanganan sampah ini mau ditata kembali organisasinya, termasuk penarikan iuran warga, namun masih dalam tahap penjajagan. Dari hasil penjajagan selama ini, diketahui bahwa masyarakat merasa keberatan dengan rencana penarikan iuran sampah tersebut. Di Kelurahan Teluk Sekuni, kebersihan lingkungan ditangani oleh seorang petugas kebersihan lingkungan desa. Kendaraan angkutannya sudah disediakan motor bak roda tiga merek KAISAR. Semua kegiatan masih ditangani oleh pemerintah kelurahan. Di Desa Kampung Hilir, program ini tidak jalan karena tidak tersedia lahan tempat pembuangan akhir (TPA). Ada lokasi di ujung selatan desa, tetapi kini sudah pecah menjadi Desa Kukup. Untuk dapat dijadikan TPA, masih menunggu pembicaraan dengan pemilik tanah. Pengadaan peralatan dan pembangunan sarana fisik seluruhnya ditangani oleh kontraktor setempat.

Program perbaikan sanitasi lingkungan ini baru menyentuh pada permukiman penduduk di sebelah barat terutama yang tinggal di kanan kiri jalan aspal, sedangkan yang tinggal di tepi pantai yang justru berhubungan langsung dengan laut malah belum tertangani. Penduduk di tepi pantai ini menjadikan laut sebagai tempat pembuangan sampah.. Aktivitas pembuangan sampah di laut tampaknya sudah biasa mereka lakukan, termasuk membuang hajat besar. Perilaku seperti ini merupakan pemandangan yang lazim ditemukan pada masyarakat nelayan di P. Tambelan, terutama yang tinggal di tepi pantai. Biasanya pagi hari setelah subuh sekitar pukul 5,00 pagi, masyarakat secara beramai-ramai di sepanjang jalan cor tepi pantai membuang sampah ke laut. Pagi hari setelah matahari terbit, permukaan laut Teluk P. Tambelan dipenuhi dengan pemandangan sampah warna-warni, merah, putih, hijau, bertebaran memenuhi permukaan laut Teluk P. Tambelan berarak menuju ke tengah terbawa oleh arus laut yang sedang surut.

Hal ini menunjukkan bahwa cara hidup bersih dan sehat, belum menjadi bagian hidup mereka. Program perbaikan sanitasi lingkungan, tampaknya masih perlu digalakkan, dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dan jajaran instansi terkait pemerintah setempat.

2. Pembangunan Pondok Informasi

Bangunan Pondok Informasi di P. Tambelan baru ada 2 unit, 1 unit di Desa Kampung Hilir dibangun pada tahun 2006, dan 1 unit berada di Kelurahan Teluk Sekuni, dibangun pada tahun 2008. Ke dua bangunan tersebut dibangun oleh kontraktor setempat. Sementara 2 unit bangunan pondok informasi lainnya, 1 unit sudah dipersiapkan lokasinya dan tinggal menunggu pelaksanaannya di Desa Kampung Melayu, dan 1 unit lagi hingga kini belum ada pembicaraan lebih lanjut, karena antara pokmas dan pengurus LPSTK Desa Batu Lepuk masih bermasalah.

Keberadaan bangunan Pondok Informasi di Desa Kampung Hilir sejak mulai dibangun hingga kini tidak berfungsi. Bangunan ini berada di bukit, berlokasi di belakang kantor camat, jauh dari permukiman penduduk nelayan. Karena lokasinya sepi, malah sering dipakai mudamudi untuk berkencan. Semua peralatan yang ada seperti meja, kursi, papan tulis, almari, TV, microfon, mesin ketik, disimpan di rumah Ketua LPSTK. Kalau ditaruh di bangunan Pondok Informasi, takut hilang dicuri orang. Ada usulan dari pengurus LPSTK dan pokmas agar bangunan Pondok Informasi dipindah di tepi pantai, namun hingga saat ini belum ada tanggapan. Secara administratif bangunan Pondok Informasi yang ada berada di Desa Kukup, termasuk rumah Ketua LPSTK kini masuk dalam wilayah administratif Desa Kukup. Perubahan wilayah administrasi ini memunculkan wacana perlunya penggantian jajaran pengurus LPSTK, sekaligus minta dibuatkan bangunan Pondok Informasi di Desa Kampung Hilir.

Bangunan Pondok Informasi di Kelurahan Teluk Sekuni disain dan konstruksinya cukup bagus, letaknya yang strategis, di tepi jalan menuju ke laut. Denah tata ruangnya terdiri dari ruang pertemuan, kamar gudang bersebelahan dengan kantor secretariat LPSTK. Luas bangunan sekitar 8m x 10m, berbentuk rumah panggung, beratap seng, berdinding papan-papan, dan berlantai kayu. Di belakang bangunan Pondok Informasi terdapat bangunan pondok terbuka seluas 2,5m x 5 m, beratap seng, dan bertiang balok-balok kayu sebagai penyangga atap. Bangunan

ini rapat dikelilingi dengan jaring nilon, dengan lebar mata jaring 2 Inchi, sehingga transparan dan tembus pandang. Pondok ini dilengkapi dengan meja yang memanjang kearah utara dan pada sisi kanan kirinya terdapat kursi plastik yang saling berhadap-hadapan ke meja. Bangunan ini merupakan tempat ibu-ibu Pokmas Matahari bekerja mengupas ketam bakau. Pada bangunan ini, tidak boleh sembarang orang masuk, kecuali para pekerja wanita. Dalam menjalankan aktivitasnya, para ibu-ibu pekerja ini harus mengenakan masker, tidak boleh memakai minyak wangi, gincu dan kosmetik lainnya, agar tempat ini steril dari berbagai virus dan penyakit.

Saat peneliti memasuki ruang Pondok Informasi, pada ruang rapat terdapat gulungan waring dan sejumlah gulungan tali plastik, yang rencananya akan digunakan untuk kegiatan budidaya rumput laut pada tahun anggaran berjalan 2009. Pada kamar gudang, berhamburan toples-toples dan stereofom tempat wadah daging kepiting. Di ruang kantor sekretariat LPSTK terdapat almari yang berisi kertas-kertas dan dokumen-dokumen, meja, kursi, dan mesin ketik yang masih baru dalam kondisi terbungkus.

Barang inventaris lainnya berupa TV 21 inci, masih baru, diduga barang rekondisi, sehingga baru dinyalakan dua kali gambar dan suaranya hilang. Kemudian 1 unit mesin Genset, baru dinyalakan sudah meledak karena konslet, kini barang tersebut ngonggrok dalam kondisi rusak. Selebihnya berupa mesin ketik, tidak bisa dipakai, karena daslam kondisi rusak. Semua barang-barang inventaris tersebut pengadaanya dilakukan melalui tender.

2.4.3. Kegiatan Konservasi

Program kegiatan konservasi difokuskan pada pengawasan kawasan perairan Daerah Perlindungan Laut (DPL). Masing-masing desa sudah menetapkan lokasi kawasan perairan DPL. Bulan Mei 2009 yang baru saja berlalu batas koordinat masing-masing lokasi DPL sudah dibuat oleh Team CRITIC dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan.

Team telah memasang patok-patok dasar laut dan juga melakukan survey di lokasi-lokasi DPL tersebut, hasilnya menunjukkan bahwa kondisi terumbu karang masih cukup bagus. Kegiatan yang lain, untuk memperlancar tugas pengawasan yang dilakukan oleh pokwasmas, sejumlah orang yang terlibat dalam kegiatan pokwasmas juga telah diberikan pelatihan selama 3 hari di Tanjung Pinang, dengan melibatkan tenaga pelatih dari jajaran aparat pemerintah terkait, seperti petugas DKP, Polairut, dan Lantamal. Materi pelatihannya meliputi, cara patroli laut, cara menangkap, menyimpan barang bukti, cara pengenalan peta koordinat, dan cara melapor ke polisi atau ke Kamla.

Kawasan perairan DPL tersebut merupakan habitat penyu sisik dan penyu hijau. Penetapan lokasi DPL ini sekaligus juga untuk menunjang upaya pelestarian satwa langka tersebut, yang kini sedang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dengan membangun dua lokasi penangkaran penyu, yakni di Desa Batu Lepuk dan Desa Hilir.

Lokasi-lokasi DPL tersebut meliputi; Perairan P. Wie, adalah lokasi DPL Kampung Hilir. Ekosistem perairan ini terdiri daritanaman mangrove, kebun kelapa, pantai berpasir putih, dan terumbu karang. Kedalaman perairan ini berada pada kisaran 10 m – 20 m. Jarak tempuh dari Desa Hilir ke lokasi DPL dengan menggunakan pompong berkekuatan mesin Dongfeng 23 PK sekitar 2 jam. Lokasi DPL Desa Batu Lepuk di kawasan perairan P. Sedua, terletak di sebelah Barat Laut Desa Batu Lepuk. Ekosistem kawasan perairan ini terdiri dari pantai pasir putih, terumbu karang, kebun kelapa dan tanaman mangrove. Jarak tempuh ke lokasi DPL sekitar 1,5 jam. Lokasi DPL Kampung Melayu berada di sekitar perairan P. Lipin, P. Bedua, dan P. Bernug. Ekosistem kawasan perairan DPL ini berupa hutan mangrove, pantai pasir putih, dan kebun kelapa. Kondisi terumbu karang di perairan ini masih cukup bagus. Informasi dari Ketua Pokmas Barakuda menyebutkan masih ada aktivitas pemotasan dan pemboman di perairan DPL ini yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh warga setempat. Lokasi DPL Kelurahan Teluk Sekuni di perairan sekitar perairan P. Peleng, luas 50 ha. Lokasi ini sudah ditetapkan melalui SK Kepala Kelurahan sejak Bulan November

2007. Pada bulan Juni lalu disurvei oleh Team CRITIC dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan, sudah dipatok batas dasar lautnya. Ekosistem kawasan perairan ini berupa pasir putih dan terumbu karang. Jarak waktu tempuh menuju lokasi. DPL dari Kelurahan Teluk Sekuni sekitar 2,5 jam dengan menggunakan perahu pompong 23 PK. Pada lokasi kawasan perairan sekitar DPL, merupakan daerah konsentrasi kegiatan penangkapan ikan nelayan setempat.

Informasi dari Ketua LPSTK Teluk Sekuni, pembuatan batas-batas lokasi DPL akan segera ditenderkan. Sejumlah peralatan yang diperlukan meliputi, pelampung, patok karang, dan tali jangkar. Lokasi-lokasi DPL tersebut dipilih berdasarkan hasil musyawarah desa yang dihadiri oleh Pokwasmas, LPSTK, petugas CRITIC, DPD, Kepala Desa, dan Petugas Fasilitator Desa. Karena itu bila dalam melakukan pekerjaan pembuatan batas-batas DPL nanti masyarakat tidak dilibatkan, dan main patok-patok saja seperti yang baru saja dilakukan bulan Mei lalu, masyarakat mengancam akan mengusir petugas-petugas tersebut.

Untuk mengawasi lokasi-lokasi DPL tersebut, pokwasmas sudah dibentuk di setiap desa, tetapi tidak jalan. Permasalahannya perahu yang diberikan untuk mengawasi lokasi DPL tidak jalan. Perahu tersebut berupa perahu mesin tempel, berukuran panjang sekitar 7 m, lebar 1,2 m, dan kedalaman sekitar 0,5 m. Perahu motor Speed Boat berkekuatan mesin sekitar 40 PK. Jenis perahu tersebut tidak lazim digunakan oleh masyarakat nelayan setempat. Masyarakat sudah terbiasa menggunakan perahu motor dalam pompong yang ukuran bodinya lebih besar, bermesin Dongfeng 23 PK. Perahu tempel bantuan COREMAP II dinilai terlalu kecil, konstruksinya dinilai tidak sesuai dengan kondisi perairan yang gelombangnya besar. Bila dipaksa jalan, perahu bisa tenggelam. Bantuan perahu motor tempel tersebut diserahkan oleh Bappeda Kabupaten Bintan pada tahun 2006 kepada Desa. Karena lama tidak digunakan, perahu tersebut rusak. Kemudian ditarik oleh DKP, diperbaiki oleh Kontraktor, kemudian baru diserahkan kepada LPSTK tahun itu juga. Perlengkapan perahu yang ikut diserahkan meliputi; tali jangkar, kompas, alat pemantau terumbu karang, sepatu renang,

teropong, dan kaca mata renang. Setelah berada di tangan LPSTK, perahu tersebut hingga kini belum juga diserahkan kepada Pokwasmas. Alasannya masih ada sisa bahan bakar minyak tanah sekitar 30 liter yang belum dipenuhi oleh kontraktor, alat komunikasi HT 2 buah dalam kondisi rusak. Setelah diperbaiki, alat komunikasi pantai ini hanya bisa digunakan pada radius sekitar 1 km, sehingga tidak efektif digunakan untuk sarana pengawasan. Selain itu juga tidak ada biaya operasional. Kalaupun diserahkan kepada Pokmas, juga tidak mau menerima, sebab bahan bakarnya mahal dan sulit didapat. Untuk keperluan masak saja per KK hanya dijatah 10 liter minyak tanah. Selain sulit didapat, biaya operasional perahu motor tempel Yamaha 40 PK boros bahan bakar, kalau terjadi kerusakan juga tidak ada suku cadangnya.. Sebaliknya jenis perahu pompong memiliki beberapa kelebihan, lebih besar, muat banyak, lebih aman dan kuat dari gempuran gelombang, bahan bakar minyak solar mudah didapat, lebih hemat bahan bakar, mudah perbaikannya bila terjadi kerusakan, Kecuali itu, untuk kasus Desa Kampung Melayu, pengerjaan perbaikan perahu oleh tukang setempat selama 13 hari, belum juga dibayar oleh kontraktor. Pada hal perahu-perahu tersebut sudah selesai diperbaiki pada tahun 2007, hingga bulan Juni 2008 perahu dibiarkan terdampar di perairan Desa Kampung Melayu tempat perbaikan perahu dilakukan. Perahu tempel yang lain sudah diambil oleh masing-masing LPSTK, sedang milik LPSTK Kampung Melayu hingga kini dibiarkan karam di tempat perbaikan, mesin perahunya disimpan untuk diselamatkan di gudang Sok Hwa. Mesin perahu di Desa Batu Lepuk, dibiarkan menggantung pada bodi perahu, berbulan-bulan berlabuh diperairan Desa Batu Lepuk, sehingga baling-balingnya menempel pada badan perahu. Perahu tempel milik Pokwasmas Teluk Sekuni malah harus diikat pada buritan perahu bila terpaksa harus dipakai, sebab dudukan mesinnya sudah copot baut dan paku-pakunya, pada hal baru saja diperbaiki. Kalau tidak diikat dengan bodi, mesin perahu bisa lepas dan tenggelam.

Permasalahan lain yang dihadapi dalam kegiatan konservasi adalah lemahnya koordinasi dan pengawasan oleh aparat keamanan serta jajaran instansi penegak hukum. Kapal purnsin yang tertangkap

masyarakat nelayan Teluk Sekuni saat melakukan pemboman pada tahun 2005, berakhir dengan pembakaran kapal di perairan Teluk P. Tambelan. Masyarakat terpaksa berbuat anarkis karena sudah berulang kali kasus yang sama diserahkan kepada petugas sering tidak ada tindak lanjutnya. Saat penelitian ini dilakukan, 8 Juni 2009, banyak ditemukan kapal Vietnam dan Thailand mencuri ikan di perairan P. Tambelan. Satu buah kapal berhasil ditahan polisi, nahkoda dan ABK-nya dideportasi ke Negara asal Vietnam. Tindak pelanggaran yang dilakukan adalah melanggar batas territorial Negara, dan melakukan pengambilan akar bahar. Lokasi perairan ini dikenal marak pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal asing dan nelayan-nelayan pendatang. Mereka melakukan penangkapan ikan dengan tidak segan-segan menggunakan bom, trawl, dan potassium. Kapal yang dibakar massa pada tahun 2005 adalah kapal nelayan milik orang Pontianak, dalam pengoperasiannya diduga melibatkan penduduk setempat yang sudah lama merantau di Pontianak.

Penentuan lokasi DPL yang pendekatannya lebih bersifat administrative, bila tanda batas di permukaan laut dilakukan, akan mengambil ruang fishing ground nelayan, sehingga bisa memicu konflik nelayan. Kecuali itu, bisa mengganggu transportasi laut. Secara teknis, aktivitas Pokwasmas tidak berjalan, karena kondisi peralatan kerja yang tidak memungkinkan Permasalahan konservasi yang lain, upaya pelestarian penyu sisik dan penyu hijau, dihadapkan dengan minimnya dana yang diberikan oleh Pemda. Di Desa Kampung Hilir tempat lokasi penangkaran penyu, dipekerjakan 2 orang pekerja buruh nelayan yang dalam sehari Cuma digaji Rp 20.000,- Uang sebesar ini tidak mencukupi untuk biaya hidup sehari-hari. Kendatipun demikian lokasi penangkaran di Desa Batu Lepuk, telah berhasil menangkarkan penyu laut, dan belum lama ini telah melepaskan sejumlah 300 ekor penyu hijau, berdiameter cangkang antara 15 cm – 20 cm, di perairan Teluk Tambelan.

Selain masalah minimnya pendanaan, upaya pelestarian penyu, dihadapkan dengan ancaman pencurian telur penyu. Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum. Bukti atas

lemahnya penegakkan hukum, tampak pada bebasnya penjualan telur penyu di masyarakat. Di tepi-tepi jalan Kota Tanjung Pinang, banyak dijual bebas telur penyu. Banyak petugas lalu lalang di kota tersebut, mereka mengetahui aktivitas perdagangan telur penyu itu, tetapi seolah tidak peduli, dan tidak melihat bahwa tindakan tersebut sebagai tindak pelanggaran hukum.

2.4.4. Hambatan dan Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan informasi dan wawancara dengan berbagai nara sumber, pelaksanaan kegiatan COREMAP menemukan berbagai permasalahan dan hambatan baik tingkat Kabupaten maupun desa. Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi antara lain :

Ketersediaan dan keterbatasan kualitas sumber daya manusia baik di tingkat pengurus, komponen maupun tingkat pelaksana di kabupaten maupun desa relatif rendah, menyebabkan pelaksanaan berbagai kegiatan menjadi terganggu. Selain itu program Coremap masih cenderung berorientasi "proyek", bukan pembangunan yang berkelanjutan. Karena program ini masih bersifat proyek pemerintah sehingga pelaksanaannya tergantung dari turunnya anggaran dari pemerintah, sehingga kegiatan hanya berjalan beberapa bulan. Pengawasan dan pendampingan pokmas yang tidak optimal telah berdampak terhadap kegagalan beberapa program di lapangan.

Sistem perekrutan LSM dan tenaga pendamping yang profesional untuk mendukung program Coremap II relatif sulit dilaksanakan, karena terbatasnya LSM yang memiliki sumber daya yang memadai untuk pendampingan di lapangan.

Sistem kontrak antara PIU dengan LSM untuk tenaga pendamping dengan waktu terbatas menyebabkan kecenderungan keberlanjutan terputus. Hal ini karena pendampingan tidak dapat dilaksanakan secara optimal, karena fasilitator jarang berada di lapangan. Selain itu sebagian

fasilitator kurang memahami program Coremap yang selanjutnya akan menyulitkan dalam pengembangan program Coremap di masyarakat.

Untuk melihat secara keseluruhan, implementasi dan masalah yang dihadapi program COREMAP II di kawasan Pulau Tambelan dapat dilihat pada matriks di bawah ini.

Tabel 2.1.

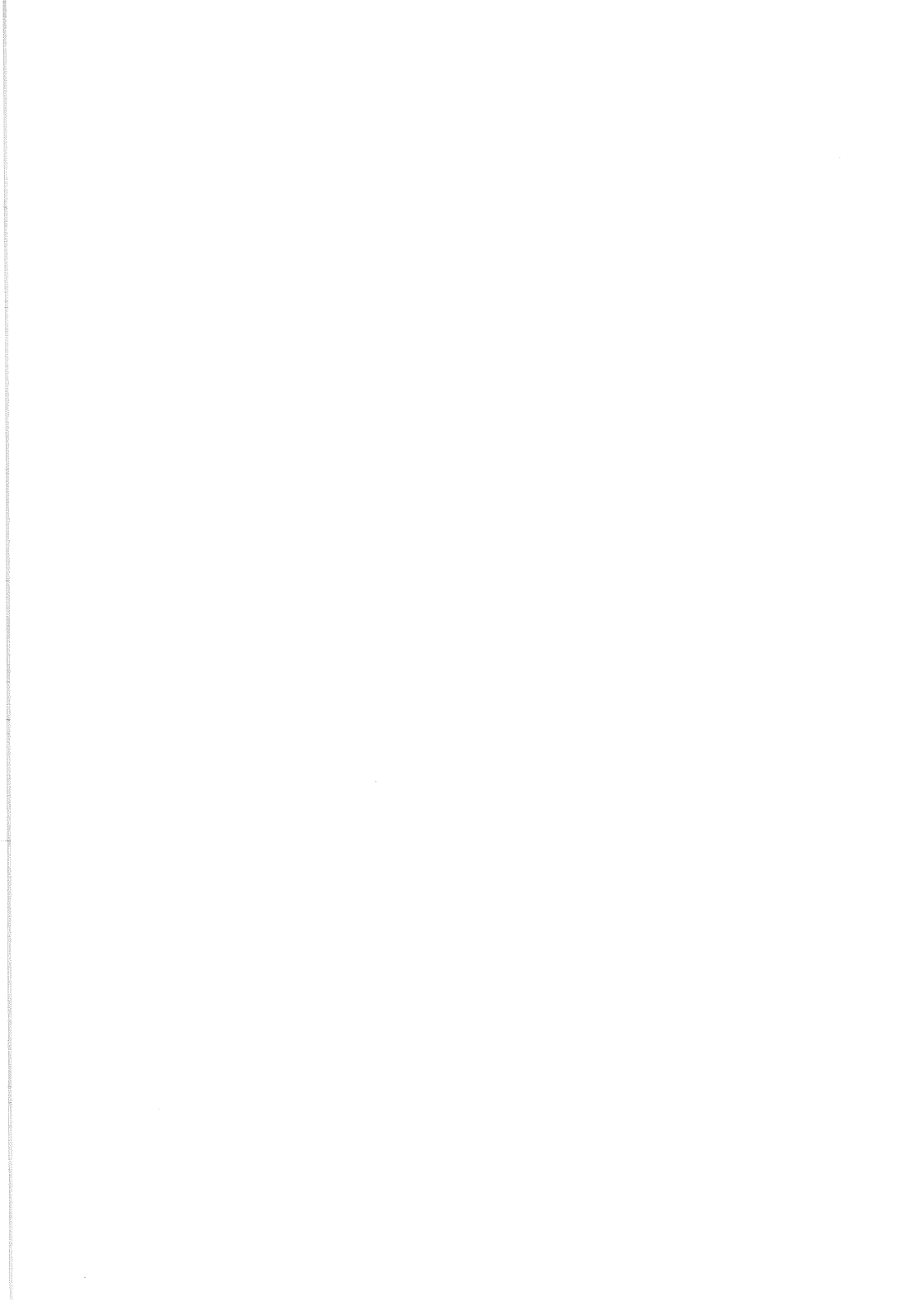
Pelaksanaan Kegiatan Pokmas Program COREMAP II (MPA) di Kawasan Pulau Tambelan Kondisi dan Permasalahan Tahun 2008/2009

No	Nama Pokmas	Kegiatan/program	Lokasi/Desa	Dana (000)	Kondisi	Permasalahan
1	Karang Laut	KJT	Kp. Hilir	90.000	Berjalan	Sulit cari pakan alami, uang pakan tidak cukup, pertumbuhan lambat, ikan banyak yang mati
2	Bintang Laut	KJT	Teluk Sekuni	90.000	Berjalan	Uang pakan tidak cukup, perubahan cuaca ikan banyak yang mati, pertumbuhan ikan lambat
3	Meruwan	KJT	Kp. Melayu	90.000	Berjalan	Pertumbuhan lambat, uang pakan tidak cukup, cari pakan alami sulit, harga jual rendah, jadwal tugas sulit dibuat

No	Nama Pokmas	Kegiatan/program	Lokasi/Desa	Dana (000)	Kondisi	Permasalahan
4	Napoleon	KJT	Batu Lepak	90.000	Berjalan	Konflik Pokmas dengan LPSTK, Konflik Interen LPSTK, uang dibawa bendahara LPSTK, dikelola sendiri oleh Ketua LPSTK, pakan cari dari alam
5	Karang Payung	Bengkel	Kp. Hilir	89.000	Berjalan	Ongkos bengkel banyak yang dihutang, sebagian besar anggota tidak aktif
6	Melur	Pengolahan ikan Kerupuk Atom	Kp. Hilir	Tidak ada data	Berjalan	Bahan baku langka, konflik dengan anggota, terhenti sementara
7	Mawar	Pengolahan Kerupuk Ikan	Batu Lepak	Tidak ada data	Berjalan	Bahan baku langka, terhenti sementara
8	Anggrek	Kerupuk Ikan	Teluk Sekuni	Tidak ada data	Berjalan	Bahan baku langka, terhenti sementara
9	Sri Manggirang	Pengolahan ikan	Kp. Melayu	Tidak ada data	Berjalan	Bahan baku langka, terhenti sementara
10	Matahari	Pengolahan Kepiting bakau	Teluk Sekuni	42.500	Berjalan	Terhenti sementara, bahan baku langka, dibeli tanpa klasifikasi, dibayar dengan system konsinyasi, keuntungan kecil

No	Nama Pokmas	Kegiatan/ program	Lokasi/ Desa	Dana (000)	Kondisi	Permasalahan
11		Pengolah kepinging	Batu Lepuk	42.500	Tidak Jalan	Uang disimpan LPSTK, peralatan disimpan LPSTK, diselamatkan PIU Rp19.360.000,-, bahan baku langka
12	Pokwas mas		4 desa di atas	Tidak ada data	Tidak Jalan	Konstruksi perahu tidak sesuai dengan kondisi perairan. DPL belum ada tanda pembatas, pendekatan administrative lebih dikedepankan, bukan pada pendekatan kawasan, memicu konflik
13	Sanitasi lingkungan		4 desa di atas	Tidak ada data	3 desa Jalan, 1 desa macet	Kebiasaan buang sampah dilaut masih banyak dilakukan masyarakat, 1 desa tidak memiliki TPA
14	Pondok Informasi		2 desa	Tidak ada data	1 berfungsi, dan 1 tidak berfungsi	Lokasi tidak cocok, jauh dari permukiman nelayan, Kasus T. Sekuni pengadaan barang kualitas rendah, diduga ada penyimpangan dalam pengadaan barang

Sumber : Hasil Kajian dan Wawancara dengan Pengurus LPSTK, Pokmas dan Kepala Desa di kawasan Pulau Tambelan pada Juni 2009.



BAB III

PENGETAHUAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KEGIATAN COREMAP

3.1. PENGETAHUAN MASYARAKAT

Sebagai masyarakat yang tinggal di daerah pantai, terumbu karang merupakan suatu yang tidak asing bagi masyarakat Tambelan. Hal itu karena mata pencarian mereka banyak berhubungan dengan laut, dan terumbu karang banyak ditemui di laut dekat desa. Menurut pengetahuan masyarakat, terumbu karang itu lokasinya di semua tempat yang dekat dengan pulau-pulau. Terumbu karang yang dekat dengan pulau diberi nama sesuai dengan nama pulau, dan yang jauh dari pulau diberi nama khusus, seperti karang kain, karang kapal, karang payung, karang mayat, karang tengah dan sebagainya. Adapun terumbu karang yang terbesar adalah yang mereka sebut Karang Laut dan Karang Tengah, di dekat Pulau Wie. Pengetahuan yang dikaji di bawah ini menyangkut pengetahuan dan partisipasi terhadap kegiatan Coremap

Program kegiatan COREMAP II, dilakukan secara bertahap, antara lain tahap rintisan, tahap persiapan, dan tahap implementasi. Masing-masing tahap memiliki kegiatan yang spesifik. Pada tahap rintisan, kegiatan banyak disibukkan pada aktivitas pertemuan warga, dimana pada pertemuan tersebut petugas fasilitator desa melakukan penyuluhan, untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan arti penting kegiatan pelestarian terumbu karang dilakukan. Kegiatan lainnya adalah pembentukan LPSTK dan sejumlah pokmas sebagai wadah berlangsungnya kegiatan. Pada tahap itu juga penelitian mengenai kondisi perairan P. Tambelan, potensi dan pemanfaatan, dilakukan guna mengidentifikasi potensi, permasalahan dan kebutuhan masyarakat setempat. Semua hasil temuan penelitian tersebut dimuat dalam buku

RPTK, sebagai acuan dasar dalam merumuskan rencana program aksi yang akan dilakukan.

Sesungguhnya masih ada beberapa tahap lagi yang harus dilalui untuk sampai pada pelaksanaan program aksi, yakni melakukan studi kelayakan pada setiap item kegiatan, dan tahap pembahasan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat luas, demi sempurnanya penyusunan program aksi. Tampaknya ke dua tahap akhir telah dilewati, dan pihak pelaksana memandang cukup dengan menggunakan buku RPTK sebagai acuan kerja, dan mendapat pengesahan setelah melalui pembahasan team konsultan yang ditunjuk.

Pada tahun berikutnya 2007 – 2008, kegiatan telah memasuki pada tahap persiapan. Kegiatannya berupa penyusunan program aksi dan pembahasan proposal yang masuk ke DKP. Pada tahapan ini, proposal diseleksi menyangkut kelayakan teknis dan ekonomis. Sesungguhnya program COREMAP sudah direncanakan lebih dahulu oleh pihak PIU dengan melibatkan beberapa tenaga ahli dari LSM, dan konsultan ahli. Karena itu, seleksi proposal hanya bersifat formalitas saja. Kesan bahwa program kegiatan ini dilakukan dengan pendekatan yang bersifat bottom-up cukup kuat, pada hal yang sesungguhnya terjadi adalah aspirasi dan partisipasi semu yang dibangun melalui rekayasa sosial. Masyarakat termotivasi dan termobilisasi lewat iming-iming pemberian bantuan material sesaat, dan tumbuhnya ekspektasi akan perubahan tingkat pendapatan ekonominya ada bila kegiatan yang dilakukan berhasil.

Masih pada tahap persiapan, setelah semua proposal diseleksi, maka tiba saatnya pihak pelaksana memberikan pembekalan dengan melakukan serangkaian kegiatan penyuluhan, dan kepada para peserta dikelompokkan menurut bidang kegiatannya masing-masing.

Tahap berikutnya adalah tahap realisasi kegiatan, yang dalam realitasnya banyak muncul masalah yang tidak diduga sebelumnya. Semestinya pada tahap ini aktivitas pendampingan dilakukan secara intensif dan berkesinambungan, agar permasalahan yang muncul dapat diketahui

dan ditangani sejak dini. Namun demikian, terakumulasinya berbagai masalah, membuat LPSTK dan pokmas tidak dapat bekerja secara optimal. Kondisi seperti ini tentu dapat berpengaruh terhadap sikap responden. Responden yang sebenarnya mengetahui program kegiatan COREMAP, dengan melihat kondisi yang ada, dapat bersikap sebaliknya menjadi acuh dan tidak peduli dengan kegiatan survei ini, dan responden akan menjawab secara asal-asalan.

Pada tabel di bawah ini akan menggambarkan secara kuantitatif yang berkaitan dengan pengetahuan, keterlibatan, dan pengakuan tentang manfaat kegiatan COREMAP sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Pengetahuan Masyarakat Terhadap Program Kegiatan COREMAP 2009

No	Jenis Kegiatan	Menga- tahui	%	Tidak Tahu	%
1	Keberadaan COREMAP	120	100	-	-
2	Penyelamatan TK	120	100	-	-
3	Peningkatan pengetahuan dan kesadaran penyelamatan TK	114	95	6	5
4	Pengawasan pesisir	92	76,7	28	23,3
5	Pembentukan LPSTK	86	71,7	34	28,3
6	Pelatihan UEP	63	52,6	57	47,5
7	Pendampingan UEP	60	50	60	50
8	Penyusunan RPTK	36	31,7	81	67,5
9	Pokmas ekonomi produktif	95	62,5	45	37,5
10	Pokmas jender	68	56,7	52	43,3
11	Pemberian dana bergulir	77	54,2	48	35,8
12	Pelatihan	54	45	65	54,2
13	Budi daya KJT	115	96,8	4	3,3
14	Pengolahan hasil laut	97	80,8	22	18,3

Sumber : Data Primer Survei Aspek Sosial Terumbu karang Indonesia, 2005 dan 2009.

Pada tabel di atas memperlihatkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat terhadap kegiatan COREMAP cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh kelembagaan yang dibentuk COREMAP telah dapat berjalan cukup baik. Selain itu juga ditentukan oleh berbagai faktor kondisi masyarakat setempat, hal ini dapat dibayangkan, dalam sebuah pulau kecil, terdapat 4 LPSTK dalam 4 wilayah administrasi desa. Sebagai kawasan permukiman yang padat, memiliki corak interaksi sosial yang erat, bersifat personal, yang ditandai dengan corak hubungan yang bersifat tatap muka (*face to face*) dengan tingkat intensitas yang tinggi, memungkinkan setiap informasi dan setiap bentuk aktivitas yang dilakukan dengan mudah akan tersebar ke permukiman dengan baik. Namun demikian, meskipun sebagian besar masyarakat mengetahui adanya kegiatan COREMAP, tetapi mengingat terbatasnya volume kegiatan, menyebabkan tidak semua orang dapat terlibat dalam kegiatan COREMAP.

Pengetahuan masyarakat terhadap penyelamatan terumbu karang maupun tingkat kesadaran masyarakat untuk menyelamatkan terumbu karang cukup tinggi. Hal ini karena penyampaian informasi pentingnya terumbu karang bagi kegiatan kenelayan, sebagai tempat pemijahan ikan pada umumnya telah dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat sehingga penyelamatan dan perlindungan terhadap terumbu karang harus dilakukan oleh masyarakat. Sebagian besar responden mengetahui bahwa terumbu karang merupakan tempat ikan bertelur dan mencari makan. Sementara itu, pengetahuan pembentukan LPSTK serta pengawasan terhadap pesisir, termasuk DPL juga memperlihatkan hal yang baik. Begitu pula pengetahuan masyarakat terhadap kegiatan KJT dan pengolahan hasil laut juga baik. Hal ini karena masyarakat pada umumnya sudah mengetahui mengelola pembesaran ikan dengan model keramba jaring apung. Sedangkan pengetahuan masyarakat mengenai pengolahan hasil laut telah diperoleh secara turun temurun antara lain pembuatan kerupuk ikan dan membuat ikan asin.

Pengetahuan masyarakat terhadap penyusunan RPTK, relatif kecil, sebagian besar masyarakat tidak mengetahui kegiatan penyusunan RPTK, hal ini kemungkinan penyusunan RPTK tidak melibatkan masyarakat, hanya pengurus LPSTK dan konsultan. Pengetahuan masyarakat terhadap pendampingan kegiatan UEP menurut data di atas relative rendah. Hal itu karena fasilitator dan PPL yang seharusnya mendampingi pokmas sering tidak berada di lokasi, sehingga masyarakat tidak mengetahui keberadaan fasilitator dan PPL tersebut.

3.2. PARTISIPASI MASYARAKAT

Seaimana terlihat pada tabel di atas yang menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap kegiatan COREMAP cukup baik, kemudian bagaimana dengan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan COREMAP saat ini. Keterlibatan masyarakat ditunjukkan dengan keikutsertaan mereka dalam kegiatan pokmas maupun pengawasan SDL (konservasi). Untuk mengetahui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan COREMAP dan manfaat kegiatan COREMAP dapat dilihat pada tabel 3.2. sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan COREMAP

No	Jenis Kegiatan	Terlibat	%	Tidak Terlibat	%
1	Peningkatan pengetahuan TK	12	10	102	85
2	Pengawasan pesisir	7	5,8	85	70,6
3	Pembentukan LPSTK	10	8,3	76	63,3
4	Pelatihan UEP	7	5,8	56	45,8
5	Pendampingan UEP	4	3,3	56	46,7
6	Penyusunan RPTK	7	7,5	31	25,8
7	Pokmas konservasi	4	3,3	71	59,2
8	Pokmas UEP	9	7,5	65	54,2
9	Usaha Tdk Merusak TK	26	21,7	87	72,5
10	Pemberian dana bergulir	9	7,5	63	52,5
11	Pelatihan	8	6,7	43	35,8
12	Budi daya	15	17,5	94	78,3
13	Pengolahan hasil laut	8	6,7	80	66,7

Sumber : Data Primer Survei BME Aspek Sosial Terumbu karang Indonesia, 2009.

Dari tabel di atas memperlihatkan keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan COREMAP sangat kecil rata-rata di bawah 10 persen, kecuali keterlibatan masyarakat pada kegiatan yang tidak merusak terumbu karang. Kecilnya keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan COREMAP karena mulai adanya ketidakpercayaan terhadap kegiatan COREMAP yang dapat direpresentasikan dengan tidak meratanya dan transparansinya pengelolaan (manajemen) anggaran, misalnya pemberian dana bergulir atau pelatihan UEP. Pelatihan UEP yang menunjuk orang tertentu, terutama yang dekat dengan pengurus,

sehingga menimbulkan konflik kepentingan diantara anggota. Selain itu sebagian anggota pokmas yang kurang aktif dengan alasan karena keberhasilannya perlu waktu yang lama, karena itu mereka pergi melaut untuk mencari ikan untuk menghidupi keluarga sehingga keterlibatan dalam kegiatan COREMAP semakin terbatas. Alasan lain kecilnya keterlibatan pemberian dana bergulir tidak merata, hanya melalui pokmas sehingga ada kecenderungan malasnya masyarakat terlibat dalam kegiatan pokmas.

Keterlibatan masyarakat yang relative besar diantaranya adalah dalam usaha kegiatan yang tidak merusak terumbu karang. Hal ini kelihatan masyarakat memahami bahwa pentingnya kegiatan kenelayanan yang tidak merusak terumbu karang antara lain nelayan tidak menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang dapat merusak terumbu karang misalnya menggunakan bom dan potassium sianida serta penggunaan alat tangkap pukat harimau (*trawl*) Selain itu perlu mempertahankan keberadaan terumbu karang sebagai tempat pemijahan ikan agar supaya terjaganya populasi ikan sehingga nelayan dapat menangkap ikan di sekitar kawasan terumbu karang. Untuk memperkuat larangan penggunaan alat tangkap yang merusak terumbu karang pemerintah desa masing-masing mengeluarkan peraturan desa yang berisi larangan penggunaan alat tangkap tersebut.

Selanjutnya sejauhmana kegiatan COREMAP bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi nelayan. Manfaat kegiatan COREMAP dalam kegiatan masyarakat dapat dilihat dalam tabel 3.3. sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Manfaat Kegiatan COREMAP

No	Jenis Kegiatan	Bermanfaat	%	Tidak Bermanfaat	%
1	Usaha tidak merusak TK	25	20,8	95	79,2
2	Pemberian dana bergulir	8	6,7	112	93,5
3	Pelatihan	7	5,8	1	0,8
4	Budi daya	11	9,2	3	2,5
5	Pengolahan hasil laut	5	4,2	2	1,7

Sumber : Data Primer Survei Aspek Sosial Terumbu karang Indonesia, 2009.

Seperti halnya dengan keterlibatan masyarakat, manfaat kegiatan COREMAP yang bermanfaat bagi masyarakat adalah kegiatan usaha yang tidak merusak terumbu karang. Hal ini karena terumbu karang sangat penting bagi kehidupan nelayan, karena terumbu karang merupakan tempat pemijahan ikan dan tempat berkembangnya udang jenis lobster. Apabila terumbu karang tidak mengalami kerusakan, nelayan dapat menangkap ikan di sekitar kawasan tersebut. Selain itu manfaat kegiatan yang lain antara lain budi daya ikan yang dapat direpresentasikan dengan pembesaran jenis ikan kerapu melalui keramba jaring tancap. Kegiatan ini sangat penting untuk masa mendatang yang diharapkan dapat menambah pendapatan rumah tangga nelayan, selain dari kegiatan mencari ikan di laut, meskipun kegiatan budi daya tersebut belum dapat menghasilkan uang, bahkan sampai saat ini masih merugi karena budi daya tersebut belum dapat dijual, masih memerlukan waktu untuk dapat menghasilkan uang. Manfaat kegiatan yang lainnya adalah pemberian dana bergulir pada pokmas maupun pada perorangan. Pemberian dana bergulir kepada pokmas dapat menjadi modal usaha untuk mengembangkan usaha mata pencaharian alternatif, seperti mengembangkan usaha produksi kerupuk ikan atau kerupuk atom yang dapat memberi keuntungan setiap anggota pokmas selanjutnya membantu meningkatkan pendapatan rumah tangga

nelayan. Pelatihan tentang MPA juga memberi manfaat yang besar terhadap masyarakat, karena dengan pelatihan dapat meningkatkan ketrampilan yang dapat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan, misalnya teknis pembuatan kerupuk yang higienis atau teknik pengepakan.

Sepintas, dengan membaca tabel-tabel di atas membuat orang mudah terkecoh dengan memberikan gambaran dengan cara menggeneralisir bahwa tingkat partisipasi masyarakat dan manfaat program kegiatan COREMAP rendah. Karena itu dalam membaca tabel tersebut di atas harus mempertimbangkan adanya kemungkinan bahwa responden yang diwawancarai tidak terdaftar sebagai penerima bantuan maupun terlibat menjadi anggota pokmas.

Kesulitan membaca tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan COREMAP dapat dijumpai dengan menggunakan indikator kualitatif. Sehubungan dengan hal tersebut patut dikemukakan pernyataan Boyle (1981) antara lain (1) partisipasi warga komunitas dalam suatu kegiatan dapat dianggap sebagai suatu upaya untuk mendidik warga komunitas tersebut. Hal ini penting karena akan meningkatkan pengertian, konsensus, rasa tanggungjawab, dan keputusan yang bijaksana; (2) Partisipasi itu sendiri merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai. Karena dengan munculnya partisipasi aktif yang luas merupakan indikasi bahwa suatu program kegiatan diterima kehadirannya di tengah masyarakat; (3) Partisipasi itu sendiri merupakan suatu aktivitas yang digalakkan untuk mendorong lahirnya inisiatif, kreatifitas, kepercayaan diri, dan lahirnya swadaya masyarakat; (4) keterlibatan masyarakat akan dapat memberikan informasi yang lebih akurat tentang keinginan, kebutuhan masyarakat setempat, dan untuk menghindari salah konsepsi para petugas.

Mengacu pada pendapat tersebut, menunjukkan bahwa pelaksanaan program kegiatan COREMAP masih jauh dari indikator tersebut. Realitas program kegiatan COREMAP di lapangan belum mampu menggali inisiatif, lahirnya kreatifitas, dan belum mampu menggali swadaya masyarakat. Demikian juga konsensus dan rasa tanggungjawab

masyarakat masih rendah, terbukti dengan banyaknya anggota pokmas yang tidak aktif, mengundurkan diri, bahkan kepengurusan LPSTK tidak berjalan lancar dan terancam bubar. Kecenderungan yang akan terjadi bila kegiatan ini terus berlanjut justru akan menciptakan ketergantungan masyarakat, dan bukan sebaliknya.

3.3. PROGRAM KEGIATAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA LAUT

Perairan sekitar P. Tambelan, memiliki potensi sumber daya laut yang melimpah, berbagai jenis ikan karang terdapat di perairan ini. Beberapa jenis ikan dan udang yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti ikan kerapu, ikan bawal, kakap merah, tenggiri, alu-alu, udang lobster dan kepiting bakau terdapat di perairan ini. Namun demikian adanya eksploitasi sumber daya laut yang tinggi, hadirnya nelayan dari luar kawasan yang mengoperasikan pukat harimau (*trawl*) dan bom, serta menggunakan racun potassium dan bubu karang, telah menghancurkan ekosistem terumbu karang. Dampaknya, menimbulkan kelangkaan dan semakin berkurangnya populasi ikan di kawasan pulau Tambelan. Hal ini ditengarai dengan semakin sulit mendapatkan ikan dan jauhnya lokasi penangkapan ikan.

Hasil tangkapan ikan kerapu, udang lobster, dan kepiting bakau, pada umumnya langsung dijual kepada pedagang penampung di camp-camp setempat. Di P. Tambelan terdapat empat penampung ikan yang tergolong besar milik etnis Cina. Beberapa jenis ikan lain seperti ikan alu-alu dan tenggiri dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan baku dasar pembuatan kerupuk ikan. Usaha industri rumah tangga skala kecil pembuatan krupuk ikan sudah cukup berkembang di P. Tambelan. Untuk lebih meningkatkan usaha ini menghadapi kendala antara lain keterbatasan ketersediaan bahan baku pembuatan kerupuk ikan. Selain itu, ikan jenis tersebut keberadaannya bersifat musiman, sehingga tidak bisa diperoleh secara terus menerus.

Produksi kerupuk ikan pada umumnya dipasarkan di warung-warung dan kios setempat atau dibawa keluar daerah sebagai oleh-oleh, yang

biasanya dipesan oleh pegawai yang kebetulan sedang melakukan kunjungan dinas ke P. Tambelan, dan sebagian dikonsumsi sendiri. Kegiatan COREMAP memiliki rencana (wacana) membantu memasarkan produksi kerupuk ikan di pasar swalayan yang ada di Kota Tanjungpinang, tetapi rencana tersebut kurang direspons oleh masyarakat, karena takut konsumen yang telah menjadi langganannya kecewa. Keberatan lain yang disampaikan karena pembayaran hasil produksinya dibayar dengan sistem konsinyasi yang justru akan menimbulkan kesulitan bagi pengusaha kecil, karena keterbatasan modal.

Untuk lebih meningkatkan nilai tambah ekonomis dan segi higienis produksi krupuk ikan, kegiatan COREMAP telah memberikan pelatihan dan bantuan modal usaha kepada sejumlah pokmas wanita (jender) yang ada di kawasan Tambelan.

Pemanfaatan sumber daya laut lainnya yang dianggap dapat mengancam ekosistem terumbu karang adalah kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap bubu. Ada dua jenis bubu, yaitu bubu karang dan bubu di laut dalam. Bubu karang dioperasikan dengan menggunakan pemberat dan menjepit atau dengan menindih bubu dengan batu, dipasang dipermukaan terumbu karang atau gosong-gosong karang (lorong-lorong karang). Praktik penangkapan ikan yang bersifat destruktif lainnya adalah dengan menggunakan racun potassium, Kecuali itu aktivitas pencurian ikan oleh kapal asing juga marak di perairan ini. Masyarakat nelayan P. Tambelan juga sudah terbiasa melakukan budi daya ikan kerapu dengan menggunakan keramba secara kecil-kecilan yang diletakkan di bawah kolong-kolong rumah panggung. Bibit ikan kerapu diperoleh dengan cara memasang bubu di perairan dekat pantai. Praktik "budi daya" seperti ini yang kemudian dikembangkan menjadi budi daya ikan kerapu dengan sistem Keramba Jaring Tancap (KJT) melalui program kegiatan COREMAP.

Sumber daya laut lain yang bersifat endemik di perairan P. Tambelan adalah penyu sisik dan penyu hijau. Untuk pelestarian satwa langka tersebut, telah dilakukan penangkaran penyu laut di ke dua lokasi yakni

Pantai Desa Batu Lepuk dan Perairan Pantai Desa Kampung Hilir. Kendatipun satwa ini dilindungi dan sudah ada larangan penangkapan dan perdagangan telur penyu, kenyataannya pengambilan dan perdagangan telur penyu dilakukan secara terbuka dan terang-terangan. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kepedulian masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap upaya pelestarian lingkungan, termasuk usaha penangkaran penyu hijau dan sisik.

BAB IV

PERUBAHAN PENDAPATAN

Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah, salah satunya adalah indikator sosial ekonomi. Indikator sosial ekonomi khususnya pendapatan dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan Coremap. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga, terutama pendapatan rumah tangga nelayan dan per kapita, dengan asumsi bahwa semakin tinggi pendapatan rumah tangga ada kecenderungan rumah tangga tersebut semakin sejahtera. Selain itu pendapatan rumah tangga nelayan juga dipengaruhi oleh musim (gelombang)

Masyarakat Pulau Tambelan sebagian besar pendapatannya sangat tergantung pada kegiatan kenelayanan, potensi sumber daya laut, kepemilikan alat tangkap dan musim. Sehingga kepemilikan alat tangkap dan perubahan musim sangat berpengaruh terhadap perubahan tingkat pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pekerjaan utama, status pekerjaan dan jumlah anggota rumah tangga yang bekerja juga mempengaruhi tingkat pendapatan rumahtangga. Secara eksplisit dikemukakan bahwa salah satu indikator keberhasilan COREMAP adalah pendapatan dan jumlah penduduk (perorangan) yang menerima pendapatan dari kegiatan ekonomi yang berbasis terumbu karang dan kegiatan (mata pencaharian) alternatif lain sehingga mengalami kenaikan 10 persen pada akhir kegiatan COREMAP. Indikator lain untuk mengukur tingkat keberhasilan program adalah sekitar 70 persen masyarakat nelayan dapat merasakan dampak adanya kegiatan COREMAP terhadap tingkat kesejahteraan dan status sosial ekonomi.

Perubahan pendapatan rumah tangga, termasuk rumah tangga nelayan dengan melihat perbandingan rumah tangga pada tahun 2005 dan 2009. Perubahan pendapatan rumah tangga akan melihat perubahan rata-rata pendapatan rumah tangga, pendapatan per kapita, perubahan pendapatan rumah tangga nelayan dan pendapatan menurut musim. Perubahan tersebut dapat digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan kegiatan COREMAP. Perubahan pendapatan rumah tangga akan memperhatikan laju inflasi di daerah setempat.

4.1. PENDAPATAN PENDUDUK

Dalam kurun waktu lima tahun telah terjadi peningkatan rata-rata pendapatan rumah tangga yang sebesar 6,40 persen di kawasan Kecamatan Tambelan. Peningkatan pendapatan ini kelihatan lebih tinggi/lebih rendah dibandingkan dengan inflasi daerah (Pekanbaru, Riau) sebesar 6.32 persen pada tahun 2006 dan 7.53 pada tahun 2007. Adanya kenaikan pendapatan yang lebih rendah dengan tingkat inflasi daerah sebenarnya rumah tangga tersebut sebenarnya tidak mengalami kenaikan pendapatan tetapi justru semakin menurun pada tahun 2009. Namun demikian apabila melihat pendapatan maksimum dan minimum semakin memperlihatkan adanya kesenjangan tingkat pendapatan yang sangat tinggi antara pendapatan minimum dan pendapatan maximum sehingga menunjukkan adalah masalah pemerataan pendapatan antar wilayah maupun antar desa. Hal ini memperlihatkan bahwa peningkatan dan perubahan pendapatan hanya dinikmati sebagian penduduk yang memiliki akses terhadap sumber daya alam.

Untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat, diantaranya dengan melihat rata-rata pendapatan rumah tangga dan pendapatan per kapita. Pendapatan rata-rata rumah tangga merupakan pendapatan yang diterima oleh semua anggota rumah tangga yang bekerja. Sedangkan pendapatan per kapita adalah pendapatan total penduduk yang bekerja dibagi dengan seluruh jumlah penduduk. Menurut data rata-rata

pendapatan rumah tangga dan per kapita dapat dilihat pada tabel di bawah sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Rata-rata pendapatan Rumah tangga dan per kapita kawasan Tambelan 2005 dan 2009.

No	Jenis Pendapatan	Nilai (Rp)		Perubahan
		2005	2009	
1	Pendapatan per kapita	271.779,0	267.774,8	-1,47
2	Rata-rata pendapatan RT	1.083.017,583	1.152.089,58	6,37
3	Median	696.666,66	919.166,66	31,93
4	Pendapatan Minimum RT	24.000,0	46.000	91,66
5	Pendapatan Maksimum RT	7.428.333,33	7.850.000,0	5,67

Sumber : Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia 2005 dan 2009.

Data di atas memperlihatkan bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga terdapat kenaikan pada tahun 2009 dibandingkan dengan tahun 2005, meskipun kenaikannya tidak terlalu besar. Kenaikan rata-rata pendapatan tersebut karena ada beberapa faktor diantaranya rumah tangga mendapat penghasilan dari kegiatan proyek P3DK (pembangunan fisik), PNPM Mandiri dan bantuan BLT. Selain itu kemungkinan memperoleh pendapatan dari penjualan hasil pertanian seperti kelapa (kopra), kerupuk ikan dan perdagangan serta pendapatan dari pegawai negeri sipil. Kenaikan pendapatan ini kemungkinan bukan disebabkan oleh hasil tangkapan ikan, karena pada saat penelitian hasil tangkapan ikan nelayan sangat sedikit, bahkan kadang – kadang nelayan

tidak memperoleh tangkapan yang selanjutnya berdampak dengan semakin berkurangnya pendapatan rumah tangga, terutama rumah tangga nelayan.. Sementara itu kegiatan KJT yang dibiayai COREMAP belum menghasilkan keuntungan, karena kegiatan pembesaran ikan (KJT) baru dimulai sekitar lima bulan yang lalu. Untuk dapat menghasilkan keuntungan pemeliharaan ikan kerapu memerlukan waktu sekitar 10 bulan agar supaya bobot ikan mencapai 7-8 ons sehingga dapat dijual dengan harga yang menguntungkan sehingga dapat meningkatkan pendapatan nelayan.

Selain itu, kegiatan pengolahan kepiting bakau juga belum menghasilkan keuntungan yang memadai, hasil penjualan baru sekedar untuk membayar anggota pokmas yang terlibat dalam pengolahan kepiting. Sehingga dari penjualan kepiting belum mampu meningkatkan pendapatan nelayan yang dikembangkan COREMAP. Belum adanya keuntungan yang memadai, karena kesulitan dan terbatasnya bahan baku kepiting bakau, padahal usaha ini masih menjanjikan dapat memperoleh keuntungan yang lumayan yang dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga nelayan. Apabila melihat pendapatan per kapita memperlihatkan terjadinya penurunan pada tahun 2009 dibandingkan pada tahun 2005. Penurunan pendapatan tersebut wajar, karena kegiatan nelayan melaut relatif sulit memperoleh penghasilan yang memadai, karena ikan yang diperoleh jumlahnya relative sedikit dan populasi ikan mulai menurun sehingga berpengaruh terhadap pendapatan perorangan/nelayan. Selain itu alat tangkap yang dimiliki nelayan pada umumnya masih sangat sederhana seperti pancing sehingga ikan yang diperoleh juga jumlahnya tidak optimal. Faktor lain adalah perahu motor yang dimiliki nelayan memiliki kekuatan terbatas 5-10 PK sehingga wilayah tangkap juga terbatas. Pendapatan maximum tahun 2009 dibandingkan tahun 2005 menunjukkan kenaikan yang tidak terlalu besar, sekitar Rp.400.000,-.

Kenaikan pendapatan rumah tangga tersebut ada beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain rumah tangga memperoleh pendapatan dari proyek pemerintah yang terdapat di Kecamatan Tambelan yaitu PNPM

Mandiri dan P3DK (pembangunan fisik). Selain itu adanya anggota rumah tangga (ART) yang terlibat dalam kegiatan proyek tersebut sehingga total pendapatan rumah tangga menjadi besar. Peningkatan pendapatan juga berasal dari anggota rumah tangga yang menjadi PNS (guru) dan memiliki penghasilan lain dari hasil kebun dan perdagangan (warung/kedai). Sebaliknya pendapatan per kapita memperlihatkan penurunan pada tahun 2009 dibandingkan tahun 2005, bahkan negatif. Penurunan pendapatan per kapita kemungkinan adanya penurunan pendapatan dari kegiatan kenelayanan, hasil kebun yang menurun atau mereka tidak memiliki pendapatan dari luar kenelayanan. Sedangkan pendapatan minimum baik rumah tangga maupun per kapita memperlihatkan kenaikan, meskipun tidak terlalu besar.

4.1.1. Pendapatan Rumah Tangga Nelayan dan Non Nelayan.

Untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat nelayan diantaranya dengan melihat pendapatan rumah tangga nelayan dan non nelayan. Sementara itu apabila membandingkan pendapatan rumah tangga nelayan dan non nelayan memperlihatkan terjadinya perubahan pendapatan sebagaimana terlihat dalam tabel 4.2 di bawah

Tabel 4.2

Rata-rata pendapatan rumah tangga nelayan dan non nelayan tahun 2005 dan 2009.

No	Jenis Pendapatan	Rumah Tangga Nelayan			Rumah Tangga Non Nelayan		
		2005	2009	Prbhn	2005	2009	Prbhn
1	Rata-rata	855.144,78	946.394,82	10,67	923.744	766.765,35	-16,99
2	Median	604.166,66	758.333,33	25,51	600.000,0	500.000,00	16,66
3	Minimum	24.000	36.833,33	53,47	33.333,33	6.250,00	81,24
4	Maksimum	6.445.000	6.770.833,33	5,05	6.308.333,33	5.000.000,00	20,73
	N	91	103		33	38	

Sumber : Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia 2005 dan 2009.

Menurut data pada tabel di atas memperlihatkan realitas gambaran pendapatan rumah tangga nelayan rata-rata pada tahun 2009 lebih

tinggi dibandingkan dengan pendapatan rumah tangga yang sama pada tahun 2005 dengan kenaikan sekitar 10 persen. Sebaliknya pendapatan rumah tangga yang memiliki pekerjaan non nelayan (pertanian, perdagangan) pada tahun 2009 lebih rendah minus (-16,99 Persen) dibandingkan pada tahun 2005. Kenaikan pendapatan rumah tangga nelayan pada tahun 2009 kemungkinan karena nelayan memiliki berbagai jenis alat tangkap yang datat digunakan untuk berbagai musim. Selain itu nelayan juga memiliki teknologi penangkapan ikan yang relative lebih baik dibandingkan tahun 2005, seperti menggunakan GPS dan perahu dengan kapasitas yang lebih besar. Para nelayan pada tahun 2009 kemungkinan menggunakan perahu motor dengan kekuatan mesin yang lebih besar antara 12-18 PK, sehingga dapat dipergunakan untuk melaut ke wilayah tangkap yang lebih luas, waktu melaut lebih lama sehingga hasil tangkapan lebih banyak dan pendapatannya juga lebih besar. Jumlah anggota rumah tangga yang bekerja sebagai nelayan, seperti sebagai ABK akan mempengaruhi besaran pendapatan rumah tangga nelayan tersebut. Namun demikian sampai saat ini, meskipun terlihat perubahan pendapatan, tetapi belum terlihat secara nyata, terutama yang berkaitan dengan adanya mata pencaharian alternatif, karena MPA yang diharapkan belum berjalan secara baik, bahkan ada pokmas yang tidak berjalan karena konflik antar anggota sehingga mengganggu pelaksanaan program MPA.

Mata pencaharian alternative yang dikembangkan pokmas berupa pembuatan kerupuk ikan dan atom yang terdapat di kawasan belum mampu menghasilkan keuntungan secara memadai yang dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga. Keuntungan yang diperoleh masih kecil rata-rata Rp. 50 – Rp 75 ribu rupiah. Penjualan kerupuk biasanya secara besar-besaran pada saat kapal “perintis” berlabuh di Tambelan, biasanya penumpang membeli untuk oleh-oleh yang dibawa ke Tanjung Pinang atau Pontianak.

Sementara MPA lain seperti perbengkelan belum berkembang karena baru dimulai pada bulan Juni 2009 dan belum menghasilkan keuntungan. Tetapi perbengkelan tersebut memiliki prospek ke depan

yang baik, karena banyak nelayan memperbaiki kerusakan mesin kapal ke bengkel tersebut, tidak lagi ke Tanjung Pinang atau Pontianak. Selain itu, adanya penjualan ikan hasil tangkapan, terutama ikan karang lebih mahal sehingga mempengaruhi kenaikan pendapatan dari kegiatan kenelayanan. Harga jual ikan tenggiri sangat tinggi, satu kilogram mencapai Rp 25.000,-, begitu pula harga ikan hidup tertentu (kerapu *tiger*) satu kilo dapat mencapai Rp. 90.000,- sehingga dari hasil tangkapan kedua jenis ikan karang tersebut memperoleh pendapatan yang cukup memadai. Selain itu hasil penjualan ikan asin, ke Pontianak dan Tanjung Pinang memperbesar pendapatan rumah tangga nelayan.

Sedangkan menurunnya pendapatan non nelayan, karena dipengaruhi menurunnya harga komoditas kopra dan lada yang merupakan hasil utama di luar kenelayanan di kawasan ini. Selain itu tanaman cengkeh belum menghasilkan karena masih belum berbunga dan harganya turun yang secara tidak langsung akan mempengaruhi pendapatan rumah tangga nelayan maupun non nelayan.

Adanya kegiatan Coremap dengan berbagai intervensi program, terutama menciptakan mata pencaharian alternatif (MPA) kiranya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya nelayan sehingga terdapat perubahan pendapatan rumah tangga nelayan dari tahun 2005 sampai dengan 2009. Sehingga masuknya kegiatan Coremap diharapkan dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga, terutama pendapatan rumah tangga nelayan. Mata pencaharian alternative yang dikembangkan berbagai pokmas (KJT, pembuatan kerupuk ikan, perbengkelan) yang terdapat di kawasan belum berkembang karena baru dimulai pada bulan Juni 2009 sehingga belum menghasilkan keuntungan secara memadai yang dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Distribusi pendapatan rumah tangga menurut kelompok pendapatan memperlihatkan adanya penurunan persentase. Penduduk yang mempunyai pendapatan kurang dari Rp. 500 ribu pada tahun 2009 menunjukkan sebesar 25 % dibandingkan pada tahun 2005 sebesar 36 %. Namun demikian perubahan pendapatan tersebut kelihatannya tidak terlalu

besar karena sedikit bergeser pada kelompok besaran 500 ribu-1 juta, yang masih termasuk kelompok penduduk penghasilan rendah, penduduk miskin karena masih di bawah garis kemiskinan sesuai dengan ukuran PBB sebesar 1 \$ perhari. Kelompok penduduk miskin tersebut pada umumnya terdiri dari nelayan tradisional, buruh angkut di pelabuhan, pekerja serabutan dan petani. Sementara itu juga terlihat adanya kenaikan jumlah penduduk yang mempunyai pendapatan antara 1,5 juta – 3 juta yang cukup besar pada tahun 2009 dibandingkan tahun 2005. Apabila memperhatikan tingkat inflasi Provinsi Riau sebesar 16 % pada tahun 2006, dapat dikatakan terdapat sedikit perubahan pendapatan pada kelompok penduduk pendapatan menengah ke atas. Adanya perubahan tersebut menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan rumah tangga hanya dinikmati oleh kelompok berpendapatan tinggi, sehingga semakin memperlebar kesenjangan pendapatan antara kelompok penduduk miskin dengan kaya.

Untuk mengetahui perubahan pendapatan rumah tangga setiap bulan dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.3.
 Persentase Pendapatan Rumahtangga tahun 2005-2009

No	Pendapatan	Tahun	
		2005	2009
1	< 500.000	36	25
2	500.000-1 juta	29	31.7
3	1 juta -1.5 juta	14	12.5
4	1.5 jt-2 juta	10	15.8
5	2 jt – 2.5 jt	2	9.2
6	2.5 jt – 3 jt	2	3.3
7	3 jt – 3.5 jt	3	0.8
8	> 3.5 jt	4	1.7
Total (N)		100 (100)	100 (120)

Sumber : Data Dasar Survei aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia 2005 dan 2009.

Dari tabel di atas memperlihatkan rumah tangga yang memiliki pendapatan kurang dari Rp 500.000,- pada tahun 2009 menurun

dibandingkan pada tahun 2005, sementara rumah tangga yang memiliki pendapatan antara 500 ribu – 1 juta menunjukkan kenaikan pada tahun 2009. Penurunan persentase rumah tangga tersebut (< 500.000,-) kemungkinan sebagian dari rumah tangga tersebut memperoleh pendapatan yang lebih baik karena keterlibatan kepala rumah tangga dan ART dalam berbagai proyek sehingga pendapatan menjadi meningkat. Begitu pula rumah tangga yang memperlihatkan kenaikan pendapatan karena keterlibatan/partisipasi mereka dalam berbagai proyek , terutama pembangunan fisik seperti PNPB, P3DK. Sementara itu rumah tangga yang mempunyai pendapatan 1,5 juta – 3,5 juta juga memperlihatkan kenaikan yang cukup signifikan, hal itu karena adanya anggota rumah tangga yang terlibat dalam proyek pembangunan fisik memiliki beberapa sumber pendapatan lain seperti memiliki pendapatan dari perdagangan (warung) dan pertanian. Selain itu, rumah tangga yang termasuk dalam kelompok tersebut biasanya mereka yang bekerja pada sektor jasa (perdagangan), dan pegawai negeri serta rumah tangga (nelayan) pemilik perahu mesin dengan berbagai jenis alat tangkap. Kombinasi pendapatan ART yang bekerja sehingga menjadikan total pendapatan rumah tangga menjadi cukup tinggi. Sementara rumah tangga lain yang hanya mempunyai pendapatan relative rendah karena jumlah ART yang bekerja juga kecil yang selanjutnya juga berdampak pada total pendapatan rumah tangga. Rumah tangga yang memiliki pendapatan tinggi, terutama rumah tangga nelayan kemungkinan bukan berasal dari kegiatan kenelayanan, karena sampai saat ini kegiatan kenelayanan yang mendapat bantuan dana dari Coremap (KJT, perbengkelan, kerupuk ikan, pengolahan kepiting) belum menghasilkan uang, karena baru mulai berjalan sekitar bulan April 2009.

4.1.2. Pendapatan Rumah Tangga Nelayan Menurut Musim

Masyarakat Tambelan memiliki empat jenis musim, namun dilihat dari keberadaan ikan di laut terdapat tiga siklus, yaitu musim banyak ikan, musim sedikit ikan dan musim pancaroba. Hal ini karena pendapatan nelayan sangat tergantung dari tangkapan ikan, Perbedaan musim

tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil tangkapan nelayan yang selanjutnya akan mempengaruhi tingkat pendapatan.

Dari hasil penelitian memperlihatkan adanya kenaikan pendapatan rumah tangga nelayan pada tahun 2009 dibandingkan tahun 2005 baik pendapatan rata-rata, maksimum maupun median. Peningkatan pendapatan dari kegiatan kenelayan kemungkinan dipengaruhi antara lain (1) terjadi peningkatan pendapatan dari kegiatan kenelayan karena pemilikan alat tangkap yang bervariasi, (2) modernisasi perahu motor dengan kekuatan yang lebih besar sehingga dapat melaut dengan waktu yang lebih lama dan jangkauan yang lebih luas; (3) mata pencaharian di luar sektor kenelayan membantu peningkatan total pendapatan rumah tangga nelayan, hal itu karena selain sebagai nelayan, sebagian memiliki kegiatan di luar sektor kenelayan seperti berkebun dan tukang serta membuat perahu.

Perkembangan pendapatan dari kegiatan kenelayan bervariasi berdasarkan musim gelombang lemah, pancaroba dan gelombang kuat (musim barat) (Tabel 4.4). Rata-rata pendapatan gelombang lemah atau banyak ikan pada tahun 2009 meningkat sekitar Rp. 400 ribu dibandingkan dengan tahun 2005. Begitu pula pada saat musim pancaroba maupun gelombang kuat atau sedikit ikan juga menunjukkan peningkatan pendapatan rata-rata sekitar Rp. 300 ribu. Peningkatan rata-rata rumah tangga nelayan pada saat gelombang lemah (banyak ikan) karena angin tidak kencang, nelayan dapat mencari ikan dan melaut dengan wilayah tangkap yang jauh dan waktu melaut juga relative lama. Teknologi dan kekuatan mesin perahu dapat mendukung nelayan menjelajah lokasi penangkapan ikan sehingga pada umumnya memperoleh hasil laut, terutama ikan karang cukup banyak. Kepemilikan alat tangkap yang bervariasi juga mendukung nelayan untuk mendapat hasil yang lebih banyak. Selain itu pada saat gelombang lemah jenis ikan tertentu (katamba) populasinya sangat banyak sehingga nelayan mudah menangkapnya dengan jaring.

Pada musim pancaroba dan musim sedikit ikan (musim barat) seperti diuraikan di atas memperlihatkan kenaikan. Namun demikian

pendapatan pada musim pancaroba dan sedikit ikan masih relatif kecil, bahkan masih di bawah garis kemiskinan. Rendahnya pendapatan tersebut karena pada saat musim angin barat nelayan tidak berani melaut, karena gelombang tinggi dan angin kencang dan kadang-kadang timbul badai yang membahayakan jiwa nelayan. Nelayan biasanya mencari ikan di pinggir pantai yang berdekatan dengan permukiman, ikan yang diperoleh hanya untuk makan dan sebagian dijual ke tetangga. Namun demikian pada musim angin barat ada jenis ikan tertentu (tongkol) yang jumlahnya cukup banyak, tetapi nelayan tidak mau ambil resiko sehingga pendapatan tetap kecil. Sementara pada musim pancaroba biasanya nelayan belum berani melaut, karena masih ada angin yang cukup kencang dan gelombang juga masih tinggi, hanya sesekali nelayan melaut. Pada musim ini biasanya juga ditandai dengan adanya beberapa rumah tangga nelayan yang mengalami kerugian karena hasil tangkapan mereka tidak dapat digunakan untuk menutup biaya operasional. Apabila nelayan tetap mengalami kerugian, rumah tangga tersebut dapat menutupi kebutuhan rumah tangga dari kegiatan ART di luar sektor perikanan atau berhutang pada tetangga atau warung.

Tabel 4.4.
Pendapatan Rumah Tangga Nelayan menurut gelombang tahun 2005 dan 2009.

No	Jenis Pdptan	2005			2009		
		B.Ikan (angin timur)	Pancaroba	Sedikit ikan (angin barat)	B.Ikan (angin timur)	Pancaroba	Sedikit ikan (angin barat)
1	Rata2	1.573.314	663.333	351.700	1.920.264,70	732.617	551.441
2	Median	900.000	400.000	237.000	1.600.000,00	420.000	355.000
3	Minimum	55.000	30.000	8.000	120.000,00	5.000	10.000
4	Maximum	12.450.000	6.390.000	2.300.000	16.400.000,00	3.700.000	6.400.000
	N	91	89	86	102	102	102

Sumber : Data Dasar Survei aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia 2005 dan 2009

Apabila melihat besaran maksimum dan minimum pendapatan rumah tangga nelayan pada musim gelombang lemah (banyak ikan), pendapatan tahun 2009 lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2005 dengan selisih pendapatan cukup signifikan sebesar Rp. 4 juta. Begitu

pula saat musim gelombang kuat pendapatan pada tahun 2009 lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2005 dengan selisih sekitar Rp. 4 juta an. Sebaliknya pada musim pancaroba pendapatan maksimum pada tahun 2005 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2009. Pada musim pancaroba kemungkinan nelayan masih melaut dengan daerah tangkapan yang dekat sehingga mereka masih memperoleh hasil yang memadai.

Pendapatan median berdasarkan musim memperlihatkan pada tahun 2009 lebih tinggi dibandingkan 2005. Adanya perbedaan pendapatan rata-rata, maksimum dan median antara musim nampaknya masih menjadi kendala yang belum dapat di atasi nelayan sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan pendapatan antar musim sehingga memerlukan terobosan kegiatan kenelayanan, salah satunya mengembangkan pendapatan alternatif sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Untuk melihat pendapatan rumah tangga nelayan selain pendapatan berdasarkan jenis pendapatan menurut musim juga dapat dilihat besaran pendapatan rumah tangga nelayan berdasarkan musim sebagaimana terlihat dalam tabel 4.5 sebagai berikut :

Tabel 4.5.

Persentase Pendapatan Rumah Tangga Nelayan per bulan menurut gelombang tahun 2005 dan 2009.

No	Besaran Pendapatan	2005			2009		
		B.Ikan (Gel Tnggi)	Pancaroba	Sedikit ikan (Gel kuat)	B.Ikan (Gel Tnggi)	Pancaroba	Sedikit ikan (Gel kuat)
1	< 500.000	80.2	61.8	19.8	13.7	52.9	61.8
2	500.000-1 juta	15.1	19.1	31.9	14.7	14.7	25.5
3	1 juta -1.5 juta	2.3	9.0	16.5	8.8	16.7	3.9
4	1.5 jt-2 juta	1.2	4.5	6.6	18.6	7.8	4.9
5	2 jt – 2.5 jt	1.2	2.2	6.6	21.6	4.9	2.0
6	2.5 jt – 3 jt	-	2.2	11.0	7.8	1.0	-
7	3 jt – 3.5 jt	-	-	1.1	2.9	1.0	1.0
8	> 3.5 jt	-	1.1	6.6	10.9	1.0	1.0
	N	100 (86)	100 (89)	100 (91)	100 (102)	100 (102)	100 (102)

Sumber : Data Dasar Survei aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia 2005 dan 2009

Pada tabel di atas memperlihatkan pendapatan rumah tangga nelayan besaran satu juta kebawah pada tahun 2005 jumlahnya mencapai 95 persen dibandingkan pada tahun 2009 sebesar 28 persen. Begitu pula pendapatan nelayan saat musim pancaroba jumlahnya pada tahun 2005 sebesar 89 persen dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar 67 persen. Tingginya jumlah nelayan yang memiliki pendapatan tersebut kemungkinan karena umumnya nelayan memiliki beberapa jenis alat tangkap yang dapat dipergunakan berbagai musim, memiliki perahu mesin dengan kekuatan besar yang mampu melaut dengan daerah tangkapan yang lebih luas serta waktu yang lebih lama saat melaut. Selain itu pada musim tenang (banyak ikan) nelayan memperoleh ikan yang jumlahnya cukup banyak, meskipun harganya relative turun, tetapi tetap masih memperoleh keuntungan yang cukup banyak. Selain itu, pendapatan yang tinggi pada kedua musim ini karena adanya anggota rumah tangga (ART) yang bekerja, sebagai nelayan (ABK) sehingga total

pendapatan mereka juga cukup besar. Sebaliknya pada rumah tangga nelayan yang memiliki pendapatan satu juta ke bawah pada musim gelombang kuat (sedikit ikan) pada tahun 2009 jumlahnya lebih tinggi dibandingkan tahun 2005. Sedangkan rumah tangga nelayan yang memiliki pendapatan antara 1-3 juta rupiah pada tahun 2009 pada musim gelombang tenang dan musim pancaroba lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2005. Sebaliknya pada saat musim sedikit ikan atau gelombang kuat jumlah rumah tangga nelayan yang memiliki pendapatan 1-3 juta pada tahun 2009 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2005. Sedikitnya jumlah rumah tangga nelayan tersebut antara lain nelayan tidak berani melaut karena gelombang tinggi dan angin kencang, dan kadang-kadang timbul badai yang membahayakan jiwa nelayan, mereka hanya berani mencari ikan di sekitar pantai dan permukiman. Pendapatan yang diperoleh nelayan pada saat musim tersebut hanya berasal dari pendapatan sekali-sekali melaut, atau mencari ikan di pinggir pantai untuk memenuhi kebutuhan lauk pauk sehari-hari. Karena itu, pendapatan nelayan pada saat musim pakeklik/sedikit ikan banyak berkurang jika dibandingkan dengan pendapatan pada saat musim banyak ikan atau musim pancaroba, karena pada musim pancaroba nelayan masih dapat mencari ikan ke daerah lain yang banyak ikannya.

Sementara itu rumah tangga nelayan yang memiliki pendapatan 3 juta ke atas pada saat gelombang tenang tahun 2009 sebanyak 13,9 persen dibandingkan dengan tahun 2005 yang memperlihatkan tidak ada satupun rumah tangga nelayan yang memiliki pendapatan yang sama. Sementara itu pendapatan nelayan pada saat gelombang kuat, pendapatan tahun 2005 lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2009. Adapun tingginya pendapatan rumah tangga nelayan pada saat gelombang tenang (banyak ikan) dan pancaroba kemungkinan daerah tangkapan lebih jauh dan waktu melaut lebih lama. Selain itu perahu yang mereka pergunakan memiliki kapasitas/kekuatan yang lebih besar sehingga daya jelajah juga lebih jauh.

4.1.3. Pendapatan Anggota Kelompok Masyarakat (Pokmas)

Kegiatan Coremap dan pembentukan kelengkapannya di kawasan Kecamatan Tambelan dilakukan melalui tahapan yang cukup panjang, salah satunya adalah pembentukan LPSTK dan Pokmas. Pembentukan Pokmas oleh LPSTK dilakukan pada tahun 2005 yang merupakan wadah bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan, terutama masyarakat nelayan melalui mata pencaharian alternatif (MPA).

Jumlah pokmas yang ada di kawasan Kecamatan Tambelan pada tahun 2008/2009 mencapai sekitar 12 buah yang menekankan pada kegiatan untuk menciptakan Mata Pencaharian Alternatif (MPA). Kegiatan pokmas di kawasan ini memperoleh anggaran kegiatan pada akhir 2008 dan awal 2009 (lihat tabel 2.1). Adapun kegiatan yang memperoleh pendanaan antara lain : budi daya ikan kerapu dengan sistem Keramba Jaring Tancap (KJT), pengolahan kepiting bakau, pembuatan kerupuk ikan dan perbengkelan mesin perahu (pompong). Selain itu ada beberapa kegiatan di luar MTA yang memperoleh biaya dari Coremap adalah program sanitasi lingkungan berupa pengadaan tong sampah di permukiman penduduk.

Proses pembiayaan program kegiatan pokmas (MPA) tersebut merupakan program yang diusulkan oleh anggota pokmas (*bottom up*) melalui LPSTK untuk memperoleh pembiayaan dari Coremap. Setiap pokmas yang mendapat anggaran dari Coremap diharapkan dapat memperoleh tambahan pendapatan dari kegiatan di atas. Untuk mengetahui pendapatan anggota pokmas di kawasan Tambelan dapat dilihat dalam tabel di bawah sebagai berikut ;

Tabel 4.6.
Rata-rata dan per Kapita Pendapatan Anggota Pokmas Kawasan
Tambelan 2009.

No	Jenis Pendapatan	Anggota Pokmas	Non Anggota Pokmas
1	Perdapatan Per Kapita	218.713	307.916
2	Rata-rata	937.671	1.327.522
3	Median	895.000	1.086.666
4	Minimum	76.666	46.000
5	Maksimum	3.066.666	7.850.000
	N	54	66

Sumber: Data Primer, Survei BME Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia 2009.

Kegiatan budidaya ikan kerapu mulai dilakukan dengan turunnya bantuan modal usaha pada Januari 2009 dan bulan Februari 2009 dilaksanakan pembesaran ikan kerapu dengan waktu pembesaran sekitar 10 bulan. Begitu pula dengan pokmas perbengkelan dengan kegiatan utama memperbaiki mesin pompong (perahu) dan mulai beropoperasi pada bulan Februari 2009, meskipun bantuan modal usaha sudah turun pada Nopember 2008. Sementara itu pokmas jender, merupakan pokmas yang beranggotakan ibu-ibu yang kegiatannya pengolahan kepiting bakau dan pembuatan kerupuk ikan. Bantuan dana untuk pengolahan kepiting maupun pembuatan kerupuk turun sekitar Nopember 2008 dan mulai kegiatan pada Februari 2009. Sebelum mulai praktek pembuatan kerupuk ikan beberapa anggota setiap pokmas memperoleh pelatihan pembuatan kerupuk selama 3 hari di Tanjung Pinang. Berdasarkan nara sumber kegiatan pokmas yang telah menghasilkan keuntungan adalah kegiatan pengolahan kepiting dan pembuatan kerupuk ikan. Keuntungan yang diperoleh dari pengolahan

kepiting maupun kerupuk ikan, nilainya kecil yang hanya cukup untuk mengganti upah kerja selama 3 bulan.

Rata-rata pendapatan anggota pokmas adalah sebesar Rp. 937.671,- yang lebih kecil dibandingkan dengan bukan anggota pokmas. Pendapatan anggota pokmas kemungkinan tidak semuanya berasal dari kegiatan yang didanai oleh Coremap, mengingat sampai saat ini sebagian besar kegiatan MPA belum menghasilkan keuntungan yang memadai. Pendapatan anggota pokmas tersebut selain dari kegiatan MPA, kemungkinan mereka mendapat penghasilan yang berasal dari kegiatan diluar Coremap seperti PNPM dan P3D. Selain itu anggota pokmas memiliki sumber pendapatan lain, seperti memiliki warung. Budi daya ikan kerapu melalui KJT baru dipanen setelah dipelihara selama 10 bulan dan diperkirakan panen pada bulan Desember, sehingga belum menghasilkan keuntungan. Pengolahan kepiting bakau "hanya" berjalan sekitar 3 bulan dengan menghasilkan keuntungan yang relatif kecil yang hanya cukup untuk membayar upah pekerja beberapa anggota pokmas. Kegiatan pengolahan kepiting bakau saat ini (saat penelitian) sementara berhenti, karena kekurangan bahan baku sehingga menunda keuntungan.

Pengolahan kepiting bakau ini untuk kedepan memiliki prospek sangat baik, pasar cukup baik, dengan catatan tersedia bahan baku (kepiting) yang cukup dan pengiriman hasil olahan secara berlanjut. Begitu pula kegiatan perbengkelan perbaikan mesin pompong belum menghasilkan keuntungan yang memadai, hanya cukup untuk membayar pegawai (tukang) yang memperbaiki mesin perahu. Kerupuk ikan dan kerupuk atom menjual hasilnya ketika ada kapal merapat ke dermaga setiap 10 hari sekali, dan harus bersaing dengan kerupuk ikan hasil olahan penduduk sehingga keuntungan yang diperoleh juga sangat kecil.

Sementara itu apabila melihat pendapatan maksimum dan minimum anggota pokmas memperlihatkan perbedaan yang sangat mencolok, hal ini menunjukkan adanya kesenjangan miskin-kaya diantara anggota pokmas. Ada anggota pokmas yang memiliki beberapa sumber pendapatan di luar kegiatan MPA, seperti memiliki warung, sebagai

pegawai negeri (pns) atau nelayan yang memiliki alat tangkap yang modern, sehingga dapat menghasilkan tangkapan cukup besar sehingga menambah pendapatan rumah tangga anggota pokmas. Selanjutnya apabila membandingkan dengan pendapatan bukan anggota pokmas, mereka memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan anggota pokmas. Tingginya pendapatan tersebut kemungkinan mereka memiliki beberapa sumber pendapatan antara lain di sektor pertanian, memiliki kebun cengkeh, memiliki toko/warung yang menjual kebutuhan hidup sehari-hari (beras, gula, kopi) atau menjadi pns (guru, pegawai kantor kecamatan).

4.2. FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENDAPATAN

Dalam kurun waktu lima tahun telah terjadi peningkatan rata-rata pendapatan rumah tangga nelayan yang sebesar 6,37 persen di kawasan Kecamatan Tambelan (2005-2009). Peningkatan pendapatan ini apabila dikontrol dengan inflasi daerah (Pekanbaru, Riau) sebesar 6.32 persen pada tahun 2006 dan 7.53 pada tahun 2007, pendapatan per kapita memperlihatkan perubahan yang negative, karena terjadi inflasi sebesar 7,32 persen. Adanya kenaikan pendapatan maksimum dan minimum tentunya ada factor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor faktor yang mempengaruhi diantaranya keberadaan program Coremap dan program lain (PNPM) yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat pesisir. Selain itu perubahan tingkat pendapatan sangat berhubungan dengan faktor internal seperti sumber pendapatan, teknologi alat tangkap, wilayah tangkap biaya produksi dan kualitas SDM serta faktor eksternal.

4.2.1. Keberadaan Coremap dan Program Pemerintah lain

Program-program pembangunan, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat cukup banyak baik yang dibiayai oleh APBN maupun APBD. Salah satu program pembangunan yang ditujukan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir adalah Coremap dan PEMP atau PNPM Mandiri. Program ini sampai sekarang ternyata belum dapat memberikan dampak positif untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan Pulau Tambelan. Hal tersebut karena kurang berjalannya program-program pembangunan tersebut.

Program Coremap di Kabupaten Kepulauan Riau atau Bintan (sekarang) diluncurkan sejak tahun 2004 di beberapa lokasi, salah satunya di kawasan kecamatan Tambelan. Program Coremap sejak tahun 2004 memiliki beberapa program ekonomi produktif yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program yang dikembangkan Coremap di kawasan Tambelan antara lain budidaya ikan kerapu melalui KJT, pengolahan kepiting, pembuatan kerupuk ikan dan atom, bantuan pompong (perahu), perbengkelan dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk melestarikan terumbu karang. Namun demikian berbagai program yang dikembangkan Coremap belum ada yang berhasil, karena baru mulai dikerjakan sekitar bulan Juni 2009. Dengan adanya intervensi program tersebut diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, tetapi karena belum berjalan sehingga pendapatan masyarakat cenderung semakin menurun, dan mereka semakin tergantung oleh bantuan sehingga kemandirian masyarakat semakin luntur. Selain itu, lemahnya perencanaan dan terbatasnya sumber daya manusia serta kurang profesionalnya dalam pengelolaan program di tingkat kabupaten menjadi penyebab utama kegagalan program pembangunan tersebut.

Program pemerintah lain yang ada di kecamatan Tambelan adalah PNPM dan P3DK (pembangunan fisik) serta BLT dan bantuan Raskin. Program pembangunan fisik di Tambelan seperti di atas nampaknya berdampak langsung pada peningkatan pendapatan yang selanjutnya semakin meningkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari keterlibatan sebagian penduduk menjadi pekerja yang mendapat upah pada proyek pembangunan fisik tersebut. Program pembangunan fisik juga menjadi salah satu pendorong berkembangnya ekonomi kawasan

Tambelan sehingga perekonomian di perdesaan menjadi berkembang. Akan tetapi pembangunan fisik (PNPN, P3DK) tampaknya hanya akan memberikan dampak ekonomi jangka pendek karena proyek pembangunan selesai, dampak pembangunan tidak akan dirasakan lagi oleh masyarakat. Oleh sebab itu pelaksanaan pembangunan fisik di kawasan ini harus dilakukan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama masyarakat nelayan agar supaya mereka mampu menguasai teknologi yang berorientasi pada kelautan sehingga dapat digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat umumnya, terutama masyarakat pesisir (nelayan).

4.2.2. Faktor Internal

Sumber Pendapatan dari kegiatan kenelayan terlihat proporsinya lebih tinggi jika dibandingkan dengan non kenelayan terhadap total pendapatan. Pendapatan rumah tangga nelayan lebih baik dibandingkan dengan rumah tangga non nelayan (tabel 4.2), ini memperlihatkan bahwa kegiatan kenelayan dalam rumah tangga mempunyai peran penting dalam ekonomi rumah tangga. Tingginya pendapatan rumah tangga nelayan karena pada umumnya nelayan di kawasan Tambelan memiliki beberapa sumber pendapatan antara lain memiliki pendapatan dari pertanian (perkebunan), warung/perdagangan dan anggota keluarga sebagai pegawai negeri. Selain itu maraknya pembangunan fisik (PNPM dan P3DK) telah memberikan tambahan pendapatan sebagian nelayan sehingga sumber pendapatan semakin baik. Belum berjalannya MPA (mata pencaharian alternative) dalam program Coremap (KJT, perbengkelan, pengolahan kepiting, pembuatan kerupuk) dan juga belum menghasilkan keuntungan telah mengurangi pendapatan, sehingga menjadi sebab mengapa MPA belum dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga nelayan dan kesejahteraan nelayan.

Berkaitan dengan kepemilikan Teknologi Alat tangkap dan Wilayah Tangkap, secara umum dalam empat tahun terakhir belum terdapat perubahan yang berarti dalam kepemilikan alat tangkap dan penggunaan

teknologi penangkapan ikan yang digunakan nelayan dalam kegiatan kegiatan kenelayanan. Berdasarkan observasi dan informasi dari nara sumber alat tangkap yang digunakan nelayan masih terbatas pada jaring, pancing. Sementara itu ada beberapa nelayan yang telah meningkatkan kapasitas mesin yang lebih besar, seperti perahu menggunakan mesin dengan kapasitas lebih besar (15-18 PK) sehingga memiliki jelajah wilayah tangkap yang lebih jauh dan penggunaan GPS untuk mengetahui posisi ikan di laut. Adanya inovasi teknologi penangkapan yang dimiliki nelayan tersebut kiranya dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga nelayan. Perubahan teknologi, terutama pengolahan sumber daya laut hanya akan terjadi apabila ada intervensi atau inovasi teknologi yang dilakukan oleh pihak luar baik pemerintah maupun swasta (LSM). Program Coremap pada dasarnya merupakan alih teknologi yang diberikan kepada nelayan. Coremap memberikan berbagai pelatihan kepada nelayan yang bergabung dalam pokmas untuk menerima transfer teknologi agar supaya dapat berusaha secara mandiri dengan memanfaatkan sumber daya lokal, seperti misalnya pelatihan budidaya ikan kerapu, pengolahan kepiting, pembuatan kerupuk dan perbengkelan (mesin). Namun demikian program inovasi (transfer teknologi) belum berjalan dengan baik, karena terbatasnya sumber daya manusia (trampil), terutama di bidang perikanan menyebabkan alih teknologi dan inovasi teknologi menjadi terhambat. Selain tidak adanya pengawasan terhadap program (Coremap) yang berkaitan kesinambungan program MPA menyebabkan semakin berkurangnya pendapatan nelayan.

Biaya produksi kegiatan melaut saat ini semakin tinggi karena disebabkan meningkatnya harga BBM bensin, solar, maupun bahan lain (makanan pokok) yang diperlukan dalam kegiatan melaut. Peningkatan harga BBM dalam beberapa tahun terakhir menjadi faktor utama meningkatnya biaya produksi melaut. Harga solar maupun bensin 2009 sekitar Rp. 8.000,-, lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2005 sebesar Rp. 4000-5000,-. Kenaikan BBM ini mempengaruhi biaya produksi, dimana rata-rata biaya sekali melaut pada tahun 2005 sebesar Rp. 60.000,- an menjadi sekitar Rp 100.000,- pada tahun 2009. Biaya

produksi (melaut) tentunya berbeda antar musim. Biaya melaut pada waktu gelombang tenang lebih tinggi dibandingkan dengan gelombang kuat sebab wilayah tangkap lebih jauh dan waktu melaut lebih lama. Pada gelombang tersebut biasanya ikan yang ditangkap lebih banyak sehingga nelayan masih menikmati keuntungan. Berbeda melaut pada musim gelombang kuat, nelayan mempunyai keuntungan yang tidak menentu, bahkan kadang-kadang merugi karena perolehan ikan berkurang. Namun demikian pada musim gelombang kuat dan pancaroba, nelayan tetap melaut, karena tidak memiliki pekerjaan lain, sehingga mereka tetap melaut dengan berbagai resiko ada badai, angin kencang dan merugi.

4.2.3. Faktor Eksternal

Perubahan pendapatan nelayan juga berkaitan dengan faktor eksternal antara lain pemasaran, harga dan mekanisme pemasaran, permintaan terhadap hasil tangkapan/produksi, musim/iklim, potensi sumber daya lokal dan degradasi sumber daya pesisir dan laut.

Musim dan iklim merupakan faktor alam di kawasan ini yang dikenal dengan musim gelombang kuat, pancaroba dan gelombang tenang dalam satu sepuluh tahun terakhir tidak mengalami perubahan yang ekstrem. Perubahan iklim tersebut secara umum berdampak pada jumlah (volume) dan produksi ikan yang diperoleh nelayan di laut yang selanjutnya berdampak langsung pada tingkat pendapatan nelayan. Musim gelombang kuat (angin barat) merupakan musim yang kurang bersahabat bagi nelayan, banyak nelayan yang tidak melaut sehingga tidak mendapatkan ikan dan pendapatan. Nelayan yang memiliki pekerjaan sampingan atau mata pencaharian alternatif masih mempunyai pendapatan dari pekerjaan tersebut seperti mempunyai warung (perdagangan), pertanian (kebun) atau memiliki usaha rumah tangga misalnya membuat kue. Sementara mereka yang tidak memiliki pekerjaan sampingan pada umumnya memperbaiki alat tangkap.

Harga dan pemasaran hasil tangkapan ikan di kawasan Tambelan selama lima tahun terakhir tidak mengalami perubahan yang berarti. Harga jual ikan kerapu hidup di tingkat nelayan kepada pengumpul biasanya menyesuaikan dengan harga pasar, meskipun ada kenaikan, tetapi tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan sehingga tidak berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga nelayan. Harga ikan yang cukup tinggi pada saat penelitian jenis ikan tenggiri yang mencapai Rp. 20.000,- per kg. Tingginya harga ikan jenis tenggiri karena nelayan jarang mendapat jenis ikan ini sehingga harganya cukup mahal.

Permintaan terhadap hasil tangkapan/produksi ikan dari kawasan ini cukup tinggi baik untuk pasar domestik maupun internasional. Nelayan di Tambelan biasa menjual hasil tangkapan (ikan hidup) pada pengumpul di Tambelan dengan harga yang ditentukan oleh pengumpul sesuai dengan harga pasar. Untuk memenuhi pasar internasional di kawasan ini terdapat 4 pengumpul besar yang membeli hasil tangkapan nelayan dan juga pembesaran ikan kerapu. Apabila sudah mencapai berat tertentu (7 ons) pengumpul tersebut selanjutnya mengirim ke Singapura dan Hongkong melalui Tanjung Pinang atau dengan kapal "Hongkong" yang datang mengambil hasil tangkapan/pembesaran setiap tiga bulan. Sedangkan pasar domestik hasil tangkapan, berupa ikan asin dan hasil pengolahan ikan berupa kerupuk ikan dipasarkan ke Tanjung Pinang dan Pontianak serta beberapa kota seperti Batam dan Jakarta.

Degradasi sumber daya pesisir dan laut tampaknya menjadi faktor eksternal yang sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar kawasan Tambelan. Dalam dua dasawarsa terakhir kondisi lingkungan laut di sekitar perairan Tambelan sudah kurang menjanjikan dan populasi ikan menurun, karena rusaknya terumbu karang akibat pengeboman dan pembusukan ikan pada waktu dulu. Namun demikian secara umum potensi sumber daya perikanan dan populasi ikan masih cukup baik. Pengambilan karang mati oleh sebagian masyarakat untuk bahan baku fondasi rumah dan penimbunan sekitar pantai juga menjadi factor utama terjadinya degradasi sumber daya pesisir dan laut. Penggunaan bom dan

potassium yang dilakukan nelayan dari luar juga menjadi pemicu utama terjadinya kerusakan terumbu karang. Selain itu penggunaan alat tangkap yang merusak dan tidak ramah lingkungan seperti trawl oleh nelayan dari Jawa dan Thailand juga menjadi pemicu utama kerusakan terumbu karang dan sering menimbulkan konflik antara nelayan local dengan nelayan luar tersebut. Daerah perlindungan laut (DPL) yang dibuat Coremap diharapkan menjadi kawasan konservasi yang melindungi keberadaan terumbu karang tidak berjalan dengan baik, karena kurangnya pengawasan oleh powasmas dan lokasinya yang terlalu jauh dari permukiman nelayan sehingga anggota pokmas jarang melakukan pengawasan ke lokasi DPL. Selain itu tidak layaknya perahu yang diberikan Coremap menyebabkan anggota pokmas/nelayan tidak berani menggunakan kapal tersebut karena khawatir kapal tersebut tenggelam.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. KESIMPULAN

Penelitian BME ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi obyektif tentang pelaksanaan program Coremap yang dilakukan di kawasan Pulau Tambelan sejak tahun 2005. Hasil penelitian ini selanjutnya akan digunakan sebagai bahan monitoring tentang pelaksanaan program tersebut, sehingga merupakan masukan kepada pengelola guna memperbaiki kinerja kelembagaan yang dibentuk Coremap yang diharapkan akan menimbulkan dampak positif terhadap masyarakat pesisir/pantai.

Hasil Penelitian yang dilakukan ini memperlihatkan bahwa secara umum masyarakat Tambelan telah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hal tersebut terlihat semakin banyaknya program pembangunan fisik baik yang dilakukan oleh Coremap maupun dari luar seperti PNPM P3DK. Hasil positif adanya program Coremap adalah semakin menurunnya penggunaan bom dan potassium serta penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan untuk penangkapan ikan.

Rata-rata pendapatan rumah tangga nelayan tahun 2009 menunjukkan peningkatan sekitar 10 persen dibandingkan dengan tahun 2005, tetapi jika melihat pendapatan per kapita memperlihatkan perubahan yang negative, artinya tidak ada peningkatan pendapatan. Begitu pula pendapatan rumah tangga di kawasan Tambelan pada tahun 2009 menunjukkan kenaikan yang cukup baik dengan kenaikan sekitar 6 persen. Peningkatan pendapatan rumah tangga nelayan berkaitan erat dengan faktor internal dan eksternal serta struktural (implementasi) program Coremap.

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Coremap di lapangan memang masih terdapat berbagai hambatan dan kendala sehingga diperlukan memerlukan koordinasi yang berkesinambungan antara pengelola Coremap di tingkat kabupaten (PIU), fasilitator lapangan, LPSTK, Pokmas dan pemerintahan desa.

Manajemen yang berganti-ganti pada tingkat PIU, telah melahirkan ketidakkonsistenan dalam menjalankan aturan main program kegiatan COREMAP sehingga menimbulkan konflik internal di dalam tubuh LPSTK dan Pokmas, sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya secara optimal, akibatnya timbul rasa saling curiga.

Pelaksanaan kegiatan, terutama bantuan fisik (ATK, perahu) dengan cara ditenderkan, tidak dapat menjamin bahwa kualitas bantuan barang dan penentuan lokasi untuk kegiatan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, seperti bantuan perahu motor tidak sesuai untuk kondisi laut Tambelan, atau bangunan pondok informasi Desa Kampung Hilir lokasinya di darat jauh dari laut, tidak bisa dimanfaatkan oleh pokmas dan masyarakat serta pemberian barang bantuan berkualitas rendah sehingga tidak dapat dipakai (tv, mesin ketik).

5.2. REKOMENDASI.

Bertolak dari hasil penelitian dan kesimpulan, ada beberapa yang dapat direkomendasikan antara lain :

Pelaksanaan kegiatan COREMAP perlu peningkatan manajemen pengelolaan dan persiapan program (KJT, perbengkelan, pengelolaan kepitng) lebih matang, dengan melakukan studi kelayakan yang melibatkan dari berbagai disiplin ilmu. Memerlukan kecermatan dan kesesuaian ekologis, ekonomis dan teknis pada setiap pelaksanaan program.

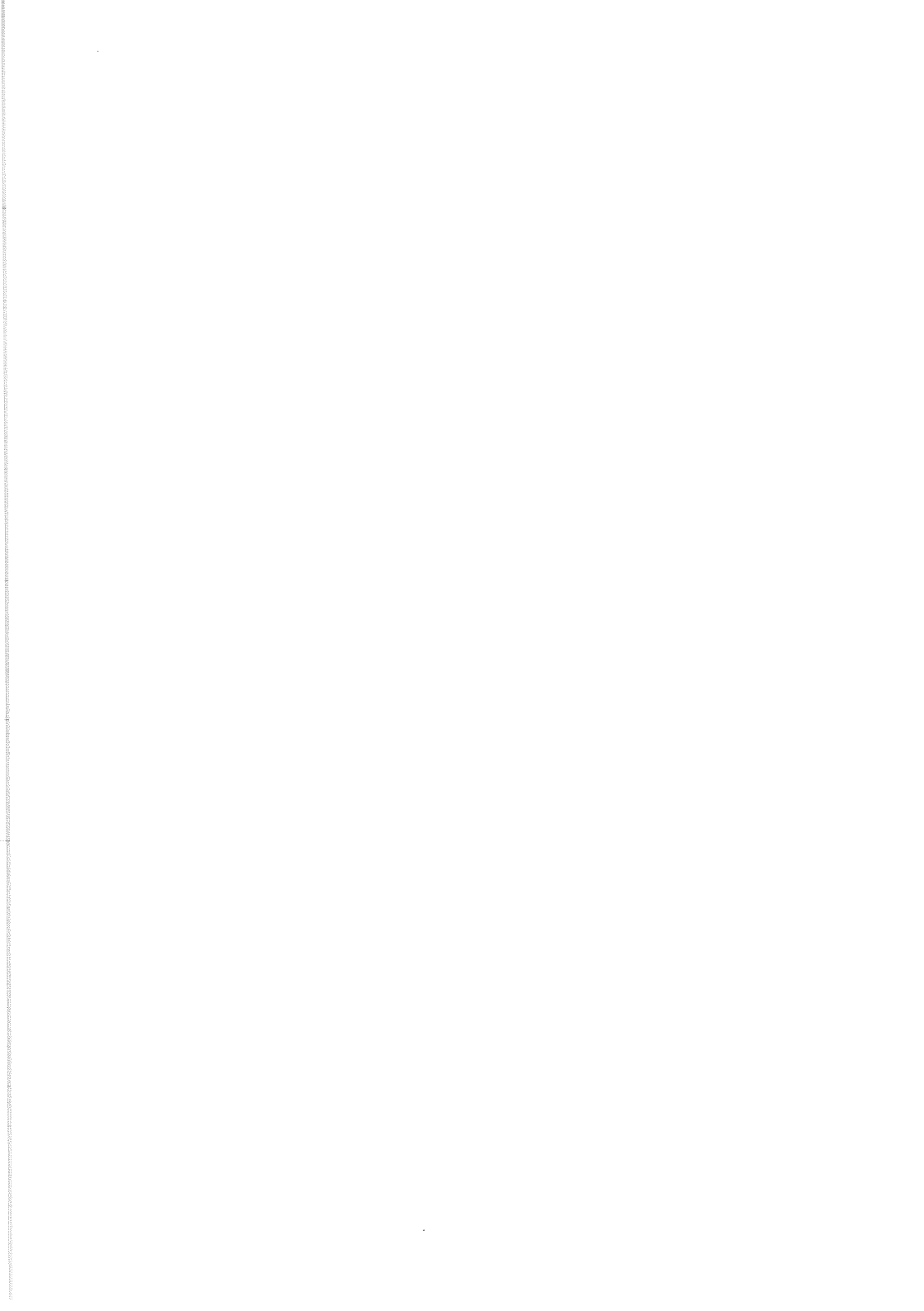
Setiap pelaksanaan program kegiatan hendaknya harus dilakukan dengan cara membuat proyek percontohan, karena program tersebut

memerlukan tingkat keahlian dan pengalaman. Hal itu diperlukan karena adanya kendala keterbatasan kemampuan SDM setempat sehingga perlu mendatangkan tenaga ahli dari luar daerah.

Untuk menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat pelaksana yang terlibat, harus lebih fokus dalam menjalankan program kegiatan dan mengurangi volume kegiatan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Selain itu pelaksana program (PIU, fasilitator) dituntut agar pembinaan kelembagaan LPSTK dan Pokmas sebagai wadah kegiatan harus mendapat penanganan yang lebih serius dan sungguh-sungguh.

Untuk mengefektifkan kegiatan Pokwasmas dalam menjalankan kegiatan pengawasan (konservasi), perlu kiranya disediakan kapal beserta peralatan kerja yang sesuai dengan kondisi perairan dan keinginan masyarakat.

Pembentukan pokmas budi daya ikan kerapu (KJT) dalam memilih anggota hendaknya dilakukan secara lebih selektif mengingat adanya perbedaan pola melaut masyarakat, ada yang melakukan penangkapan di perairan lepas pantai dengan waktu lama, tetapi ada nelayan yang melakukan di sekitar perairan pantai saja, dan pulang hari. Apabila memilih nelayan lepas pantai yang mengelola KJT, telah berdampak kurang terpeliharanya budi daya ikan kerapu.



DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, tanpa Tahun, *Studi Sosial dan Ekonomi Kecamatan Tambelan*. Pekanbaru, Badan Perencana dan Pembangunan Daerah Propinsi Riau.
- Anonim, 2003, *Kepulauan Riau dalam Angka*. Tanjung Pinang, Bappeda Kabupaten Kepulauan Riau dengan PT. Duta Consultant Engineering.
- Anonim, 2004, *Profil Lokasi Coremap II Kecamatan Bintang Timur (Desa Maiur) dan Kecamatan Tambelan*. Tanjung Pinang, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji.
- Bustanil Arifin, 1999, *Kebijakan Ekonomi Kerakyatan : Intervensi Pemerintah dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam, dalam Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara*. Proseding Serasehan Masyarakat Adat Nusantara, Jakarta 15-16 Maret 1999. Kerjasama Panitia Bersama Serasehan Konggres Masyarakat Nusantara dengan lembaga Studi Pers dan Pembangunan
- Cheung, Steven N.S., Penetapan Kontrak dan Alokasi Sumberdaya dalam Perikanan Laut, dalam Smith, Ian R., dan Firial Marahudin (ed.), *Ekonomi Perikanan. Dari Teori Ekonomi ke Pengelolaan Perikanan*. Jakarta, Gramedia.
- Feeny, D. et al., 1990, The Tragedy of the Common: Twenty-Two Years Later. *Human Ecology*, Vol. 18, No. 1.
- Hardin, G., 1968, The Tragedy of the Commons, dalam *Science* 162 No. 3855.
- Kecamatan Tambelan Dalam Angka 2009, Kerjasama BPS Kabupaten Bintang dengan Bappeda Kabupaten Bintang, 2009

- Merton, Robert, 1986, *Social Theory and Social Structure*. London, Advision of McMillan Publishing Co. Inc.
- Sulaeman M. et. al., 2004, *Teknologi untuk Pemberdayaan Masyarakat Pesisir; Seri Pengolahan Ikan*. Jakarta, Departemen Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.
- Sulaeman M. et. al., 2004, *Teknologi untuk Pemberdayaan Masyarakat Pesisir' Seri Alat Tangkap Ikan*. Jakarta, Departemen Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.
- Wantrup, Ciriacy, S.V dan Bishop, Richard C, 1986, "Milik Bersama " sebagai Suatu Konsep Kebijaksanaan Sumberdaya Alam, dalam Smith, Ian R., dan Firial Marahudin (ed.), *Ekonomi Perikanan. Dari Teori Ekonomi ke Pengelolaan Perikanan*. Jakarta, Gramedia.
- Jefta Leibo, 1995. *Sosiologi Pedesaan: Mencari Suatu Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Berparadigma Ganda*, Penerbit Andi Offset Yogyakarta.
- Boyle, Petrick, 1981. *Planning Beter Program*, New York, McGrow Hill Book Company.
- Rogers M Evert and Burdge J Rabel, 1972. *Social Change in Rural Society*. Prentice Hall, Inc, Englewood, New Jersey.

SUMBER INFORMASI

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan.

Konsultan PIU Kabupaten Bintan.

Pemegang Komitmen Program Kegiatan COREMAP Kabupaten Bintan.

Ketua LPSTK Desa Kampung Hilir, Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan.

Ketua LPSTK Desa Batu Lepuk, Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan.

Ketua LPSTK Desa Kampung Melayu Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan.

Ketua LPSTK Kelurahan Teluk Sekuni, Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan.

Petugas Penyuluh Lapangan Perikanan Kabupaten Bintan.

Pengurus Pokmas dan anggota yang terlibat dalam program Kegiatan COREMAP di P. Tambelan.

Kepala Desa Batu Lepuk, Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan.

Kepala Desa Kampung Melayu, Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan.

Kepala Desa Kampung Hilir, Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan.

Lurah Teluk Sekuni, Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan.